



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PROBOLINGGO
TAHUN 2025 - 2029



Disusun oleh :
Bagian Perencanaan
Dinas Koperasi, Usaha Mikro,
Perdagangan dan Perindustrian

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2025 - 2029 merupakan rencana jangka menengah perangkat daerah untuk periode 5 (lima) Tahun. Rencana Strategis ini merupakan bentuk penjabaran visi, misi, tujuan pembangunan Daerah dan program yang menjadi urusan Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 - 2029 Kabupaten Probolinggo dan bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Peraturan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2025 - 2029 merupakan dokumen perencanaan dan dokumen yang digunakan sebagai dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian. Renstra akan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian. Penyusunan dokumen Renstra dilakukan melalui koordinasi antara Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian dengan BAPELITBANGDA dan pemangku kepentingan terkait.

Probolinggo, 26 September 2025

KEPALA DINAS
KOPERASI, USAHA MIKRO,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PROBOLINGGO


TAUFIK ALAMI, S.Sos., M.Si.

Pembina Tingkat I
NIP. 19700108 199602 1 001



BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

DAFTAR ISI

COVER..... iii

KATA PENGANTAR..... iiiii

DAFTAR ISI..... iii

DAFTAR TABEL..... v

DAFTAR BAGAN vii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Landasan Hukum 3

1.3 Maksud dan Tujuan..... 6

1.4 Sistematika Penulisan..... 7

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 10

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah ... 10

2.2 Daya Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian..... 20

2.2.1 Kondisi Kepegawaian Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian21

2.2.2 Kondisi Sarana Prasarana Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian..... 22

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 22

2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian 33

2.5 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah 35

2.6 Penentuan Isu-Isu Strategis 38

2.6.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 38

2.6.2 Telaahan RPJMD Kabupaten Probolinggo..... 43

2.6.3 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Provinsi ..44

2.6.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 53

2.6.5 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)..... 55

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 57

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah 57



BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

3.1.1 Cascading Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo..... 61

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan 62

3.2.1 Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo 62

3.2.2 Penahapan Pembangunan 64

3.2.3 Lokus Rencana Strategis 66

3.2.4 Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah..... 68

BAB IV RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN SERTA PENDANAAN..... 70

4.1 Rencana Program Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Probolinggo..... 70

4.1.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Rancangan Akhir Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo..... 75

4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan Dan Pendanaan ... 92

4.2.1 Definisi Operasional dan Formula Perhitungan Program, Kegiatan Dan Subkegiatan Perangkat Daerah 120

4.2.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan..... 128

4.3 Program Prioritas Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan Dan Perindustrian 130

4.3.1 Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo 137

BAB V PENUTUP..... 139

5.1 Kaidah Pelaksanaan..... 139

5.2 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi..... 140



BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai (Rp) 22

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo 23

Tabel 2.3 Anggaran Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo 29

Tabel 2.4 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian..... 36

Tabel 2.5 Matriks Keterkaitan SWOT dan Isu Strategis 41

Tabel 2.6 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L 49

Tabel 2.7 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi..... 52

Tabel 2.8 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian ditinjau dari implikasi RTRW 53

Tabel 2.9 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian ditinjau dari implikasi KLHS..... 55

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian..... 57

Tabel 3.2 Cascading Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo..... 62

Tabel 3.3 Penahapan Rencana strategis Perangkat Daerah..... 64

Tabel 3.4 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah..... 68

Tabel 4.1 Program Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo 71



BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Rancangan Akhir Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo 76

Tabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan Dan Pendanaan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo..... 93

Tabel 4.4 Definisi Operasional dan Formula Perhitungan Program, Kegiatan Dan Subkegiatan Perangkat Daerah..... 121

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD..... 129

Tabel 4.6 Daftar Program Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Rancangan Akhir Renstra Pemerintah Kabupaten Probolinggo 132

Tabel 4.7 Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo 138



BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan
dan Perindustrian..... 20



BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tujuan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD adalah Meningkatnya Pengembangan Sektor Usaha Berbasis Potensi Unggulan Daerah. Tujuan ini diarahkan untuk memperkuat struktur perekonomian daerah melalui optimalisasi sektor-sektor yang memiliki nilai strategis dan daya saing tinggi. Penetapan tujuan ini tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi secara umum, tetapi juga menekankan pentingnya pengembangan potensi unggulan lokal agar mampu memberikan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.

Sebagai turunan dari RPJMD, Renstra perangkat daerah disusun untuk memastikan langkah operasional yang selaras dengan arah kebijakan tersebut. Renstra berfungsi menjabarkan strategi, program, dan kegiatan yang secara langsung mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Hal ini mencakup upaya pengembangan perdagangan berbasis produk unggulan, penguatan rantai nilai industri pengolahan, hingga peningkatan kapasitas pelaku usaha melalui berbagai bentuk pendampingan, pelatihan, dan fasilitasi akses pasar.

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272-273, Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 29, Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (tiga) tahun.

Indikator utama yang digunakan untuk mengukur ketercapaian tujuan adalah Persentase PDRB Perdagangan dan Rasio PDRB Industri



BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

Pengolahan. Keduanya mencerminkan kontribusi sektor perdagangan dan industri pengolahan terhadap perekonomian daerah. Peningkatan nilai indikator ini menjadi bukti keberhasilan pemerintah daerah dalam mendorong kegiatan ekonomi yang produktif, meningkatkan nilai tambah produk, serta memperluas kesempatan kerja di sektor-sektor unggulan. Dengan demikian, indikator tersebut menjadi tolok ukur yang jelas antara kinerja pembangunan makro dalam RPJMD dan implementasi kebijakan teknis dalam Renstra.

Keselarasan antara RPJMD dan Renstra memastikan bahwa setiap perangkat daerah memiliki peran nyata dalam mendukung prioritas pembangunan daerah. RPJMD memberikan arah strategis melalui tujuan dan indikator kinerja utama, sedangkan Renstra menjadi instrumen operasional yang menguraikan langkah-langkah terukur untuk mencapainya. Dengan pola ini, pengembangan sektor usaha berbasis potensi unggulan daerah dapat berjalan konsisten, terintegrasi, dan berdampak langsung terhadap peningkatan kinerja ekonomi, sehingga sasaran pembangunan daerah dapat tercapai secara efektif dan berkelanjutan.

Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo yang berlandaskan pada RPJMD Kabupaten Probolinggo berfungsi untuk menjabarkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati, Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam penyelenggaraan pembangunan daerah

Dalam menyusun Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah. Selain itu, dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan Renja



BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

Perangkat Daerah. Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah tersebut berupa penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten, Peraturan Kepala Daerah Kabupaten tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Kabupaten dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Probolinggo.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

- 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
- 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 11. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor I94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);



BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
- 15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- 16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Pembangunan Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459) ;
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538) ;
- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 23. Instruksi Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah



BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

- 24. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025;
- 25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043;
- 26. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029;
- 27. Peraturan Bupati Probolinggo nomor 14 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

- 1. Memberikan acuan resmi bagi Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Kabupaten;
- 2. Menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.
- 3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo;



BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

- 4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
- 5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan;
- 6. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 antara lain:

- 1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu untuk mendukung pencapaian visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo;
- 2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi kepala daerah;
- 3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
- 4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:



BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan dasar penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat informasi tentang Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

- 2.1 Pelayanan Perangkat Daerah :
 - 2.1.1 Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah;
 - 2.1.2 Sumber daya Perangkat Daerah;
 - 2.1.3 Kinerja pelayanan Perangkat Daerah; dan
 - 2.1.4 Kelompok sasaran layanan.
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - 2.2.1 Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah;
 - 2.2.2 Isu strategis Perangkat Daerah

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini menjelaskan tentang;

- 3.1 Tujuan
- 3.2 Sasaran
- 3.3 Strategi dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran
- 3.4 Arah Kebijakan Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini menjelaskan tentang.

- 4.1 Uraian Program;
- 4.2 Uraian Kegiatan;



BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

- 4.3 Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;
- 4.4 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
- 4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui IKU Perangkat Daerah;
- 4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan Pemeritahan Daerah melalui IKK.

BAB V. PENUTUP

Pada bab ini dikemukakan kesimpulan substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.



BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, maka Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo peyelenggaraan fungsi:

- a. perumusan kebijakan dibidang koperasi, usaha mikro, perdagangan dan perindustrian;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang koperasi, usaha mikro, perdagangan dan perindustrian;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang koperasi, usaha mikro,perdagangan dan perindustrian;
- d. pelaksanaan administrasi dibidang koperasi, usaha mikro, perdagangan dan perindustrian;
- e. pelaksanaan pembinaan terhadap Sekretariat, Kelompok Jabatan Fungsional dan UPT;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;

3. Kelompok Jabatan Fungsional.

- c. Bidang Perkoperasian membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Usaha Mikro membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Perdagangan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Bidang Perindustrian membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. UPT

Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian sesuai ayat (1) mempunyai tugas pokok membantu bupati melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan Dan Perindustrian *) Kepala Dinas juga mempunyai uraian tugas dan fungsi sesuai ayat (1) sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan dibidang koperasi, usaha mikro, perdagangan dan perindustrian;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang koperasi, usaha mikro, perdagangan dan perindustrian;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang koperasi, usaha mikro,perdagangan dan perindustrian;
- d. pelaksanaan administrasi dibidang koperasi, usaha mikro, perdagangan dan perindustrian;
- e. pelaksanaan pembinaan terhadap Sekretariat, Kelompok Jabatan Fungsional dan UPT;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Tugas Pokok dan Fungsi Sekertaris Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian

Sekretaris mempunyai tugas pokok menyiapkan rumusan, mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan, pemantauan,

evaluasi, pelaporan, pembinaan dan memberikan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan laporan. . Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian dan penyusunan, pembinaan, pemantauan,evaluasi rencana program dan kegiatan;
- b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan Sistem pengendalian Intern pemerintah dan pengelolaan informasi;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan;
- d. pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian penataan organisasi dan tatalaksana;
- e. pembinaan, pemberian dukungan dan pengawasan administrasi umum, meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan,kehumasan dan barang milik daerah/negara, kearsipan dan dokumentasi;
- f. penyusunan, pelaksanaan, perorganisasian, monitoring dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP);
- g. pengoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas.

Paragraf 1

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis dibidang umum dan kepegawaian;
- b. pengelolaan penatausahaan, pendistribusian dan pengelolaan rumah tangga dan barang milik daerah;
- c. penyusunan dan pengelolaan pelaksanaan ketatausahaan, kearsipan dan dokumentasi;
- d. penyusunan dan pengelolaan administrasi kepegawaian dan



BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

- peningkatansumber daya manusia;
- e. penyiapan bahan data kelembagaan, analisa jabatan;
- f. penyiapan bahan pelaksanaan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan;
- g. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan kepegawaian;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Paragraf 2

Kepala Sub Bagian Keuangan

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan dan mengoordinasikan penyelenggaraan urusan keuangan.. Kepala Sub Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis dibidang keuangan;
- b. pengelolaan administrasi keuangan;
- c. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi administrasi keuangan;
- d. penyiapan bahan verifikasi dan pembukaan;
- e. penyusunan bahan evaluasi dan laporan pertanggungjawaban pengelolaan administrasi keuangan;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Alinea 3

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (1) huruf b angka 3, melaksanakan fungsi :

- a. penyiapan bahan administrasi rencana program/kegiatan/anggaran/data dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- b. penyusunan administrasi rencana program/kegiatan/anggaran/data dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan rencana



BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

- program/kegiatan/anggaran data serta akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris

Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Perkoperasian.

Paragraf 3

Kepala Bidang Perkoperasian

Kepala Bidang Perkoperasian mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang perkoperasian. Kepala Bidang Perkoperasian dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pembinaan, pembaharuan dan pengembangan kelembagaan, peningkatan potensi usaha koperasi, kemitraan dan jaringan usaha koperasi, pembiayaan perkoperasian, peningkatan kapasitas sumber daya manusia koperasi serta pengendalian dan pengawasan koperasi;
- b. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan, pembaharuan dan pengembangan kelembagaan, peningkatan potensi usaha koperasi, kemitraan dan jaringan usaha koperasi, pembiayaan perkoperasian, peningkatan kapasitas sumber daya manusia koperasi serta pengendalian dan pengawasan koperasi;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan dibidang pembinaan, pembaharuan dan pengembangan kelembagaan, peningkatan potensi usaha koperasi, kemitraan dan jaringan usaha koperasi, pembiayaan perkoperasian, peningkatan kapasitas sumber daya manusia koperasi serta pengendalian dan pengawasan koperasi;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang pemeringkatan koperasi, izin usaha koperasi, pengawasan dan pemeriksaan koperasi, penilaian kesehatan koperasi simpan



BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

- pinjam/usaha simpan pinjam, pendidikan dan latihan perkoperasian serta pemberdayaan dan perlindungan koperasi;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang izin usaha koperasi, pengawasan dan pemeriksaan koperasi, penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/usaha simpan pinjam, pendidikan dan latihan perkoperasian serta pemberdayaan dan perlindungan koperasi;
- f. pelaksanaan fasilitasi kerjasama antar koperasi serta dengan badan usaha lain;
- g. pelaksanaan administrasi bidang perkoperasian;
- h. penyusunan, pelaksanaan, pengorganisasian dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan bidang;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 4

Kepala Bidang Usaha Mikro

Kepala Bidang Usaha Mikro mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis serta koordinasi pada bidang usaha mikro. Kepala Bidang Bidang Usaha Mikro dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan dibidang kemudahan berusaha, perlindungan, pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro; pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dibidang kemudahan berusaha, perlindungan, pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro;
- b. pelaksanaan monitoring, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang kemudahan berusaha, perlindungan, pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang kemudahan dan perlindungan berusaha, pendataan potensi, kemitraan, penguatan kelembagaan, pembiayaan, koordinasi dengan para pemangku kepentingan, peningkatan sumber daya manusia usaha mikro serta pengembangan kewirausahaan, dan



BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

- pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM serta desain dan teknologi usaha mikro;
- d. pelaksanaan dibidang kemudahan dan perlindungan berusaha, pendataan potensi, kemitraan, penguatan kelembagaan, pembiayaan, koordinasi dengan para pemangku kepentingan, peningkatan sumber daya manusia usaha mikro serta pengembangan kewirausahaan dan pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM serta desain dan teknologi usaha mikro;
 - e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang kemudahan dan perlindungan berusaha, pendataan potensi, kemitraan, penguatan kelembagaan, pembiayaan, koordinasi dengan para pemangku kepentingan, peningkatan sumber daya manusia usaha mikro serta pengembangan kewirausahaan dan pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM serta desain dan teknologi usaha mikro;
 - f. pelaksanaan administrasi bidang usaha mikro;
 - g. penyusunan, pelaksanaan, pengorganisasian dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan bidang;
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Paragraf 5

Kepala Bidang Perdagangan

Kepala Bidang Perdagangan mempunyai tugas merumuskan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang perdagangan. Kepala Bidang Perdagangan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis, perencanaan dan program dibidang perdagangan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis, perencanaan dan program dibidang perdagangan;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang izin usaha perdagangan;

- d. pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan serta pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan;
- e. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan stabilisasi harga bahan pokok dan bahan penting lainnya;
- f. pelaksanaan pengembangan ekspor nasional skala daerah meliputi penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan;
- g. pelaksanaan standarisasi dan perlindungan konsumen;
- h. pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
- i. penyusunan, pelaksanaan, pengorganisasian dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan bidang;
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 6

Kepala Bidang Perindustrian

Kepala Bidang Perindustrian mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan kebijakan di bidang perindustrian. Kepala Bidang Perindustrian dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis, perencanaan dan program dibidang perindustrian;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis, perencanaan dan program dibidang perindustrian;
- c. pelaksanaan penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industry kabupaten;
- d. pelaksanaan pengendalian dan supervisi dibidang izin usaha perindustrian;
- e. pelaksanaan penyediaan sistem informasi industri bagi pelaku industri;
- f. penyusunan, pelaksanaan, pengorganisasian dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan bidang;



BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 7

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 199

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (1) huruf b angka 3, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f terdiri dari sejumlah tenaga dan jenis jabatan fungsional yang dibutuhkan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sub Koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Administrator.
- (4) Sub Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas membantu Pejabat Administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (5) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) ditetapkan oleh Bupati atas usulan Sekretaris Daerah;
- (6) Ketentuan mengenai pembagian tugas Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Pejabat Tinggi Pratama atau setingkat eselon IIb atas usulan Pejabat Administrator melalui surat tugas.

Pasal 200

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (1) huruf g mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas sesuai dengan keahlian.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahlian.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk Bupati dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 8

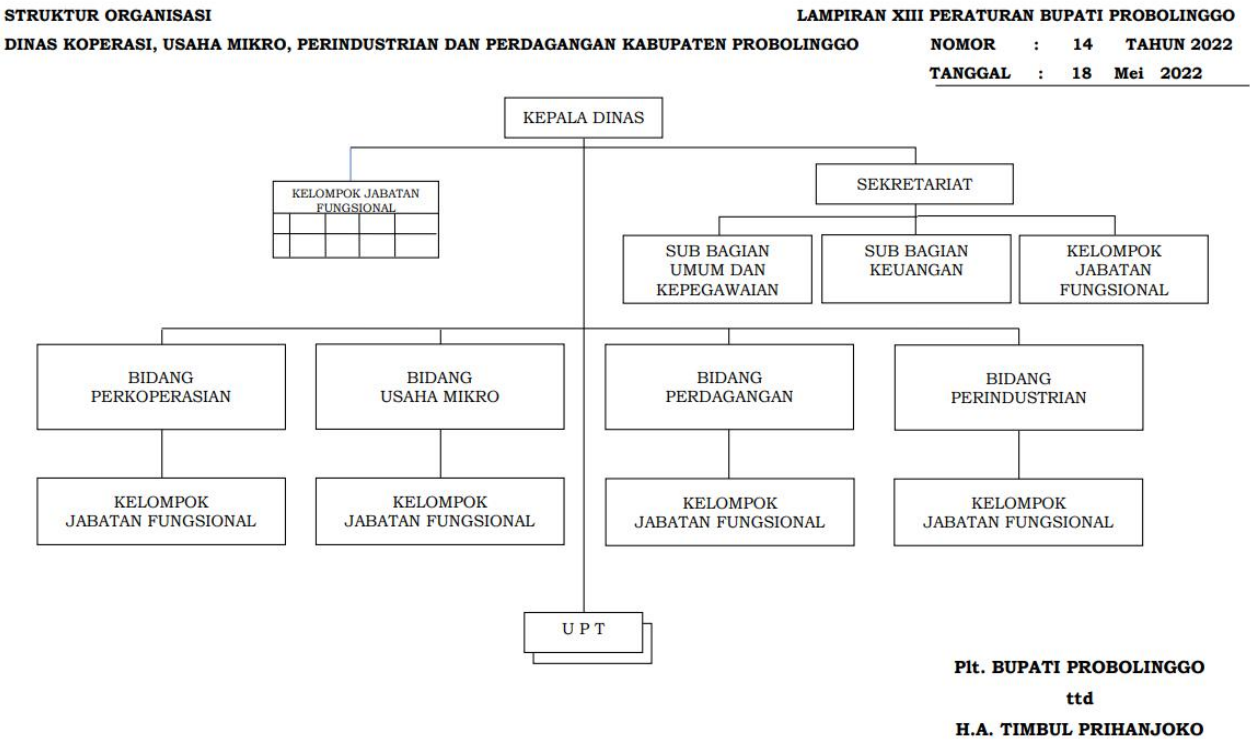
U P T

Pasal 201

Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi serta Uraian Tugas dan Fungsi UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (1) huruf h, ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo sebagaimana Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, dapat dilihat pada bagan dibawah ini:

Bagan 2.1 Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian

Pelaksanaan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian harus dilaksanakan secara professional, efektif dan efesien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, asset/modal, unit usaha yang masih beroperasi/maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkan/nya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang



BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

ada pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian .

2.2.1 Kondisi Kepegawaian Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian

Pelaksanaan Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian sesuai struktur organisasi terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat, membawahi : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; Sub Bagian Keuangan; Kelompok Jabatan Fungsional. Bidang Perkoperasian membawahi Kelompok Jabatan Fungsional; Bidang Usaha Mikro membawahi Kelompok Jabatan Fungsional; Bidang Perdagangan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional; Bidang Perindustrian membawahi Kelompok Jabatan Fungsional; Kelompok Jabatan Fungsional; UPT. Adapun Sumber daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo sebanyak 229 Orang, yang terdiri dari:

- 1. Eselon II : 1 orang
- 2. Eselon III : 5 orang
- 3. Eselon IV : 2 orang
- 4. Pejabat fungsional : 14 orang
- 5. Staf/Non Eselon : 207 orang

Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian sebanyak 229 orang. Berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan yang dimiliki dapat dilihat pada rincian dibawah ini:

- 1. Sarjana S-2 : 14 orang
- 2. Sarjana S-1 : 77 orang
- 3. Diploma -3 : -
- 4. SLTA : 123 orang
- 5. SLTP : 11 orang
- 6. SD : 4 orang

Dari total Sumber Daya 229 orang, sebanyak 110 dengan status Aparatur Sipil Negara dan 119 merupakan non-Aparatur Sipil Negara.



BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

2.2.2 Kondisi Sarana Prasarana Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian

Sementara itu, untuk prasarana dan perlengkapan yang dimiliki oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian sebagai peralatan pendukung tugas fungsi organisasi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai (Rp)

No.	Nama Barang	Jumlah asset yang dimiliki (Rp)	Jumlah Aset Yang Tidak Terpakai (Rp)	Keterangan
		Rp.	Rp.	
1	Tanah	28.779.349.414,56		KIB A
2	Peralatan Dan Mesin	12.236.682.594,01	2.305.267.727,00	KIB B
3	Gedung dan Bangunan	159.103.051.418,48		KIB C
4	Jalan, Irigasi Dan jaringan	963.316.948,72		KIB D
5	Aset Tetap Lainnya	145.509.000,00		KIB E
6	Konstruksi dalam pengerjaan	199.257.850,00		KIB F
7.	Aset Tidak Berwujud	563.904.500	313.710.000,00	KIB G

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian yang diatur dalam Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah maka Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekertariat dan Bidang-bidang dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan. Adapun capaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo

No.	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Presentase Koperasi Aktif	70	-	-	-	-	83,73	-	-	-	-	100	-	-	-	-
2	Presentase Pertumbuhan Pelaku Usaha Mikro	12	-	-	-	-	10,65	-	-	-	-	88,75	-	-	-	-
3	Presentase jumlah koperasi yang volume usahanya meningkat	35	-	-	-	-	39	-	-	-	-	100	-	-	-	-
4	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil Menengah	1,83	-	-	-	-	1,72	-	-	-	-	93,99	-	-	-	-
5	Persentase Pertumbuhan Sektor Perdagangan	5	-	-	-	-	4,33	-	-	-	-	86,60	-	-	-	-



BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

No.	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
6	Pengeluaran per kapita	-	-	13	13	-	-	-	15,01	9,25	-	-	-	100	71,15	-
7	Persentase Koperasi Sehat dan Cukup Sehat	-	1,4	1,7	2	-	-	13,86	14,74	1,57	-	-	100	100	78,50	-
8	Persentase pertumbuhan omset Usaha Mikro	-	20	25	30	4	-	5,25	10,18	11,42	1,97	-	26,25	40,72	38,07	49,25
9	Persentase Peningkatan Nilai Transaksi Perdagangan	-	1	1	1	-	-	8,73	11,37	11,37	-	-	100	100	100	-
10	Kontribusi PDRB Sektor Industri	-	24	24	24	26,5	-	26,18	26,01	26,01	26,60	-	100	100	100	100
11	Prosentase pertumbuhan Omzet Koperasi	-	-	-	-	28,5	-	-	-	-	7,53	-	-	-	-	26,42
12	Presentase Kontribusi PDRB Sub Sektor Perdagangan	-	-	-	-	13	-	-	-	-	13,18	-	-	-	-	100



BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

Evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 hingga tahun 2024 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo dapat disimpulkan bahwa:

Capaian kinerja pembangunan sektor usaha berbasis potensi unggulan daerah pada periode Renstra menunjukkan variasi yang cukup beragam. Pada indikator Presentase Koperasi Aktif, capaian tahun 2020 sebesar 83,73 persen melampaui target 70 persen dengan rasio pencapaian 100 persen, yang menunjukkan kondisi koperasi daerah relatif sehat dan beroperasi aktif. Demikian pula indikator Presentase jumlah koperasi yang volume usahanya meningkat berhasil terealisasi sebesar 39 persen dari target 35 persen dengan rasio capaian 100 persen, menandakan adanya dinamika positif dalam pertumbuhan usaha koperasi.

Pada indikator Presentase Pertumbuhan Pelaku Usaha Mikro dan Pertumbuhan Industri Kecil Menengah, capaian masih sedikit di bawah target. Tahun 2020 pertumbuhan pelaku usaha mikro terealisasi 10,65 persen dari target 12 persen (rasio 88,75 persen), sedangkan pertumbuhan industri kecil menengah mencapai 1,72 persen dari target 1,83 persen (rasio 93,99 persen). Kondisi ini menggambarkan adanya tantangan dalam peningkatan skala usaha mikro maupun daya tahan IKM, meskipun tren pertumbuhan masih tetap terjaga.

Indikator terkait perdagangan juga menunjukkan capaian yang fluktuatif. Persentase pertumbuhan sektor perdagangan tahun 2020 terealisasi sebesar 4,33 persen dari target 5 persen (rasio 86,60 persen), sementara indikator Peningkatan Nilai Transaksi Perdagangan pada 2021–2023 tercapai 100 persen sesuai target yang ditetapkan. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan aktivitas perdagangan, walaupun laju pertumbuhan tahunan sempat berada di bawah target. Indikator Pengeluaran per kapita dan Pertumbuhan omzet usaha mikro masih berfluktuasi, dengan beberapa tahun pencapaian belum



optimal, misalnya pengeluaran per kapita 2023 yang hanya 71,15 persen dari target.

Kontribusi PDRB dari sektor Industri dan Perdagangan relatif stabil. Kontribusi PDRB Sektor Industri pada 2021–2024 konsisten di atas target (26,18–26,60 persen) dengan rasio capaian 100 persen setiap tahun. Begitu pula Kontribusi PDRB Sub Sektor Perdagangan tahun 2024 tercapai 13,18 persen melampaui target 13 persen dengan rasio 100 persen. Namun pada indikator Pertumbuhan omzet koperasi, capaian 2024 hanya sebesar 7,53 persen dari target 28,5 persen (rasio 26,42 persen), yang menjadi catatan penting untuk perbaikan kebijakan. Dengan demikian, meski secara umum indikator makro menunjukkan keselarasan arah kebijakan RPJMD dan Renstra, terdapat beberapa indikator mikro yang masih memerlukan intervensi lebih intensif.

Jika dilihat secara komparatif, indikator makro seperti Kontribusi PDRB Sektor Industri dan Nilai Transaksi Perdagangan menunjukkan kinerja yang paling konsisten dan bahkan melebihi target. Sebaliknya, indikator mikro seperti Pertumbuhan omzet usaha mikro dan Pertumbuhan omzet koperasi justru menjadi titik lemah dengan capaian jauh di bawah target meskipun terjadi tren kenaikan. Hal ini memperlihatkan bahwa struktur ekonomi daerah telah cukup kuat di sektor industri dan perdagangan, tetapi penguatan pada level pelaku usaha kecil, mikro, dan koperasi masih membutuhkan strategi intervensi yang lebih intensif, baik berupa pembiayaan, akses pasar, maupun penguatan kelembagaan. Dengan memperbaiki sisi mikro ini, maka kesinambungan pertumbuhan ekonomi daerah akan lebih merata dan berkelanjutan.

Perubahan indikator utama pada urusan koperasi, usaha mikro, perdagangan, dan perindustrian memperlihatkan dinamika capaian yang berbeda dari tahun ke tahun. Pada indikator Pengeluaran per kapita, target yang ditetapkan tahun 2022 dan 2023 sebesar 13 juta rupiah. Realisasi tahun 2022 mencapai Rp15,01 juta atau 100 persen dari target, sedangkan pada tahun 2023 turun menjadi Rp9,25 juta



atau hanya 71,15 persen dari target. Perubahan ini menunjukkan adanya tekanan daya beli masyarakat, yang kemungkinan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro maupun faktor inflasi, sehingga indikator ini perlu mendapatkan perhatian dalam perencanaan berikutnya.

Untuk indikator Persentase Koperasi Sehat dan Cukup Sehat, target pada 2021 sebesar 1,4 persen berhasil dilampaui dengan capaian 13,86 persen atau 100 persen dari target. Pada 2022 target dinaikkan menjadi 1,7 persen dengan capaian 14,74 persen (100 persen). Namun, pada 2023 target 2 persen hanya tercapai sebesar 1,57 persen (78,50 persen). Pola ini menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada awal periode, tetapi terjadi penurunan kualitas koperasi pada tahun 2023. Hal ini menandakan perlunya evaluasi kebijakan pembinaan koperasi agar keberlanjutan status sehat koperasi tetap terjaga.

Indikator Persentase pertumbuhan omzet Usaha Mikro menunjukkan pergerakan yang cukup dinamis. Target tahun 2021 sebesar 20 persen, dengan realisasi 5,25 persen (rasio 26,25 persen). Tahun 2022 target naik menjadi 25 persen, capaian 10,18 persen (40,72 persen), dan pada 2023 target 30 persen dengan capaian 11,42 persen (38,07 persen). Tahun 2024 target 4 persen tercapai 11,42 persen (49,25 persen). Meskipun capaian setiap tahun masih jauh di bawah target, terlihat tren pertumbuhan yang konsisten dari tahun ke tahun. Namun, rasio capaian menunjukkan adanya gap signifikan yang mengindikasikan target yang ditetapkan terlalu tinggi atau adanya hambatan struktural yang belum teratasi.

Pada indikator Persentase Peningkatan Nilai Transaksi Perdagangan, target setiap tahun dari 2021–2023 adalah 1 persen. Realisasi masing-masing tahun tercatat 8,73 persen pada 2021, 11,37 persen pada 2022, dan 11,37 persen pada 2023. Seluruh capaian tersebut tercatat dengan rasio 100 persen, menunjukkan bahwa target yang ditetapkan relatif rendah dibandingkan potensi capaian. Kondisi ini memperlihatkan daya dorong perdagangan daerah cukup kuat,



meskipun belum sepenuhnya terintegrasi dengan target yang lebih ambisius.

Sementara itu, indikator Kontribusi PDRB Sektor Industri relatif stabil. Target tahun 2021 hingga 2023 ditetapkan 24 persen, sementara realisasi masing-masing tahun mencapai 26,18 persen (2021), 26,01 persen (2022), dan 26,01 persen (2023). Pada 2024 target dinaikkan menjadi 26,5 persen dan terealisasi 26,60 persen. Seluruh capaian ini menunjukkan rasio 100 persen, bahkan melampaui target. Stabilitas sektor industri ini menunjukkan daya tahan yang kuat dan menjadi tulang punggung utama penguatan struktur ekonomi daerah.

Kinerja berdasarkan anggaran dan realisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



Tabel 2.1 Anggaran Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasion antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Rp. 16.942.3 71.156	Rp. 17.425.638 .168	Rp. 18.098.6 07.028			Rp. 16.352.4 81.794	Rp. 16.707.402 .311	Rp. 17.183.0 25.542			96,52	95,88	94,94		
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM			Rp. 98.245.0 00	Rp. 19.638.200	-			Rp. 90.546.4 00	Rp. 19.162.600	-			92,16	97,58	-		
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI			Rp. 101.765. 000	Rp. 84.200.000	Rp. 65.031.5 00			Rp. 96.815.8 00	Rp. 82.841.796	Rp. 61.058.4 77			95,14	98,39	93,89		
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI			Rp. 80.000.0 00	Rp. 25.000.000	Rp. 14.160.0 00			Rp. 77.742.1 63	Rp. 24.627.000	Rp. 13.666.0 00			97,18	98,51	96,51		



BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasion antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Anggaran	Realisasi
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			Rp. 779.190. 000	Rp. 109.600.00 0	Rp. 74.956.5 00			Rp. 694.000. 900	Rp. 107.802.17 0	Rp. 70.153.5 00			89,07	98,36	93,59		
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI			Rp. 160.000. 000	Rp. 98.860.000	Rp. 66.454.0 00			Rp. 147.418. 500	Rp. 97.118.821	Rp. 62.700.0 00			92,14	98,24	94,35		
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			Rp. 560.000. 000	Rp. 696.770.00 0	Rp. 2.190.54 4.800			Rp. 474.581. 594	Rp. 680.934.95 0	Rp. 1.538.60 3.690			84,75	97,73	70,24		
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			Rp. 310.000. 000	Rp. 279.009.00 0	Rp. 352.100. 000			Rp. 291.704. 034	Rp. 276.085.60 0	Rp. 348.524. 796			94,10	98,95	98,98		
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN			-	-	Rp. 6.150.00 0			-	-	Rp. 5.846.10 0			-	-	95,06		
PROGRAM PENINGKATAN			Rp. 965.000. 000	Rp. 863.132.28 8	Rp. 1.148.73 2.000			Rp. 782.010. 700	Rp. 847.736.93 4	Rp. 1.046.87 9.900			81,04	98,22	91,13		



BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasion antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Anggaran	Realisasi
SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN																	
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			Rp. 825.000. 740	Rp. 732.457.64 5	Rp. 3.113.49 5.000			Rp. 247.702. 018	Rp. 77.115.261	Rp. 3.055.54 1.200			30,02	10,53	98,14		
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR			Rp. 255.000. 000	Rp. 80.004.650	Rp. 133.485. 000			Rp. 253.046. 284	Rp. 79.597.797	Rp. 130.760. 618			99,23	99,49	97,96		
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			Rp. 210.250. 000	Rp. 132.360.00 0	Rp. 157.994. 500			Rp. 209.770. 550	Rp. 132.108.95 6	Rp. 155.560. 611			99,77	99,81	98,46		
PROGRAM PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI			Rp. 75.000.0 00	Rp. 221.987.00 0	Rp. 274.767. 000			Rp. 74.247.5 00	Rp. 218.684.50 0	Rp. 273.182. 288			99,00	98,51	99,42		
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			Rp. 10.223.4 98.429	Rp. 14.267.113 .714	Rp. 7.210.28 4.628			Rp. 8.856.14 2.040	Rp. 11.947.169 .398	Rp. 5.406.62 4.120			86.63	83,74	74,98		



BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasion antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Anggaran	Realisasi
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA			Rp. 65.000.0 00	Rp. 22.660.000	Rp. 50.000.0 00			Rp. 59.971.6 50	Rp. 18.388.500	Rp. 48.302.3 00			92,26	81,15	96,60		
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL			Rp. 15.000.0 00	-	Rp. 50.000.0 00			Rp. 1.774.00 0	-	Rp. 37.637.4 00			11,83	-	75,27		



BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian

Untuk menganalisi kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian dapat menggunakan analisis metode SWOT. Dimana tantangan dan peluang Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian dalam mencapai target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:

1. Faktor Internal

a. Kekuatan

- 1) Potensi Sumber Daya Alam daerah Kabupaten Probolinggo dapat menjadi penunjang perkembangan sektor industri dan perdagangan terutama dari sektor pertanian, pertambangan dan kelautan yang memiliki nilai ekonomis dan daya saing berupa keunggulan komparatif yang cukup tinggi.
- 2) Sumber Daya Manusia Kabupaten Probolinggo yang begitu besar merupakan potensi pendukung perkembangan sektor industri baik sebagai pelaku usaha, tenaga kerja maupun sebagai pangsa pasar yang potensial.
- 3) Pembinaan yang telah dilaksanakan selama ini, merupakan dasar dan modal untuk membentuk wirausaha-wirausaha baru yang lebih profesional untuk mengelola usaha secara lebih efesien dan produktif.
- 4) Dukungan Kebijakan pemerintah yang berupaya menciptakan iklim berusaha yang lebih kondusif dapat menjadi modal utama bagi pengembangan dunia usaha industri dan perdagangan
- 5) Potensi sumber daya aparatur yang dapat diberdayakan secara maksimal, selaku unsur pembina dunia usaha, diharapkan mampu memotivasi dunia usaha dan masyarakat luas untuk berperan serta secara aktif dalam program pengembangan sektor industry dan perdagangan di daerah.
- 6) Dukungan sarana/ prasarana organisasi yang terus ditingkatkan dapat menunjang peningkatan kinerja aparat dalam mengemban tugas selaku unsur pembina dunia usaha di sektor koperasi, usaha mikro, industri dan perdagangan.



BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

b. Kelemahan

- 1) Penciptaan iklim usaha yang lebih kondusif belum sepenuhnya dapat diantisipasi secara penuh oleh kalangan dunia usaha di Kabupaten Probolinggo baik yang bergerak dalam sektor industri maupun sector perdagangan.
- 2) Tingkat ketergantungan para pelaku ekonomi di daerah terhadap APBD Kabupaten Probolinggo masih sangat dominan.
- 3) Masih terbatasnya infrastruktur ekonomi yang ada di Kabupaten Probolinggo terutama untuk mengembangkan daerah-daerah tertentu yang potensial.
- 4) Masih terus diperlukan peningkatan profesionalisme dan jiwa interpreneur aparat pembina sehingga mampu mengantisipasi dinamika perkembangan dunia usaha yang sangat cepat dan berubah setiap saat melalui pelatihan yang berkesinambungan.
- 5) Lemahnya sistem pelaporan dan informasi dari dunia usaha bidang Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian.
- 6) Masih terbatasnya Kualitas dan kuantitas SDM pembina perkoperasian dan usaha mikro
- 7) Mekanisme penegakan sanksi, Pembinaan/ Pemberdayaan terhadap koperasi dan usaha mikro masih tergolong lemah.
- 8) Sarana prasarana pendukung operasional yang belum memadai

2. Faktor Eksternal

a. Peluang

- 1) Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan Pemerintah.
- 2) Masih terbukanya peluang pasar terhadap produk-produk lokal Daerah.
- 3) Banyaknya komoditi unggulan yang dapat dikembangkan.
- 4) Animo masyarakat untuk berkoperasi dan berwirausaha
- 5) Terbukanya peluang kerjasama dengan perguruan tinggi, Lembaga desain, Konsultan, Badan Riset dan Balai Pengujian

b. Tantangan

- 1) Masuknya produk-produk import yang menambah ketatnya persaingan produk-produk perindustrian dan perdagangan .



BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

- 2) Berdirinya pusat-pusat perbelanjaan modern yang mengancam keberadaan perindustrian dan perdagangan.
- 3) Masih adanya kecendrungan masyarakat menyukai produk luar negeri.
- 4) Beredarnya produk-produk dalam negeri yang belum memiliki standarisasi produk.
- 5) Potensi yang sangat besar dalam mengembangkan usaha melalui kemitraan dengan platform digital, perhotelan dan took retail.
- 6) Dukungan Akses Permodalan dan pemasaran dari Lembaga permodalan bagi pelaku usaha yang signifikan seperti halnya program Kredit Usaha Rakyat.

2.5 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian memiliki tugas dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, maka Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo mengampu tanggung jawab dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo membantu Bupati untuk mengemban kewenangan di bidang dibidang Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian. Sebagaimana tugas dan kewenangan tersebut, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo memiliki fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian.

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo di tengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan



BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian. Adapun pemetaan permasalahan pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.4 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1	Rendahnya Kualitas dan Daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro	Rendahnya Kualitas SDM Koperasi dan Usaha Mikro	Rendahnya kapasitas SDM pengelola Koperasi dan Usaha Mikro
			Rendahnya pengetahuan dan pemahaman SDM Koperasi dan Usaha Mikro
		Kurang optimalnya kelembagaan dan pengawasan bagi Koperasi dan Usaha Mikro	Rendahnya aspek kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro
			Rendahnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja K-UKM
			Rendahnya akses informasi dan akurasi data perkoperasian dan Usaha mikro
			Belum optimalnya pendampingan kelembagaan koperasi
		Lemahnya akses pembiayaan bagi Koperasi dan Usaha Mikro	Kurangnya informasi layanan perbankan / lembaga keuangan yang dimanfaatkan Koperasi dan Usaha Mikro yang memadai
			Rendahnya kapabilitas Koperasi dan Usaha Mikro



No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
			Dalam mendapatkan akses pembiayaan permodalan
		Rendahnya Produktifitas dan daya saing produk Koperasi dan Usaha Mikro	Rendahnya kapasitas dan kualitas produksi
			Produk Koperasi dan Usaha Mikro belum memenuhi standardisasi
		Kurang optimalnya akses pemasaran bagi Koperasi dan Usaha Mikro	Rendahnya Jangkauan dan jaringan pemasaran produk
			Kurang optimalnya integrasi pemasaran hasil usaha mikro maupun home industry berbasis ekonomi digital, terutama bagi usaha mikro dengan komoditas lokal unggulan daerah
2	Kurang nya daya saing di sektor perdagangan dalam persaingan pembangunan ekonomi era global	Kurang optimalnya pengembangan perdagangan dalam negeri	Masih ketergantungan terhadap produk impor
			Kurang optimalnya Penyediaan Sarana Distribusi perdagangan
			Fluktuasi harga barang pokok dan penting
			Kurang nya promosi dan Kerjasama perdagangan antar Swasta dengan Swasta (P to P) maupun Swasta dengan Pemerintah (P to G) serta Pemerintah dengan Pemerintah (G to G)



No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
		Kurang optimalnya perlindungan konsumen dan tertib niaga	Masih rendahnya pemahaman masyarakat berkaitan dengan tertib niaga berupa Penertiban Alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta Pengawasan Barang dalam Keadaan
3	Kurangnya daya saing di sektor industri dalam persaingan pembangunan ekonomi era global	Belum Optimalnya peranan industri kecil dan menengah dalam meningkatkan produktifitas dan penerapan Sistem Informasi Industri	Kurangnya Infrastruktur Pendukung Ekonomi sektor Industri
			Belum Optimalnya Penerapan Pengendalian Izin Usaha Industri
			Belum optimalnya struktur industri (huluantara-hilir)
			Belum optimalnya Penerapan sistem informasi dan data industri
			Lemahnya penerapan teknologi industri pada IKM

2.6 Penentuan Isu-Isu Strategis

2.6.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo memiliki mandat utama dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang koperasi, usaha mikro, perdagangan, dan perindustrian. Mandat ini bersumber dari pembagian urusan pemerintahan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melaksanakan sebagian urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar serta urusan pilihan yang menjadi kewenangan daerah.



Secara umum, pelayanan yang diberikan perangkat daerah ini meliputi: (1) fasilitasi dan pembinaan kelembagaan koperasi serta peningkatan kapasitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM); (2) pengembangan dan pengawasan sektor perdagangan, termasuk upaya stabilisasi harga, perlindungan konsumen, serta penyediaan sarana dan prasarana perdagangan; dan (3) pengembangan serta penguatan sektor perindustrian, khususnya industri kecil dan menengah, melalui peningkatan daya saing, hilirisasi produk, serta pemberdayaan sentra industri.

Dalam pelaksanaan pelayanan, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo berorientasi pada pencapaian tujuan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Probolinggo. Beberapa pelayanan utama yang diberikan mencakup: pelayanan pendaftaran dan pengesahan badan hukum koperasi, pendampingan usaha mikro melalui program pelatihan dan akses permodalan, fasilitasi pemasaran produk unggulan daerah melalui kegiatan promosi dan pameran, penyediaan sarana perdagangan seperti pasar rakyat dan gudang, serta pelayanan bimbingan teknis dan pendampingan industri kecil menengah dalam peningkatan kualitas dan diversifikasi produk.

Kualitas pelayanan perangkat daerah ini diukur melalui indikator kinerja utama yang ditetapkan dalam Renstra, antara lain persentase koperasi sehat dan cukup sehat, persentase pertumbuhan omzet usaha mikro, persentase peningkatan nilai transaksi perdagangan, kontribusi PDRB sektor industri, dan pengeluaran per kapita masyarakat. Indikator-indikator tersebut mencerminkan orientasi pelayanan yang tidak hanya terbatas pada aspek administratif, tetapi juga berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi daerah, serta daya saing produk lokal Kabupaten Probolinggo.

Berdasarkan analisis faktor internal (kekuatan dan kelemahan) serta faktor eksternal (peluang dan tantangan), dapat dirumuskan sejumlah isu strategis yang perlu mendapat perhatian dalam perencanaan pembangunan sektor koperasi, usaha mikro, perdagangan, dan perindustrian Kabupaten Probolinggo.



BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

1. Optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya alam dan SDM daerah.

Kabupaten Probolinggo memiliki basis pertanian, kelautan, dan pertambangan yang kuat, serta SDM yang besar sebagai pelaku usaha maupun tenaga kerja. Namun, pemanfaatannya belum maksimal karena keterbatasan infrastruktur ekonomi, rendahnya profesionalisme pelaku usaha, dan lemahnya sistem pelaporan dunia usaha.

2. Peningkatan daya saing koperasi, usaha mikro, dan industri kecil menengah (IKM).

Meskipun terdapat animo masyarakat untuk berkoperasi dan berwirausaha, kualitas manajemen, jiwa kewirausahaan, dan kapasitas SDM pembina masih terbatas. Lemahnya pembinaan, penegakan regulasi, dan sarana prasarana juga menjadi kendala. Hal ini berimplikasi pada rendahnya daya saing produk lokal menghadapi produk impor dan dominasi pusat perbelanjaan modern.

3. Penguatan akses pasar dan standarisasi produk lokal.

Masih terbukanya peluang pasar dan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap produk lokal merupakan peluang yang besar. Namun, masih banyak produk daerah yang belum memenuhi standar mutu, sementara preferensi masyarakat terhadap produk impor cukup tinggi. Penguatan branding, standarisasi, dan hilirisasi produk unggulan menjadi isu penting.

4. Digitalisasi dan inovasi dalam pengembangan usaha.

Peluang kemitraan dengan platform digital, retail modern, maupun sektor perhotelan sangat besar, tetapi masih banyak pelaku usaha yang belum mampu memanfaatkannya. Perlu strategi percepatan transformasi digital pada koperasi, usaha mikro, dan IKM untuk memperluas jaringan pemasaran dan meningkatkan omzet.



BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

5. Ketersediaan pembiayaan dan keberlanjutan usaha kecil dan mikro.

Dukungan akses permodalan melalui program nasional seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) sangat membantu, namun tingkat ketergantungan pelaku usaha pada APBD masih tinggi. Diversifikasi sumber pembiayaan, peningkatan literasi keuangan, serta kemitraan dengan lembaga permodalan swasta menjadi tantangan strategis.

6. Penguatan tata kelola dan kapasitas kelembagaan perangkat daerah.

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian masih menghadapi keterbatasan aparatur pembina, sarana prasarana operasional, serta kelemahan dalam pelaporan kinerja. Hal ini dapat menghambat efektivitas pembinaan koperasi dan usaha mikro, sehingga peningkatan tata kelola birokrasi dan profesionalisme aparatur menjadi isu strategis utama.

Tabel 2.5 Matriks Keterkaitan SWOT dan Isu Strategis

No	Faktor SWOT	Uraian	Keterkaitan → Isu Strategis
1.	Strength (S)	• Potensi SDA pertanian, kelautan, pertambangan yang tinggi. • SDM besar sebagai pelaku usaha dan tenaga kerja. • Pembinaan usaha sudah berjalan. • Dukungan kebijakan pemerintah. Aparatur dan sarana organisasi tersedia.	Isu 1: Optimalisasi pemanfaatan potensi SDA dan SDM. Isu 2: Peningkatan daya saing koperasi, UMKM, dan IKM.
2.	Weakness (W)	• Iklim usaha kondusif belum sepenuhnya terbangun. • Tingginya ketergantungan pada APBD. • Infrastruktur ekonomi terbatas.	Isu 5: Ketersediaan pembiayaan dan keberlanjutan usaha kecil dan mikro. Isu 6: Penguatan tata kelola dan kapasitas kelembagaan perangkat daerah



BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

No	Faktor SWOT	Uraian	Keterkaitan → Isu Strategis
		• Profesionalisme & jiwa kewirausahaan aparat dan pelaku masih rendah. • Lemahnya sistem informasi dan pelaporan usaha. • Sarpras operasional belum memadai.	
3.	Opportunity (O)	• Kepercayaan masyarakat pada pelayanan pemerintah meningkat. • Peluang pasar produk lokal masih terbuka. • Banyak komoditi unggulan. • Animo masyarakat untuk berkoperasi/berwira usaha. • Peluang kerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga riset, konsultan, dll.	Isu 3: Penguatan akses pasar dan standarisasi produk lokal. Isu 4: Digitalisasi dan inovasi dalam pengembangan usaha.
4.	Threat (T)	• Produk impor menambah ketatnya persaingan. • Pusat perbelanjaan modern mengancam UMKM. • Preferensi masyarakat pada produk luar negeri. • Produk lokal belum standar mutu. • Disrupsi platform digital & retail modern. • Keterbatasan dukungan akses modal.	Isu 2: Peningkatan daya saing koperasi, UMKM, dan IKM. Isu 3: Penguatan akses pasar dan standarisasi produk lokal. Isu 5: Ketersediaan pembiayaan dan keberlanjutan usaha kecil dan mikro.



2.6.2 Telaahan RPJMD Kabupaten Probolinggo

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo memiliki keterkaitan dengan Tujuan ke 2 dan Sasaran ke 6 dari RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo berperan untuk Meningkatkan Pengembangan Sektor Usaha Berbasis Potensi Unggulan Daerah dengan dukungan meningkatkan Rasio PDRB Industri Pengolahan dan meningkatkan Persentase PDRB Perdagangan.

Dalam rangka mendukung pencapaian Tujuan ke-2 RPJMD Kabupaten Probolinggo 2025–2029, yaitu mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berdaya saing, serta Sasaran ke-6, yakni meningkatkan pengembangan sektor usaha berbasis potensi unggulan daerah, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan, dan Perindustrian (DKUPP) memiliki sejumlah isu strategis yang perlu mendapat perhatian serius.

Pertama, penguatan basis ekonomi daerah berbasis potensi unggulan masih menjadi tantangan utama. Kabupaten Probolinggo memiliki potensi besar di sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan industri kreatif. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya diolah menjadi produk bernilai tambah tinggi. Rendahnya hilirisasi menyebabkan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB belum optimal.

Kedua, daya saing dan kemandirian UMKM serta koperasi masih perlu ditingkatkan. Banyak pelaku usaha menghadapi keterbatasan modal, akses teknologi, serta kelemahan dalam tata kelola kelembagaan. Selain itu, transformasi digital yang masih rendah membuat UMKM dan koperasi sulit memperluas akses pasar, baik lokal, nasional, maupun global.

Ketiga, terkait akses pasar dan distribusi perdagangan, keberadaan sarana distribusi seperti pasar rakyat, pusat promosi produk unggulan, maupun gudang, sebagian masih memerlukan revitalisasi dan pengelolaan modern. Jaringan pemasaran produk



BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

unggulan daerah juga belum terkoneksi secara optimal dengan marketplace digital, ritel modern, maupun pasar ekspor.

Keempat, isu stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok juga menjadi fokus penting. Fluktuasi harga dan distribusi barang kebutuhan pokok serta barang penting kerap menimbulkan gejolak yang berdampak pada inflasi daerah. Untuk itu, penguatan mekanisme pengawasan stok serta pemanfaatan sistem informasi perdagangan terintegrasi menjadi kebutuhan mendesak.

Kelima, terdapat tantangan dalam peningkatan kontribusi perdagangan dan industri terhadap PDRB. Meskipun sektor ini sudah memberi sumbangan signifikan, masih diperlukan upaya kebijakan akselerasi investasi, terutama bagi industri kecil dan menengah berbasis potensi lokal, agar mampu menjadi motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi.

Keenam, aspek regulasi, perizinan, dan pengawasan usaha juga menjadi perhatian. Masih ada hambatan birokrasi dalam pelayanan perizinan, khususnya bagi UMKM dan industri kecil. Selain itu, pengawasan terhadap mutu produk, perlindungan konsumen, dan pengendalian peredaran barang berbahaya masih perlu diperkuat.

Ketujuh, kapasitas SDM dan transformasi digital pelaku usaha juga masih terbatas. Kemampuan manajerial, inovasi, literasi keuangan, dan pemanfaatan teknologi digital belum merata. Padahal, pemanfaatan teknologi seperti e-commerce, digital marketing, SIINas, dan OSS RBA sangat penting untuk memperluas jangkauan pasar serta meningkatkan daya saing di era ekonomi digital.

2.6.3 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Provinsi

1. Telaahan Renstra Kementrian Lembaga

Mengacu pada RPJMN Tahun 2025 – 2029 terdapat delapan prioritas nasional yaitu :

- 1) memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
- 2) memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan,



BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

- energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
- 3) melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
 - 4) memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
 - 5) melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
 - 6) membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
 - 7) memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
 - 8) memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Urusan Koperasi dan UMKM mendukung agenda ketiga, keempat dan keenam dengan sasaran Meningkatnya Pengembangan Sektor Usaha Berbasis Potensi Unggulan Daerah. Berdasarkan RPJMN Tahun 2025-2029, kebijakan nasional di bidang Koperasi dan UMKM Tahun 2025-2029 diarahkan untuk meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, membangun dari desa, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan ekonomi yang dilaksanakan dengan strategi :

- 1) Meningkatkan kemitraan usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Besar, mencakup pengembangan kapasitas usaha dan kualitas produk, penguatan kapasitas kelembagaan dan perluasan kemitraan usaha;
- 2) Meningkatkan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha, dilaksanakan melalui penyediaan skema pembiayaan bagi wirausaha dan UMKM, termasuk modal awal usaha dan impact investment, serta pendampingan mengakses kredit/pembiayaan;
- 3) Meningkatkan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi mencakup peningkatan kapasitas pengurus dan manajer koperasi, serta pendampingan kelompok untuk berkoperasi khususnya pendampingan kepada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;



BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

- 4) Meningkatkan penciptaan peluang usaha dan start-up dilaksanakan melalui pelatihan kewirausahaan, inkubasi usaha, penguatan kapasitas layanan usaha, dan pengembangan sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM);
- 5) Meningkatkan nilai tambah usaha sosial ditingkatkan melalui pendampingan akses permodalan, peningkatan kapasitas, serta fasilitasi akses kepada pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Urusan Perdagangan mendukung agenda ketiga dan keempat dengan arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Pengembangan dan Pengamanan Pasar Tujuan Ekspor yang dilaksanakan dengan strategi meliputi:
 - 1. Mengamankan pangsa ekspor di pasar utama (merupakan redefinisi dari pasar tradisional), terdiri dari 20 negara berdasarkan nilai ekspor non migas terbesar ke dunia di tahun terakhir;
 - 2. Meningkatkan diversifikasi produk ekspor;
 - 3. Memperluas tujuan ekspor ke pasar prospektif (merupakan redefinisi dari pasar non-tradisional), terdiri dari 20 negara diluar pasar utama yang dinilai berdasarkan indeks komposit terbesar dengan variabel rata-rata impor negara mitra selama 2014-2018, tren impor negara mitra selama 2014-2018, tren ekspor Indonesia ke negara mitra selama 2014-2018, rata-rata pangsa ekspor produk/kontribusi terhadap ekspor non migas selama 2014-2018, dan tren pangsa ekspor Indonesia di Negara mitra selama 2014-2018;
- b. Peningkatan Perundingan dan Pemanfaatan Perjanjian Kerjasama Perdagangan Internasional yang akan dilaksanakan dengan strategi meliputi:
 - 1. Meningkatkan perjanjian perdagangan dengan negara-negara mitra dagang;
 - 2. Meningkatkan efektivitas Preferential Trade Agreement (PTA) / Free Trade Agreement (FTA) /Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA);
- c. Penguatan Jaringan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok yang akan dilaksanakan dengan strategi meliputi:
 - 1. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan;
 - 2. Meningkatkan koordinasi dan peran pemerintah daerah dalam kelancaran distribusi;
- d. Pengendalian Harga dan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok akan dilaksanakan dengan strategi meliputi:
 - 1. Meningkatkan akurasi data harga barang kebutuhan pokok;
 - 2. Meningkatkan koordinasi dan pengawasan barang kebutuhan pokok; dan
 - 3. Mengoptimalkan pengelolaan impor barang kebutuhan pokok.



BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

- e. Peningkatan pemberdayaan konsumen akan dilaksanakan dengan strategi meliputi:
 - 1. Meningkatkan edukasi konsumen; dan
 - 2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan konsumen;
- f. Peningkatan pelaku usaha yang bertanggung jawab melalui penerapan tertib niaga, tertib mutu, dan tertib ukur akan dilaksanakan dengan strategi meliputi:
 - 1. Meningkatkan edukasi pelaku usaha dalam kegiatan perdagangan; dan
 - 2. Meningkatkan pengawasan kegiatan perdagangan dan kepastian penegakan hukum
- g. Pembinaan dan Pengamanan Pasar Dalam Negeri akan dilaksanakan dengan strategi meliputi:
 - 1. Meningkatkan penggunaan dan perdagangan produk dalam negeri; dan
 - 2. Meningkatkan koordinasi dan sinergi lintas K/L dan daerah dalam mendukung implementasi sistem logistik nasional yang efektif dan efisien
- h. Peningkatan pembinaan, pengembangan, pengawasan, dan dukungan peraturan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG), dan Pasar Lelang Komoditas (PLK) akan dilaksanakan dengan strategi meliputi:
 - 1. optimalisasi pemanfaatan PBK, SRG, dan PLK melalui: (i) peningkatan sinergitas Sistem Resi Gudang, Pasar Lelang Komoditas, dan Perdagangan Berjangka Komoditi; (ii) peningkatan dukungan legislasi, pengawasan penindakan dan litigasi PBK, SRG dan PLK; (iii) peningkatan literasi kepada masyarakat dan pelaku PBK, SRG, dan PLK; dan (iv) xc/SRG dan PLK
- i. Penguatan Integritas di Lingkungan Kementerian Perdagangan akan dilaksanakan dengan strategi meliputi:
 - 1. Memperkuat sistem manajemen kinerja aparatur Kementerian Perdagangan;
 - 2. Membangun sistem komunikasi dan teknologi informasi yang terintegrasi;
 - 3. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana penunjang dan pendorong kinerja aparatur Kementerian Perdagangan;
 - 4. Meningkatkan kualitas pengawasan dan akuntabilitas kinerjaaparatur Kementerian Perdagangan;
 - 5. Mengoptimalkan penyiapan kebutuhan SDM Kementerian Perdagangan sesuai Analisis Jabatan;
 - 6. Memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan di lingkungan Kementerian Perdagangan; serta



BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

- 7. Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan laporan keuangan di lingkungan Kementerian Perdagangan.
- j. Penguatan Pelayanan Publik yang Prima
 - 1. Memperkuat pelayanan publik yang responsif; serta
 - 2. Meningkatkan keterbukaan informasi publik.
- k. Peningkatan Kualitas Kebijakan Perdagangan yang Harmonis dan Berbasis Kajian
 - 1. Meningkatkan kualitas kajian perdagangan; serta
 - 2. Memperkuat dan menyelaraskan wewenang, kelembagaan, dan regulasi di bidang perdagangan.
- 1. Pengembangan Kapasitas SDM Berbasis Kompetensi.
 - 1. Mengembangkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) bidang perdagangan yang produktif dan inovatif;
 - 2. Meningkatkan kesempatan dan penghargaan terhadap Sumber Daya Manusia (SDM) bidang perdagangan berprestasi
 - 3. Mengembangkan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) berbasis kompetensi yang terintegrasi, dan kompetitif; dan
 - 4. Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) perdagangan.

Urusan Perindustrian mendukung agenda keempat dan kelima dengan arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi yang akan dilaksanakan dengan strategi meliputi:
 - 1. meningkatkan industrialisasi berbasis pengolahan komoditas pertanian, kehutanan, perikanan, kemaritiman, dan nonagro yang terintegrasi hulu-hilir;
 - 2. meningkatkan industrialisasi melalui pengembangan smelter dan kawasan industri terutama di luar Jawa;
 - 3. meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital;
 - 4. memperbaiki iklim usaha dan meningkatkan investasi, termasuk reformasi ketenagakerjaan; dan
 - 5. mengembangkan industri halal;
- b. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan TKDN yang akan dilaksanakan dengan strategi meliputi:
 - 1. meningkatkan diversifikasi, nilai tambah, dan daya saing produk ekspor dan jasa;
 - 2. meningkatkan akses dan pendalaman pasar ekspor;
 - 3. mengelola impor;
 - 4. meningkatkan kandungan dan penggunaan produk dalam negeri termasuk melalui pengadaan pemerintah yang efektif;
 - 5. meningkatkan partisipasi dalam jaringan produksi global;



BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

- c. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi yang akan dilaksanakan dengan strategi meliputi:
- 1. mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital dan industri 4.0;
 - 2. meningkatkan sistem logistik dan stabilitas harga; dan
 - 3. meningkatkan penerapan praktik berkelanjutan pada industri pengolahan dan pariwisata.
- d.Meningkatkan produktivitas dan daya saing yang akan dilaksanakan dengan strategi meliputi:
- 1. Pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerjasama industry
 - 2. Penguatan pendidikan tinggi berkualitas

Tabel 2.6 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L

Sasaran Renstra K/L	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra K/L	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Koperasi dan UMKM			
Terwujudnya Koperasi yang berkualitas dan modern	Kurang Optimalnya model bisnis dan Kelembagaan Koperasi	Dukungan kebijakan stimulus ekonomi dari pemerintah pusat dalam upaya peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi	Rendahnya Tingkatnya Kesadaran masyarakat dalam berkoperasi
Terwujudnya Pemberdayaan Koperasi dan UMKM yang efektif	Rendahnya kapasitas dan kompetensi SDM Koperasi dan UMKM	Dukungan kebijakan stimulus ekonomi dari pemerintah pusat dalam upaya peningkatan kapasitas dan kompetensi koperasi dan Umkm melalui Bantuan DAK	Masih lemahnya SDM dalam mengembangkan kemampuan diri khususnya dalam hal penerapan teknologi digital
Terwujudnya Data dan informasi Koperasi dan UMKM yang andal dan terintegrasi	Akurasi Data dan informasi Koperasi dan UMKM	Tersedianya Sistem Informasi Data dan Koperasi dan UMKM seperti aplikasi SIDT dari Pemerintah pusat	Masih terbatasnya kesediaan SDM aparatur pendukung sektor koperasi dan umkm
Perdagangan			
Meningkatnya peran daerah dalam fasilitasi ekspor dan impor	Persaingan perdagangan bebas dari luar negeri yang	Adanya dukungan kebijakan dari pemerintah pusat terkait pembatasan impor dan	Keterbatasan akses informasi SKA potensi produk ekspor di daerah



Sasaran Renstra K/L	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra K/L	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
	mengancam produk potensi ekspor	penyelenggaraan pusat promosi di dalam negeri dan luar negeri (Pusat Promosi)	
Mewujudkan stabilitas harga barang kebutuhan pokok	Fluktuasi harga barang kebutuhan pokok skala nasional	Adanya dukungan kebijakan dari pemerintah pusat stabilisasi harga ketika harga bahan pokok bergejolak seperti operasi pasar	Belum adanya kebijakan HET pada barang kebutuhan bahan pokok
Meningkatnya Kinerja Daerah di Bidang Kemetrologian	Kurangnya Pemahaman Masyarakat di Bidang Kemetrologian	Adanya dukungan kebijakan dari pemerintah pusat terkait penertiban tertib ukur	Rendahnya tingkat kesadaran pelaku usaha terhadap kemetrologian
Meningkatnya Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Masih rendahnya UMKM yang memasarkan produk melalui system elektronik dan kemitraan pemasaran produk dalam negeri	Banyaknya e- marketplace yg telah tersedia baik dari pihak ketiga maupun pemerintah	- Kualitas SDM Umkm yang belum mumpuni dalam penerapan e- marketplace - Kurang optimalnya standarisasi produk dalam melaksanakan kemitraan produk
Meningkatnya Penguatan dan Pengembangan Sistem dan Sarana Perdagangan	Kurangnya kualitas sarana perdagangan yang disediakan	Adanya dukungan kebijakan dari pemerintah pusat terkait pengembangan sarana perdagangan seperti pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, Pasar Lelang Komoditas dan Pasar SNI	Ketergantungan Pemda kepada Pemerintah pusat terkait revitalisasi sarana perdagangan karena keterbatasan APBD
Perindustrian			
Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif	Belum adanya kebijakan Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif	Telah tersusunnya RIPIN dan RIPIP sebagai dasar acuan Penyusuna RPIK	RPIK perlu dilakukan penyesuaian sesuai dengan RTRW terbaru
Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri	Masih lemahnya peran IKM local dalam pembangunan ekonomi daerah	Adanya dukungan pemerintah pusat dan provinsi serta stakeholder yang lain dalam upaya	Minimnya kemampuan IKM baik dalam produktivitas



Sasaran Renstra K/L	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra K/L	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Pengolahan Nonmigas		mengembangkan IKM lokal	maupun penerapan teknologi Industri
Terwujudnya Sistem Informasi Industri yang Berkualitas	Masih belum efektif Penerapan Sistem Informasi Industri	Adanya dukungan pemerintah pusat dan provinsi serta stakeholder yang lain dalam upaya mengembangkan kualitas Sistem Informasi Industri	Keterbatasan SDM dalam penerapan system informasi industri

2. Telaahan Renstra Provinsi

Dapat dilihat pada Renstra Provinsi Jawa Timur, mengampu misi **Jatim Kerja** “Memperluas lapangan kerja yang berkualitas melalui peningkatan kewirausahaan baru (start-up), pengembangan ekonomi kreatif, iklim investasi, stabilitas ekonomi serta pengendalian harga kebutuhan pokok, dan penguasaan keterampilan abad 21 (21st Century Skills) yang berdaya saing”.

Tujuan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur yaitu Meningkatkan Nilai Tambah KUMKM yang didukung sasaran sebagai berikut :

- 1. Meningkatnya Nilai Tambah Bruto KUKM
- 2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Tujuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur yaitu Meningkatkan Nilai Tambah Produksi dan Meningkatnya Nilai Tambah Penyelenggaraan Perdagangan yang didukung sasaran sebagai berikut :

- 1. Meningkatnya PDRB sektor industri pengolahan
- 2. Meningkatnya PDRB sektor Perdagangan
- 3. Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
- 4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah



BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

Tabel 2.7 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi

Sasaran Renstra Provinsi	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra Provinsi	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Meningkatnya Nilai Tambah Bruto KUMKM	Masih banyaknya manajemen Koperasi dan Usaha Mikro yang belum mendasarkan pada prinsip kewirausahaan	Adanya dukungan pemerintah pusat dan provinsi serta stakeholder yang lain dalam upaya pemberdayaan koperasi dan Usaha Mikro	Minimnya koordinasi dan komunikasi antar pihak terkait dalam pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro karena masih adanya ego sektoral.
Meningkatnya PDRB sektor industry pengolahan	Masih lemahnya peran IKM local dalam pembangunan ekonomi daerah	Adanya dukungan pemerintah pusat dan provinsi serta stakeholder yang lain dalam upaya mengembangkan IKM lokal	Minimnya kemampuan IKM baik dalam produktivitas maupun penerapan teknologi Industri
Meningkatnya PDRB sektor Perdagangan	Masih lemahnya pengembangan perdagangan dalam negeri di daerah	Adanya dukungan pemerintah pusat dan provinsi serta stakeholder yang lain dalam upaya pengembangan perdagangan dalam negeri	Minimnya kapasitas fiskal di daerah
	Fluktuasi Harga Bahan Pokok	Adanya dukungan pemerintah pusat dan provinsi serta stakeholder yang lain dalam upaya stabilisasi harga kebutuhan pokok	Masih belum ada kebijakan daerah yang menyokong stabilisasi harga kebutuhan pokok
Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Belum maksimalnya dukungan dari pelaku usaha dalam bidang kemetrologian	Adanya Amanat UU 23 Tahun 2014 pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan diserahkan ke Pemerintah	Lemahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam hal meleak metrologi



Sasaran Renstra Provinsi	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra Provinsi	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
		Kabupaten/Kota. termasuk juga kedalam penentuan tarif retribusi pelayanan tera/tera ulang,	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan program dan kegiatan Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian masih belum efektif dan efisien.	Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian menjadi salah bidang prioritas unggulan yang akan diintervensi dalam bentuk program dan kegiatan	Masih minimnya SDM baik dalam kuantitas maupun kualitas guna mendukung keberhasilan pemberdayaan dan pengembangan Koperasi, Usaha mikro, Perdagangan dan Perindustrian

2.6.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pemerintahan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi urusan Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian, memiliki faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian yang ditinjau dari implikasi RTRW dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.8 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian ditinjau dari implikasi RTRW

No.	Bidang Tupoksi DKUPP	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Koperasi & Usaha Mikro	Dukungan RTRW pada pengembangan pusat-pusat pelayanan kawasan, termasuk pengembangan ekonomi lokal di	Keterbatasan infrastruktur ekonomi di wilayah tertentu (jalan usaha tani, pasar, logistik) yang bisa menghambat



No.	Bidang Tupoksi DKUPP	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
		pusat kegiatan lokal (PKL) dan pusat pelayanan lingkungan (PPL). • Peluang kerjasama dengan sektor agribisnis, agropolitan, dan minapolitan untuk penguatan kelembagaan usaha mikro. • Arahan RTRW mendukung pemberdayaan masyarakat agribisnis dan pelaku ekonomi lokal.	distribusi produk UMKM. Belum meratanya kualitas SDM usaha mikro di seluruh kecamatan.
2.	Perdagangan	• RTRW menetapkan pengembangan pusat perdagangan dan jasa di PKL Kraksaan, Dringu, Leces, dan Tongas. • Arahan pengembangan kawasan strategis menempatkan perdagangan dan jasa sebagai fungsi utama kawasan perkotaan. • Tersedianya dukungan zonasi untuk pasar, pertokoan, dan logistik.	• Persaingan ketat dengan perdagangan modern (ritel besar) yang juga berkembang di kawasan perkotaan. • Keterbatasan standarisasi dan kualitas produk lokal, yang berpotensi menghambat penetrasi pasar.
3.	Perindustrian	• RTRW menetapkan kawasan peruntukan industri di Kecamatan Tongas, Leces, Paiton, Gending, Pajarakan, Wonomerto, dan Sumberasih. • Adanya arahan pengembangan industri ramah lingkungan, didukung infrastruktur logistik	• Ketentuan RTRW mengharuskan standar lingkungan tinggi (AMDAL, pengolahan limbah B3) yang bisa menjadi beban bagi IKM. • Belum meratanya akses sarana prasarana industri di barat dan timur Kabupaten. • Potensi konflik pemanfaatan



No.	Bidang Tupoksi DKUPP	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
		(transportasi, pergudangan). • Penegasan kawasan industri sebagai penggerak perekonomian daerah.	ruang dengan kawasan pertanian dan permukiman.

2.6.5 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Starategis (KLHS)

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo ditinjau dari impikasi KLHS dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.9 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian ditinjau dari implikasi KLHS

No.	Telaah KLHS terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Hambatan
1.	aktivitas ekonomi oleh masyarakat dalam skala usaha apapun (besar, menengah, kecil maupun mikro atau rumah tangga) memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.	adanya dukungan dan komitmen dari pemerintah pusat dan provinsi terhadap upaya menciptakan aktivitas ekonomi yang berwawasan lingkungan	kapasitas SDM pelaku usaha Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian relatif masih kurang sehingga sangat berpengaruh terhadap manajemen usaha yang ramah lingkungan;
		meningkatnya peran serta masyarakat dalam bentuk aktivitas yang peduli lingkungan	jumlah pelaku usaha di sektor ini sangat banyak dan tersebar di seluruh wilayah kabupaten sehingga cukup menyulitkan dalam hal pencegahan dan



No.	Telaah KLHS terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Hambatan
			pengendalian pelanggaran terhadap lingkungan
		adanya perhatian/dukungan internasional bagi setiap entitas atau kelompok masyarakat yang melakukan aktivitas berbasis lingkungan	minimnya SDM ASN pengampu bidang Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perdagangan



BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 -2029 yang telah ditetapkan oleh Bupati Probolinggo dan diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian						Kondisi Akhir
				(n-2)	(n)	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)		
1	Meningkatnya Pengembangan Sektor Usaha Berbasis Potensi Unggulan Daerah		Persentase PDRB Perdagangan	4,11	4,67	5,23	5,78	6,34	6,9	7,46	
			Rasio PDRB Industri Pengolahan	27,19	27,35	27,43	27,44	27,45	27,47	27,48	
1.1		Meningkatnya omzet koperasi	% Pertumbuhan omzet koperasi	7,53	8	8,5	9	9,5	10	10,5	
1.2		Meningkatnya omzet Usaha Mikro	% Pertumbuhan omzet Usaha Mikro	1,97	2	2,25	2,5	2,75	3	3,25	
1.3		Meningkatnya PDRB Sub Sektor Perdagangan	% Kontribusi PDRB sub sektor perdagangan	13	13,5	14	14,5	15	15,5	16	
1.4		Meningkatnya PDRB Sub Sektor Industri	% Kontribusi PDRB sub sektor industri	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5	
2			Meningkatkan Tatakelola Birokrasi Perangkat Daerah	Persentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah	1,22	1	1	1	1	1	1

Tujuan pembangunan yang ditetapkan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD. Tujuan utama perangkat daerah ini adalah Meningkatnya



Pengembangan Sektor Usaha Berbasis Potensi Unggulan Daerah. Tujuan tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam beberapa sasaran strategis yang terukur dengan indikator kinerja utama, sehingga dapat memudahkan pemantauan capaian pembangunan dari kondisi awal hingga target akhir periode Renstra.

Indikator utama tujuan ini adalah Persentase PDRB Perdagangan dan Rasio PDRB Industri Pengolahan. Pada kondisi awal (n-2), persentase PDRB perdagangan tercatat sebesar 4,11 persen, dengan target capaian yang meningkat secara bertahap hingga 7,46 persen pada akhir periode (n+4). Demikian pula, rasio PDRB industri pengolahan yang pada kondisi awal 27,19 persen diarahkan untuk naik secara gradual hingga mencapai 27,48 persen pada akhir periode. Pergerakan indikator ini mencerminkan arah pembangunan ekonomi daerah yang berorientasi pada penguatan sektor perdagangan dan industri pengolahan sebagai penopang utama struktur ekonomi.

Definisi Operasional dan Formula Perhitungan Indikator :

1. **Persentase PDRB Perdagangan**
 - **Definisi Operasional :** Menggambarkan kontribusi sektor perdagangan terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Probolinggo pada harga konstan atau berlaku. Indikator ini **menunjukkan** sejauh mana sektor perdagangan berperan dalam perekonomian daerah.
 - **Formula Perhitungan :**
$$\text{Persentase PDRB Perdagangan} = \frac{\text{PDRB Perdagangan}}{\text{PDRB total}} \times 100\%$$
2. **Rasio PDRB Industri Pengolahan**
 - **Definisi Operasional :** Rasio ini menunjukkan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap total PDRB Kabupaten Probolinggo. Indikator ini menjadi tolok ukur kekuatan sektor industri dalam struktur ekonomi daerah.
 - **Formula Perhitungan :**
$$\text{Rasio PDRB Industri Pengolahan} = \frac{\text{PDRB Industri Pengolahan}}{\text{PDRB total}} \times 100\%$$



BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

Tujuan tersebut kemudian dijabarkan ke dalam beberapa sasaran strategis. Sasaran pertama adalah Meningkatnya omzet koperasi dengan indikator Persentase pertumbuhan omzet koperasi. Dari kondisi awal 7,53 persen, target capaian ditetapkan meningkat secara bertahap hingga mencapai 10,5 persen pada akhir periode. Sasaran kedua adalah Meningkatnya omzet usaha mikro, dengan indikator Persentase pertumbuhan omzet usaha mikro, yang pada kondisi awal sebesar 1,97 persen diarahkan meningkat menjadi 3,25 persen pada akhir periode. Kedua sasaran ini mencerminkan fokus pada penguatan usaha berbasis masyarakat dan koperasi sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan.

Definisi Operasional dan Formula Perhitungan Indikator :

1. **Persentase Pertumbuhan Omzet Koperasi**
 - **Definisi Operasional :** Mengukur peningkatan omzet (volume usaha) koperasi di Kabupaten Probolinggo dalam satu tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Indikator ini menggambarkan perkembangan usaha koperasi dalam menciptakan nilai tambah ekonomi.
 - **Formula Perhitungan :**
$$\% \text{Pertumbuhan Omzet Koperasi} = \frac{\text{Omzet Koperasi (n)} - \text{Omzet Koperasi (n - 1)}}{\text{Omzet Koperasi (n - 1)}} \times 100\%$$
2. **Persentase Pertumbuhan Omzet Usaha Mikro**
 - **Definisi Operasional :** Menunjukkan peningkatan omzet usaha mikro di Kabupaten Probolinggo setiap tahun. Indikator ini digunakan untuk menilai keberhasilan pembinaan usaha mikro dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing.
 - **Formula Perhitungan :**
$$\% \text{Pertumbuhan Omzet UM} = \frac{\text{Omzet UM (n)} - \text{Omzet UM (n - 1)}}{\text{Omzet UM (n - 1)}} \times 100\%$$

Sasaran berikutnya adalah Meningkatnya PDRB sub sektor perdagangan dan Meningkatnya PDRB sub sektor industri. Indikator yang digunakan adalah Persentase kontribusi PDRB sub sektor perdagangan yang dari kondisi awal 13 persen ditargetkan meningkat menjadi 16 persen, serta Persentase kontribusi PDRB sub sektor industri yang dari kondisi awal 26,5 persen ditargetkan naik

menjadi 29,5 persen. Kedua sasaran ini menekankan peran strategis perdagangan dan industri dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih kokoh.

3. **Persentase Kontribusi PDRB Sub Sektor Perdagangan**

- **Definisi Operasional :** Persentase ini menunjukkan besarnya kontribusi sub sektor perdagangan dalam PDRB Kabupaten Probolinggo. Indikator ini menjadi ukuran daya dorong sektor perdagangan terhadap perekonomian daerah.
- **Formula Perhitungan:**

$$\% \text{ Kontribusi PDRB Perdagangan} = \frac{\text{Kontribusi PDRB sektor Perdagangan}}{\text{PDRB total}} \times 100\%$$

4. **Persentase Kontribusi PDRB Sub Sektor Industri**

- **Definisi Operasional :** Menggambarkan peran sub sektor industri pengolahan dalam membentuk total PDRB Kabupaten Probolinggo. Indikator ini memperlihatkan kekuatan sektor industri dalam menopang pertumbuhan ekonomi daerah.
- **Formula Perhitungan :**

$$\% \text{ Kontribusi PDRB Industri} = \frac{\text{Kontribusi PDRB sektor Industri}}{\text{PDRB total}} \times 100\%$$

Selain tujuan utama, perangkat daerah ini juga menetapkan tujuan kedua yaitu Meningkatkan Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah. Tujuan ini diarahkan untuk memperbaiki kualitas manajemen internal organisasi agar semakin efektif, akuntabel, dan transparan. Indikator yang digunakan adalah Persentase kenaikan LHE AKIP perangkat daerah dengan kondisi awal 1,22 persen, dan ditargetkan meningkat secara konsisten sebesar 1 persen setiap tahun hingga akhir periode. Dengan tujuan ini, diharapkan perangkat daerah mampu memberikan pelayanan publik yang semakin baik sekaligus mendukung keberhasilan pencapaian tujuan utama pembangunan ekonomi daerah.



BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

Definisi Operasional dan Formula Perhitungan Indikator

5. Persentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah

- **Definisi Operasional :** Mengukur peningkatan nilai Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE AKIP) perangkat daerah setiap tahun. Indikator ini mencerminkan perbaikan dalam tata kelola birokrasi, perencanaan, penganggaran, serta pelaporan kinerja.
- **Formula Perhitungan :**

$$\text{Nilai Akhir AKIP PD} = (\text{Nilai Perencanaan} \times 0.30) + (\text{Nilai Pengukuran} \times 0.10) + (\text{Nilai Pelaporan} \times 0.15) + (\text{Nilai Evaluasi Internal} \times 0.10) + (\text{Nilai Capaian Kinerja} \times 0.35)$$

3.1.1 Cascading Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo

Pemerintah Kabupaten Probolinggo melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025 – 2029 menetapkan arah kebijakan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing sebagai bagian dari upaya memberantas kemiskinan. Fokus pembangunan ini diarahkan pada pengembangan sektor usaha yang berbasis potensi unggulan daerah.

Tujuan dari RPJMD ini adalah *"Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berdaya Saing dalam Upaya Memberantas Kemiskinan"*, Indikator utama untuk mengukur tujuan ini adalah *pertumbuhan ekonomi*. Dengan indikator kinerja sasaran Persentase PDRB Perdagangan dan Rasio PDRB Industri Pengolahan.

Perangkat daerah yang berperan langsung dalam pencapaian sasaran ini adalah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo yang tujuan yang selaras dengan sasaran RPJMD, yaitu *"Meningkatnya Pengembangan Sektor Usaha Berbasis Potensi Unggulan Daerah"* dengan indikator utama Persentase PDRB Perdagangan dan Rasio PDRB Industri Pengolahan. Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, DKUPP menetapkan beberapa sasaran strategis, antara lain :

- Meningkatkan omzet koperasi dengan indikator kinerja yang digunakan Persentase pertumbuhan omzet koperasi
- Meningkatkan omzet usaha mikro dengan indikator kinerja yang digunakan Persentase pertumbuhan omzet usaha mikro



BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

- Meningkatnya PDRB sub sektor perdagangan dengan indikator kinerja yang digunakan Kontribusi PDRB sub sektor perdagangan
- Meningkatnya PDRB sub sektor industri dengan indikator kinerja yang digunakan Kontribusi PDRB sub sektor industri

Struktur cascading ini menunjukkan keterpaduan antara RPJMD dan perencanaan internal DKUPP. Dengan fokus pada pertumbuhan sektor usaha berbasis potensi daerah serta penguatan koperasi dan UMKM, DKUPP memainkan peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berdampak langsung terhadap pengurangan kemiskinan di Kabupaten Probolinggo, yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.2 Cascading Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo

RPJMD	RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029			
TUJUAN	Meningkatnya <u>Pertumbuhan Ekonomi Inklusi dan Berdaya Saing</u> Dalam Upaya <u>Memberantas Kemiskinan</u>			
INDIKATOR TUJUAN	Pertumbuhan ekonomi			
SASARAN	Meningkatnya Pengembangan Sektor Usaha Berbasis Potensi Unggulan Daerah			
INDIKATOR SASARAN	Persentase PDRB Perdagangan		Rasio PDRB Industri Pengolahan	
OPD	Dinas <u>Koperasi</u> , <u>Usaha Mikro</u> , <u>Perdagangan</u> dan Perindustrian			
TUJUAN OPD	Meningkatnya Pengembangan Sektor Usaha Berbasis Potensi Unggulan Daerah			
INDIKATOR OPD	Persentase PDRB Perdagangan		Rasio PDRB Industri Pengolahan	
SASARAN OPD	Meningkatnya PDRB Sub Sektor <u>Perdagangan</u>	Meningkatnya omzet <u>koperasi</u>	Meningkatnya omzet <u>Usaha Mikro</u>	Meningkatnya PDRB Sub Sektor Industri
INDIKATOR SASARAN OPD	Kontribusi PDRB sub sektor perdagangan	Persentase Pertumbuhan omzet koperasi	Persentase Pertumbuhan omzet usaha mikro	Kontribusi PDRB sub sektor industri

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

3.2.1 Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo

Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo tahun 2025–2029 disusun sebagai pedoman pembangunan sektor koperasi, UMKM, perdagangan, dan



BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

perindustrian agar sejalan dengan visi dan misi pembangunan daerah. Penahapan pelaksanaannya dibagi ke dalam lima tahun dengan fokus yang berbeda sesuai prioritas pembangunan daerah.

Untuk mencapai tujuan meningkatnya pengembangan sektor usaha berbasis potensi unggulan daerah yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi inklusif dan berdaya saing dalam upaya memberantas kemiskinan, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo menempuh sejumlah strategi yang terintegrasi dan berkesinambungan. Strategi ini bertumpu pada pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, penguatan struktur perdagangan lokal, serta pengembangan industri pengolahan yang memanfaatkan potensi unggulan daerah.

Pertama, pada sektor koperasi dan usaha mikro, strategi diarahkan pada peningkatan akses permodalan, pelatihan manajemen usaha, digitalisasi pemasaran, serta fasilitasi kemitraan dengan sektor swasta maupun lembaga keuangan. Upaya ini tidak hanya mendorong peningkatan omzet koperasi dan usaha mikro, tetapi juga membuka peluang usaha baru dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan demikian, pelaku usaha mikro dapat naik kelas dan menjadi bagian dari rantai nilai ekonomi yang lebih luas.

Kedua, pada sektor perdagangan, strategi yang ditempuh adalah memperkuat jaringan distribusi produk lokal melalui pembangunan dan revitalisasi pasar rakyat, pengembangan pusat promosi produk unggulan daerah, serta mendorong penetrasi pasar digital. Langkah ini dipadukan dengan peningkatan kualitas infrastruktur perdagangan dan logistik agar produk daerah lebih mudah diakses konsumen dan memiliki daya saing harga yang kompetitif. Peningkatan kontribusi PDRB dari sektor perdagangan diharapkan memberikan dampak langsung pada peningkatan pendapatan masyarakat dan stabilitas ekonomi lokal.

Ketiga, pada sektor industri, strategi difokuskan pada pengembangan industri kecil dan menengah berbasis potensi unggulan seperti pertanian, perikanan, dan hasil alam lainnya. Dukungan yang diberikan meliputi fasilitasi



BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

perizinan, akses teknologi, sertifikasi mutu, serta penguatan kemitraan dengan industri besar agar produk lokal dapat masuk ke pasar regional maupun nasional. Dengan berkembangnya industri pengolahan, nilai tambah produk daerah meningkat, daya saing ekonomi menguat, serta tercipta kesempatan kerja baru yang dapat menyerap tenaga kerja kurang terampil.

Keseluruhan strategi ini diletakkan dalam kerangka ekonomi inklusif, yaitu memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh kelompok menengah ke atas, tetapi juga memberi dampak nyata bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan. Melalui pemberdayaan usaha mikro, penguatan koperasi, dan penciptaan lapangan kerja di sektor perdagangan dan industri, strategi ini secara langsung berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Probolinggo. Dengan kata lain, pengembangan sektor usaha berbasis potensi unggulan daerah tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan pertumbuhan tersebut berkeadilan, merata, dan berkelanjutan.

3.2.2 Penahapan Pembangunan

Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo tahun 2025–2029 dijabarkan melalui tahapan berikut :

Tabel 3.3 Penahapan Rencana strategis Perangkat Daerah

TAHUN	TAHAPAN PEMBANGUNAN
2026	Tahun 2026 - Konsolidasi dan Penguatan Dasar Pada tahun 2026, fokus diarahkan pada penguatan pondasi kelembagaan dan infrastruktur usaha. Program prioritas menitikberatkan pada intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah melalui peningkatan sarana distribusi perdagangan, sekaligus mendorong 2.000 UMKM naik kelas. Pemerintah daerah juga mulai memperluas pameran produk unggulan perempuan serta menguatkan penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri. Tahun ini menjadi tahap konsolidasi, di mana koperasi desa merah putih mulai dirintis sebagai basis ekonomi kerakyatan.



TAHUN	TAHAPAN PEMBANGUNAN
2027	Tahun 2027 - Ekspansi Pasar dan Pemberdayaan SDM Memasuki tahun 2027, arah kebijakan diperluas pada ekspansi pasar dan penguatan daya saing SDM. Program pengembangan ekspor mulai digerakkan lebih intensif, diikuti dengan pembentukan 10 rumah kreatif millennial sebagai pusat inovasi anak muda. Gerakan One Village One Product digencarkan untuk melahirkan produk khas tiap desa. Pada saat yang sama, pengusaha perempuan didorong melalui target 1.000 pelaku usaha perempuan. Tahun ini juga menjadi momentum awal program penilaian kesehatan koperasi agar kelembagaan semakin sehat dan transparan.
2028	Tahun 2028 - Penguatan Kemitraan dan Skala Usaha Pada tahun 2028, fokus diarahkan pada penguatan kemitraan usaha dan peningkatan skala produksi. Sebanyak 3.000 toko kelontong ditargetkan naik kelas melalui digitalisasi distribusi. Koperasi desa merah putih diperluas jangkauannya dan didukung dengan pendidikan serta pelatihan perkoperasian. Pada sektor industri, pembangunan perwilayahan industri mulai terealisasi, guna menciptakan pusat-pusat produksi baru yang mampu menyerap tenaga kerja. Tahun ini menandai fase pertumbuhan ekonomi daerah berbasis jejaring usaha.
2029	Tahun 2029 - Industrialisasi Berbasis Lokal Tahun 2029 difokuskan pada industrialiasi berbasis potensi lokal. Program perencanaan dan pembangunan industri diarahkan untuk memaksimalkan perwilayahan industri yang sudah dibangun. UMKM, koperasi, serta pelaku industri kecil menengah difasilitasi untuk masuk rantai pasok industri daerah. Selain itu, dilakukan pengawasan dan pemeriksaan koperasi secara lebih sistematis agar kinerja koperasi semakin profesional. Tahun ini juga merupakan puncak akselerasi kemitraan UMKM dan koperasi dengan pasar ekspor.
2030	Tahun 2030 - Konsolidasi dan Keberlanjutan Pada akhir periode, tahun 2030 menjadi fase konsolidasi hasil dan keberlanjutan program. Seluruh program prioritas yang telah berjalan diarahkan pada integrasi ekonomi daerah berbasis koperasi, UMKM, perdagangan, dan industri. Perwilayahan industri difungsikan secara penuh, koperasi desa merah putih beroperasi secara mandiri, dan UMKM naik kelas menjadi kekuatan ekonomi daerah. Program pengendalian izin usaha industri diperkuat untuk menjaga iklim usaha yang sehat, sementara monitoring terhadap pemasaran produk lokal dan ekspor dilakukan untuk memastikan keberlanjutan.



BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

Dengan penahapan 2026–2030 tersebut, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo diharapkan mampu mendorong kemandirian ekonomi, memperluas akses pasar, dan meningkatkan daya saing produk lokal, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terus ditingkatkan.

3.2.3 Lokus Rencana Strategis

Rencana strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo diarahkan pada sektor-sektor unggulan dan wilayah yang memiliki kontribusi signifikan terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Pada bidang koperasi, penguatan diarahkan pada kecamatan yang menjadi basis produksi utama. Misalnya, di Kecamatan Dringu, Gending, dan Banyuwanyar yang memiliki basis pertanian padi dan hortikultura, koperasi tani diperkuat sebagai wadah distribusi hasil panen dan sarana akses permodalan petani. Di Kecamatan Paiton dan Tongas, koperasi perikanan difokuskan untuk memperkuat rantai nilai hasil laut, mengingat kawasan pesisir ini memiliki produksi perikanan tangkap dan budidaya yang besar. Hal ini dilakukan agar koperasi dapat menjadi motor penggerak distribusi hasil produksi masyarakat sekaligus meningkatkan daya tawar pelaku usaha kecil.

Pada bidang usaha mikro, pengembangan diprioritaskan di wilayah dengan kantong kemiskinan tinggi dan potensi usaha rumah tangga. Kecamatan Sumberasih, Krucil, dan Tiris diarahkan sebagai lokus pemberdayaan UMKM berbasis produk pangan olahan, kerajinan bambu, serta usaha kecil kreatif lainnya. Di Kecamatan Kraksaan dan Pajarakan, usaha mikro diarahkan pada penguatan sektor perdagangan jasa dan produk batik khas Probolinggo yang telah dikenal luas. Dengan strategi ini, usaha mikro tidak hanya mampu meningkatkan omzet, tetapi juga membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat miskin dan rentan. Tujuannya adalah menjadikan usaha mikro sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat sehingga dapat naik kelas dan lebih berdaya saing.

Pada bidang perdagangan, lokus utama adalah revitalisasi pasar rakyat dan penguatan infrastruktur distribusi, terutama pasar-pasar tradisional di



BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

kecamatan yang menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat. Revitalisasi dilakukan tidak hanya pada aspek fisik, tetapi juga pada manajemen pengelolaan pasar agar lebih modern, bersih, dan ramah konsumen. Selain itu, pengembangan jaringan distribusi barang juga dipusatkan di wilayah yang memiliki akses strategis ke jalur perdagangan regional, sehingga produk unggulan Kabupaten Probolinggo dapat menembus pasar yang lebih luas. Pasar Kota Kraksaan sebagai pusat perdagangan terbesar kabupaten dijadikan prioritas modernisasi dan digitalisasi pengelolaan. Selain itu, pasar tradisional di Paiton, Leces, dan Maron direvitalisasi agar lebih representatif, bersih, dan kompetitif. Di Kecamatan Besuk dan Gading, penguatan distribusi perdagangan difokuskan pada komoditas hasil pertanian yang menjadi tumpuan ekonomi lokal. Dengan peningkatan sarana prasarana perdagangan, produk unggulan Probolinggo dapat lebih mudah masuk ke pasar regional maupun nasional.

Pada bidang perindustrian, pengembangan sentra industri kecil menengah (IKM) difokuskan di wilayah dengan ketersediaan bahan baku dan tradisi industri rakyat. Sentra batik khas Probolinggo dikembangkan di Kecamatan Pajarakan dengan dukungan sertifikasi mutu dan promosi. Sentra olahan hasil perikanan seperti ikan asap, ikan kering, dan olahan rajungan dipusatkan di Kecamatan Paiton dan Sumberasih. Sementara itu, Kecamatan Leces dan Wonomerto dijadikan lokus pengembangan industri pangan olahan berbasis hasil pertanian, seperti keripik singkong, olahan jagung, dan minuman herbal. Di Kecamatan Tiris dan Krucil, industri kerajinan tangan dan produk berbasis bambu dan kayu diarahkan menjadi komoditas unggulan dengan dukungan teknologi sederhana dan promosi pasar. Sentra industri tersebut dikembangkan di wilayah yang sudah memiliki tradisi usaha maupun ketersediaan bahan baku, sehingga lebih mudah untuk ditingkatkan kapasitas dan nilai tambahnya.

Dengan penetapan lokus strategis yang berbasis potensi unggulan tiap wilayah, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo berupaya menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata. Pendekatan ini memungkinkan terciptanya pusat-pusat pertumbuhan baru di berbagai kecamatan, bukan hanya di perkotaan, tetapi juga menjangkau wilayah perdesaan dan kantong kemiskinan. Hasilnya diharapkan



BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

tidak hanya meningkatkan daya saing ekonomi daerah, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pendapatan masyarakat kecil, perluasan kesempatan kerja, serta pengentasan kemiskinan di Kabupaten Probolinggo secara berkelanjutan.

3.2.4 Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian diperlukan perumusan strategis dan kebijakan secara komprehensif. Strategi dan kebijakan dalam rencana strategis merupakan strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang dijabarkan melalui Bab 2 bagian 2.1 Penyusunan strategi dan arah kebijakan tersebut didasarkan dengan kondisi dan permasalahan yang sedang terjadi dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah serta rencana aksi dalam penyelesaian masalah.

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan yang tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.4 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

No.	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA DKUPP	KETERANGAN
1.	Meningkatnya Pengembangan Sektor Usaha Berbasis Potensi Unggulan Daerah” bermakna : Upaya pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan usaha (koperasi, UMKM, maupun industri kecil) yang memanfaatkan potensi khas dan unggulan daerah (contoh : hasil pertanian, perikanan, kerajinan, pariwisata, atau ekonomi kreatif).	Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	• Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi agar sehat, mandiri, dan berdaya saing • Pengembangan kapasitas usaha mikro melalui pelatihan, pendampingan, serta fasilitasi akses permodalan • Mendorong transformasi digital dalam kegiatan koperasi dan UMKM • Penguatan jejaring kemitraan antara UMKM dengan usaha besar, perbankan, serta pasar modern	



No.	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA DKUPP	KETERANGAN
		Pengembangan Perdagangan	• Pengendalian harga dan stabilisasi stok barang kebutuhan pokok • Peningkatan infrastruktur pasar rakyat agar lebih modern, bersih, dan layak • Fasilitasi promosi dagang baik di dalam daerah, luar daerah, maupun internasional • Pemanfaatan teknologi digital untuk pemasaran produk lokal (e-commerce dan marketplace)	
		Penguatan Sektor Perindustrian	• Peningkatan kapasitas produksi industri kecil dan menengah (IKM) • Pengembangan sentra industri berbasis potensi local • Fasilitasi standarisasi produk dan sertifikasi mutu untuk memperluas pasar • Dukungan teknologi tepat guna dan inovasi bagi industri kecil dan menengah	



BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

BAB IV

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN SERTA PENDANAAN

4.1 Rencana Program Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Probolinggo

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan tindakan operasional yang kemudian terkandung di dalam program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo. Program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian tentu relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (*outcome*) sebuah program dan hasil (*output*) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, beserta pendanaan indikatif yang menjadi pedoman bagi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo.



TABEL 4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PROBOLINGGO

BIDANG URUSAN/PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					18.046.354.063,93		18.270.800.000		18.566.100.000		18.966.700.000		19.431.900.000	
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					17.619.504.063,93		17.815.300.000		18.080.800.000		18.449.700.000		18.882.300.000	
Meningkatnya Nilai LHE AKIP PD	Nilai LHE AKIP PD (Nilai)	75	76	77	17.619.504.063,93	78	17.815.300.000	79	18.080.800.000	80	18.449.700.000	81	18.882.300.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.02 - PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM					125.000.000		150.000.000		175.000.000		200.000.000		225.000.000	
Meningkatnya legalitas kelembagaan koperasi	Persentase koperasi yang telah memiliki ijin USP (%)	94	94	94	125.000.000	94	150.000.000	94	175.000.000	94	200.000.000	94	225.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					23.900.000		24.200.000		24.600.000		25.200.000		25.800.000	
Meningkatnya kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang- undangan	Persentase Koperasi yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan (%)	82	82	82	23.900.000	82	24.200.000	82	24.600.000	82	25.200.000	82	25.800.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					11.200.000		11.400.000		11.600.000		11.900.000		12.200.000	
Meningkatnya kualitas kelembagaan dan kinerja usaha Koperasi	Persentase koperasi yang meningkat status kesehatannya (%)	0,85	1	1,1	11.200.000	1,2	11.400.000	1,3	11.600.000	1,4	11.900.000	1,5	12.200.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					55.560.000		56.200.000		57.100.000		58.300.000		59.700.000	



BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

BIDANG URUSAN/ PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia koperasi	Persentase Peningkatan Kompetensi Pengurus/ Pengelola Koperasi	75	75	75	55.560.000	75	56.200.000	75	57.100.000	75	58.300.000	75	59.700.000	Dinas/ Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					31.540.000		31.900.000		32.400.000		33.100.000		33.900.000	
Meningkatnya kemandirian dan daya saing koperasi	Persentase koperasi yang meningkat volume usahanya (%)	25	25	25	31.540.000	25	31.900.000	25	32.400.000	25	33.100.000	25	33.900.000	Dinas/ Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					174.000.000		176.000.000		178.700.000		182.400.000		186.700.000	
Meningkatnya kinerja dan daya saing usaha mikro	Persentase UM yang meningkat omzetnya (%)	5	5	5	174.000.000	5	176.000.000	5	178.700.000	5	182.400.000	5	186.700.000	Dinas/ Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					5.650.000		5.800.000		5.900.000		6.100.000		6.300.000	
Meningkatnya kapasitas dan keberlanjutan usaha mikro	Persentase usaha mikro yang meningkat Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil (%)	0,10	0,10	0,10	5.650.000	0,10	5.800.000	0,10	5.900.000	0,10	6.100.000	0,10	6.300.000	Dinas/ Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					1.838.300.000		1.859.000.000		1.887.000.000		1.925.800.000		1.971.200.000	
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					20.000.000		20.300.000		20.700.000		21.200.000		21.700.000	
Meningkatnya Kepatuhan Perusahaan dalam Perizinan dan Pendaftaran	Persentase usaha perdagangan yang memiliki izin usaha (%)	20	20	20	20.000.000	20	20.300.000	20	20.700.000	20	21.200.000	20	21.700.000	Dinas/ Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					490.000.000		495.500.000		502.900.000		513.200.000		525.300.000	
Meningkatnya ketersediaan sarana distribusi perdagangan yang memadai dan merata	Persentase sarana distribusi perdagangan yang berstandar SNI (%)	6	9	11	490.000.000	14	495.500.000	17	502.900.000	20	513.200.000	23	525.300.000	Dinas/ Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					1.025.000.000		1.036.400.000		1.051.900.000		1.073.400.000		1.098.600.000	
Meningkatnya keterjangkauan harga barang kebutuhan pokok dan barang	Persentase barang kebutuhan	61	61	61		61		61		61		61		Dinas/ Badan yang



BIDANG URUSAN/PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
penting bagi masyarakat.	pokok dan barang penting yang harganya stabil (%)				1.025.000.000		1.036.400.000		1.051.900.000		1.073.400.000		1.098.600.000	menangani Bidang Perdagangan
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					50.450.000		51.100.000		51.900.000		53.000.000		54.300.000	
Meningkatnya daya saing produk ekspor unggulan daerah	Persentase produk ekspor unggulan daerah yang berhasil dipasarkan di luar Daerah (%)	83	86	88	50.450.000	89	51.100.000	90	51.900.000	91	53.000.000	92	54.300.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					2.850.000		2.900.000		3.000.000		3.100.000		3.200.000	
Meningkatnya kepastian hukum dan perlindungan hak-hak konsumen.	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTIP) yang bertanda tera sah yang berlaku (%)	95	95	95	2.850.000	95	2.900.000	95	3.000.000	95	3.100.000	95	3.200.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					250.000.000		252.800.000		256.600.000		261.900.000		268.100.000	
Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri oleh masyarakat, pelaku usaha, dan instansi pemerintah.	Persentase produk unggulan daerah yang digunakan dan dipasarkan di dalam negeri	83	86	88	250.000.000	89	252.800.000	90	256.600.000	91	261.900.000	92	268.100.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					9.106.959.800		9.303.700.000		9.534.900.000		9.817.200.000		10.131.000.000	
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					8.706.959.800		8.803.700.000		8.934.900.000		9.117.200.000		9.331.000.000	
Meningkatkan pembangunan industri yang sesuai dengan peraturan yang berlaku	Prosentase Draft Kebijakan Pembangunan Industri yang telah disahkan sebagai kebijakan (%)	50	50	50	8.706.959.800	50	8.803.700.000	50	8.934.900.000	50	9.117.200.000	50	9.331.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					200.000.000		250.000.000		300.000.000		350.000.000		400.000.000	
Meningkatkan daya tawar produk dari usaha industri	Persentase Izin Usaha Industri yang telah diterbitkan (%)	20	30	40	200.000.000	50	250.000.000	60	300.000.000	70	350.000.000	80	400.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					200.000.000		250.000.000		300.000.000		350.000.000		400.000.000	
Meningkatnya Integrasi Data Industri	Persentase perusahaan industri yang telah memenuhi kewajiban penyampaian informasi di SIINas (%)	25	25	25	200.000.000	25	250.000.000	25	300.000.000	25	350.000.000	25	400.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian



BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

BIDANG URUSAN/PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
TOTAL KESELURUHAN					28.991.613.863.93		29.433.500.000.00		29.988.000.000.00		30.709.700.000.00		31.534.100.000.00	



BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

4.1.1 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN RANCANGAN AKHIR RENSTRA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PROBOLINGGO

Dalam merumuskan program, kegiatan, dan subkegiatan Rancangan Akhir Renstra 2025-2029, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan, dan Perindustrian Pemerintah Kabupaten Probolinggo menggunakan teknik yang sistematis dan berbasis pada analisis kebutuhan masyarakat dan stakeholder terkait. Dengan menggunakan teknik tersebut, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian dapat merumuskan program dan kegiatan yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Teknik merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam Rancangan Akhir Renstra 2025-2029 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo merupakan langkah strategis dalam memastikan bahwa arah pembangunan daerah dapat berjalan secara terukur, efektif, dan selaras dengan visi serta misi Pemerintah Kabupaten Probolinggo.



TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN RANCANGAN AKHIR RENSTRA

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

KABUPATEN PROBOLINGGO

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
2.17.3.30.3.31.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan Dan Perindustrian							
- Meningkatnya Pengembangan Sektor Usaha Berbasis Potensi Unggulan Daerah	Meningkatnya Pengembangan Sektor Usaha Berbasis Potensi Unggulan Daerah	Meningkatnya omzet koperasi			Persentase Pertumbuhan omzet koperasi		
			Meningkatnya legalitas kelembagaan koperasi		Persentase koperasi yang telah memiliki ijin USP	2.17.02 - PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	
			Meningkatnya Koperasi yang telah memiliki Ijin Simpan Pinjam		Persentase Koperasi yang dikeluarkan persetujuan ijin usaha	2.17.02.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	
				Terfasilitasinya Pemenuhan Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	2.17.02.2.01.0001 - Fasilitas Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	
			Meningkatnya kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan		Persentase Koperasi yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan	2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	



RENSTRA DKUPP KABUPATEN
PROBOLINGGO TAHUN 2024-2026

BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan		Persentase Koperasi yang diawasi dan diperiksa	2.17.03.2.01 - Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	
				Pelaksanaan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	2.17.03.2.01.0003 - Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	
				Pelaksanaan proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	2.17.03.2.01.0004 - Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	
			Meningkatnya kualitas kelembagaan dan kinerja usaha Koperasi		Persentase koperasi yang meningkat status kesehatannya (%)	2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	
			Meningkatnya kualitas kelembagaan dan kinerja usaha Koperasi		Persentase koperasi yang telah dinilai status kesehatannya	2.17.04.2.01 - Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Penilaian Kesehatan Koperasi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	2.17.04.2.01.0003 - Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	



RENSTRA DKUPP KABUPATEN
PROBOLINGGO TAHUN 2024-2026

BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia koperasi		Persentase Peningkatan Kompetensi Pengurus/Pengelola Koperasi	2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	
			Meningkatnya kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia koperasi		Persentase koperasi yang SDM-nya difasilitasi pendidikan dan pelatihan	2.17.05.2.01 - Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	2.17.05.2.01.0001 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	
			Meningkatnya kemandirian dan daya saing koperasi		Persentase koperasi yang meningkat volume usahanya	2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	
			Meningkatnya kemandirian dan daya saing koperasi		Jumlah Koperasi yang diberdayakan dan dilindungi	2.17.06.2.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Fasilitasi kemitraan antar koperasi maupun antara Koperasi dengan badan hukum lainnya termasuk UMKM, bagi Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	2.17.06.2.01.0004 - Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	
				Peningkatan iklim usaha Koperasi melalui aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan, dan inovasi teknologi bagi Koperasi	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	2.17.06.2.01.0009 - Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	



RENSTRA DKUPP KABUPATEN
PROBOLINGGO TAHUN 2024-2026

BAPELITBANGDA

OPD PENGUSUL

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota			
		Meningkatnya omzet Usaha Mikro			Persentase pertumbuhan omzet Usaha Mikro (%)		
		Meningkatnya kinerja dan daya saing usaha mikro			Persentase UM yang meningkat omzetnya (%)	2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	
		Meningkatnya omzet usaha mikro yang telah dilakukan pembinaan			Jumlah Usaha Mikro yang telah diberdayakan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
				Terfasilitasinya Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	2.17.07.2.01.0002 - Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	
				Terfasilitasinya Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	2.17.07.2.01.0003 - Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	
				Terfasilitasinya Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	2.17.07.2.01.0004 - Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	



RENSTRA DKUPP KABUPATEN
PROBOLINGGO TAHUN 2024-2026

BAPELITBANGDA

OPD PENGUSUL

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	2.17.07.2.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	
				Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	2.17.07.2.01.0015 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	
			Meningkatnya kapasitas dan keberlanjutan usaha mikro		Persentase usaha mikro yang meningkat Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	
			Peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil yang dapat berpengaruh pada kualitas produk dan omzet yang dihasilkan		Jumlah UM yang meningkat skala usaha menjadi usaha kecil	2.17.08.2.01 - Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	
				Terfasilitasinya Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	2.17.08.2.01.0006 - Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	
		LHE AKIP PD			Prosentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah (%)		
			Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional		Nilai LHE AKIP PD (Nilai)	2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Program PD dapat terlaksana secara maksimal		Jumlah dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun dan	2.17.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	



RENSTRA DKUPP KABUPATEN
PROBOLINGGO TAHUN 2024-2026

BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					dilaporkan tepat waktu		
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.17.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.17.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
			Akuntabilitas keuangan PD yang baik		Jumlah dokumen administrasi keuangan PD yang dilaporkan tepat waktu	2.17.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.17.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.17.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
			Pencatatan barang milik perangkat daerah dapat disajikan secara real		Jumlah dokumen administrasi Pengelolaan BMD pada PD yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	2.17.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.17.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	



BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Akuntabilitas keuangan PD yang baik		Jumlah dokumen administrasi pendapatan daerah yang dilaporkan tepat waktu	2.17.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	2.17.01.2.04.0007 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	
			Pengadministrasian yang baik akan memudahkan PD dalam menjalankan roda organisasi		Prosentase pemenuhan administrasi umum PD	2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2.17.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			Pencatatan barang milik daerah dapat disajikan secara real		Prosentase pemenuhan BMD yang sesuai dengan RKBMD	2.17.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2.17.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.17.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Urusan pemerintah daerah dapat berjalan dengan baik		Jumlah pemenuhan laporan penyediaan jasa penunjang PD	2.17.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.17.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2.17.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	



RENSTRA DKUPP KABUPATEN
PROBOLINGGO TAHUN 2024-2026

BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				KantorPerlengkapan Kantor yang Disediakan	(Laporan)		
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2.17.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Barang milik daerah dapat terawat dan memiliki umur ekonomis yang lebih panjang		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	2.17.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2.17.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2.17.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.17.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
		Meningkatnya PDRB Sub Sektor Perdagangan			Kontribusi PDRB sub sektor perdagangan (%)		
			Meningkatnya Kepatuhan Perusahaan dalam Perizinan dan Pendaftaran		Persentase usaha perdagangan yang memiliki izin usaha	3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	
			Banyaknya Gudang yang berijin dan optimalisasi pengawasan terhadap barang yang disimpan didalamnya		Jumlah Tanda Daftar Gudang yang direkomendasikan	3.30.02.2.02 - Penerbitan Tanda Daftar Gudang	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Tersedianya Dokumen Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	3.30.02.2.02.0001 - Fasilitas Penerbitan Tanda Daftar Gudang	
			Banyaknya Penjual dan Penyimpan Bahan Berbahaya		Jumlah tempat penjualan dan penyimpanan Bahan Berbahaya	3.30.02.2.06 - Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	
				Tersedianya Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	3.30.02.2.06.0003 - Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	
				Terverifikasinya seluruh pengajuan dokumen Surat Keterangan Asal (SKA)	Jumlah Surat Keterangan Asal yang diterbitkan	3.30.02.2.07 - Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	
				Surat Keterangan Asal (SKA) yang telah disetujui	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	3.30.02.2.07.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	
			Meningkatnya ketersediaan sarana distribusi perdagangan yang memadai dan merata		Persentase sarana distribusi perdagangan yang berstandar SNI (%)	3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	
			Peningkatan pelayanan sarana distribusi perdagangan kepada pedagang dan masyarakat		Jumlah sarana distribusi perdagangan yang direvitalisasi	3.30.03.2.01 - Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Tersedianya Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	3.30.03.2.01.0002 - Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	
			Peningkatan kualitas SDM pengelola sarana distribusi perdagangan		Jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan yang difasilitasi pembinaan dan pemberdayaan	3.30.03.2.02 - Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	
				Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	3.30.03.2.02.0001 - Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	
			Meningkatnya keterjangkauan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting bagi masyarakat.		Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang harganya stabil (%)	3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	
			Terkendalinya Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting baik harga maupun ketersediaannya agar dapat menentukan kebijakan yang diambil apabila Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting tidak terkendali		Jumlah Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang dikendalikan	3.30.04.2.02 - Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	3.30.04.2.02.0002 - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	



BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Tersedianya Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	3.30.04.2.02.0003 - Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	
			Penyaluran Pupuk dan Pesticida Bersubsidi sesuai RDKK dan E-Alokasi yang ditetapkan oleh dinas Pertanian		Jumlah Pengawasan Pupuk dan Pesticida Bersubsidi yang dilaksanakan	3.30.04.2.03 - Pengawasan Pupuk dan Pesticida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pesticida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pesticida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	3.30.04.2.03.0003 - Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pesticida Bersubsidi	
			Meningkatnya daya saing produk ekspor unggulan daerah		Persentase produk ekspor unggulan daerah yang berhasil dipasarkan di luar Daerah (%)	3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	
			Peningkatan pengembangan pasar produk unggulan daerah		Jumlah produk Ekspor unggulan daerah yang difasilitasi promosi	3.30.05.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang (Pelaku Usaha)	3.30.05.2.01.0002 - Pameran Dagang Nasional	
				Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pelaksanaan Misi Dagang	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan (Pelaku Usaha)	3.30.05.2.01.0004 - Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya kepastian hukum dan perlindungan hak-hak konsumen.		Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah yang berlaku	3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	
			Meningkatnya jumlah UTTP yang bertanda tera sah berlaku		Persentase UTTP yang ditera dan tera ulang	3.30.06.2.01 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	
				Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Terhadap Ketentuan yang Berlaku	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	3.30.06.2.01.0001 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	
				Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina (Orang)	3.30.06.2.01.0002 - Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	
			Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri oleh masyarakat, pelaku usaha, dan instansi pemerintah.		Persentase produk unggulan daerah yang digunakan dan dipasarkan di dalam negeri (%)	3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	
			Peningkatan daya saing produk lokal		Jumlah produk unggulan daerah yang difasilitasi promosi	3.30.07.2.01 - Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	
				Meningkatnya Akses Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	3.30.07.2.01.0006 - Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	



BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
		Meningkatnya PDRB Sub Sektor Industri			Kontribusi PDRB sub sektor industri (%)		
			Meningkatkan pembangunan industri yang sesuai dengan peraturan yang berlaku		Prosentase Draft Kebijakan Pembangunan Industri yang telah disahkan sebagai kebijakan (%)	3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	
			Meningkatkan pembangunan industri yang sesuai dengan peraturan yang berlaku		% Draft Kebijakan Pembangunan Industri yang dihasilkan	3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	
				Tersusunnya Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	3.31.02.2.01.0001 - Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	
				Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri (Dokumen)	3.31.02.2.01.0002 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	
				Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)	3.31.02.2.01.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	
				Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dokumen)	3.31.02.2.01.0004 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	
				Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta	3.31.02.2.01.0005 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	



RENSTRA DKUPP KABUPATEN
PROBOLINGGO TAHUN 2024-2026

BAPELITBANGDA

OPD PENGUSUL

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Masyarakat (Dokumen)		
				Dievaluasinya Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	3.31.02.2.01.0006 - Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	
				Terlaksananya pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan	3.31.02.2.01.0008 - Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	
			Meningkatkan daya tawar produk dari usaha industri		Persentase Izin Usaha Industri yang telah diterbitkan	3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	
			Meningkatkan daya tawar produk dari usaha industri		Jumlah Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota yang direkomendasikan penerbitan ijinnya	3.31.03.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi	3.31.03.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	



RENSTRA DKUPP KABUPATEN
PROBOLINGGO TAHUN 2024-2026

BAPELITBANGDA

OPD PENGUSUL

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	kewenangan pemerintah pusat		
				Terfasilitasinya verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	3.31.03.2.01.0004 - Fasilitas verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	
			Meningkatnya Integrasi Data Industri		Persentase perusahaan industri yang telah memenuhi kewajiban penyampaian informasi di SIINas	3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	
			Mengetahui perkembangan industri yang tujuannya untuk mempermudah pembinaannya		Jumlah Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota yang terdaftar di SIINAS	3.31.04.2.01 - Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terfasilitasinya Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis	3.31.04.2.01.0001 - Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data	



RENSTRA DKUPP KABUPATEN
PROBOLINGGO TAHUN 2024-2026

BAPELITBANGDA

OPD PENGUSUL

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	
				Terdiseminasi dan Terpublikasikannya Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINAS	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	3.31.04.2.01.0002 - Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	
				Terpantau dan Dievaluasinya Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	3.31.04.2.01.0003 - Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	



RENSTRA DKUPP KABUPATEN
PROBOLINGGO TAHUN 2024-2026

BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

4.2 RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

Rencana program, kegiatan, subkegiatan, dan pendanaan Renstra 2025–2029 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo disusun sebagai pedoman strategis dalam mengarahkan pembangunan sektor koperasi, usaha mikro, perdagangan, dan perindustrian di daerah. Perencanaan ini tidak hanya menekankan pada kesinambungan kebijakan, tetapi juga memastikan adanya keterpaduan antara sasaran pembangunan daerah dengan prioritas nasional serta kebutuhan nyata masyarakat.

Setiap program dan kegiatan yang dirumuskan telah mempertimbangkan analisis kondisi eksisting, potensi, tantangan, serta isu-isu strategis yang berkembang, sehingga rencana pendanaan yang dialokasikan menjadi lebih tepat sasaran, terukur, dan mampu mendukung pencapaian target kinerja. Pendekatan ini juga menekankan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran, sehingga setiap rupiah yang dialokasikan dapat memberikan manfaat optimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan adanya rencana program/kegiatan/subkegiatan dan pendanaan ini, diharapkan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan, dan Perindustrian mampu memperkuat peranannya dalam pemberdayaan koperasi dan UMKM, meningkatkan daya saing industri lokal, memperluas jaringan perdagangan, serta menciptakan iklim usaha yang kondusif dan berkelanjutan.



BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

**TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PROBOLINGGO**

BIDANG URUSAN/PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				18.046.354.063,93		18.270.800.000		18.566.100.000		18.966.700.000		19.431.900.000		
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				17.619.504.063,93		17.815.300.000		18.080.800.000		18.449.700.000		18.882.300.000		
Meningkatnya Nilai LHE AKIP PD	Nilai LHE AKIP PD (Nilai)	75	77	17.619.504.063,93	78	17.815.300.000	79	18.080.800.000	80	18.449.700.000	81	18.882.300.000	2.17.3.30.3.31.07.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan Dan Perindustrian	
2.17.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				176.195.040,64		178.153.000		180.808.000		184.497.000		188.823.000		
Jumlah dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	9	11	176.195.040,64	11	178.153.000	11	180.808.000	11	184.497.000	11	188.823.000		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	11	11				11		11		11			
2.17.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				105.717.024,38		106.891.800		108.484.800		110.698.200		113.293.800		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	9	11	105.717.024,38	11	106.891.800	11	108.484.800	11	110.698.200	11	113.293.800		
2.17.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				70.478.016,26		71.261.200		72.323.200		73.798.800		75.529.200		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11	11	70.478.016,26	11	71.261.200	11	72.323.200	11	73.798.800	11	75.529.200		



RENSTRA DKUPP KABUPATEN
PROBOLINGGO TAHUN 2025-2029

BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

BIDANG URUSAN/PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)													
2.17.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				12.333.652.844,74		12.470.710.000		12.656.560.000		12.914.790.000		13.217.610.000		
Jumlah dokumen administrasi keuangan PD yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	120	120	12.333.652.844,74	120	12.470.710.000	120	12.656.560.000	120	12.914.790.000	120	13.217.610.000		
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	19	19		19		19		19		19			
2.17.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				12.210.316.316,29		12.346.002.900		12.529.994.400		12.785.642.100		13.085.433.900		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	120	120	12.210.316.316,29	120	12.346.002.900	120	12.529.994.400	120	12.785.642.100	120	13.085.433.900		
2.17.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				123.336.528,45		124.707.100		126.565.600		129.147.900		132.176.100		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	19	19	123.336.528,45	19	124.707.100	19	126.565.600	19	129.147.900	19	132.176.100		
2.17.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				88.097.520,32		89.076.500		90.404.000		92.248.500		94.411.500		
Jumlah dokumen administrasi Pengelolaan BMD pada PD yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4	4	88.097.520,32	4	89.076.500	4	90.404.000	4	92.248.500	4	94.411.500		
2.17.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				88.097.520,32		89.076.500		90.404.000		92.248.500		94.411.500		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	4	88.097.520,32	4	89.076.500	4	90.404.000	4	92.248.500	4	94.411.500		



RENSTRA DKUPP KABUPATEN
PROBOLINGGO TAHUN 2025-2029

BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

BIDANG URUSAN/PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	(Laporan)													
2.17.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				88.097.520,32		89.076.500		90.404.000		92.248.500		94.411.500		
Jumlah dokumen administrasi pendapatan daerah yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	19	19	88.097.520,32	19	89.076.500	19	90.404.000	19	92.248.500	19	94.411.500		
2.17.01.2.04.0007 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah				88.097.520,32		89.076.500		90.404.000		92.248.500		94.411.500		
Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	19	19	88.097.520,32	19	89.076.500	19	90.404.000	19	92.248.500	19	94.411.500		
2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				528.585.121,92		534.459.000		542.424.000		553.491.000		566.469.000		
Prosentase pemenuhan administrasi umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	100	100	528.585.121,92	100	534.459.000	100	542.424.000	100	553.491.000	100	566.469.000		
2.17.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				528.585.121,92		534.459.000		542.424.000		553.491.000		566.469.000		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	100	100	528.585.121,92	100	534.459.000	100	542.424.000	100	553.491.000	100	566.469.000		
2.17.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				352.390.081,28		356.306.000		361.616.000		368.994.000		377.646.000		
Prosentase pemenuhan BMD yang sesuai dengan RKBMD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	40	40	352.390.081,28	40	356.306.000	40	361.616.000	40	368.994.000	40	377.646.000		
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1		1		1		1		1			



RENSTRA DKUPP KABUPATEN
PROBOLINGGO TAHUN 2025-2029

BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

BIDANG URUSAN/PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
2.17.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				176.195.040,64		178.153.000		180.808.000		184.497.000		188.823.000		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	40	40	176.195.040,64	40	178.153.000	40	180.808.000	40	184.497.000	40	188.823.000		
2.17.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				176.195.040,64		178.153.000		180.808.000		184.497.000		188.823.000		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	176.195.040,64	1	178.153.000	1	180.808.000	1	184.497.000	1	188.823.000		
2.17.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.523.900.812,79		3.563.060.000		3.616.160.000		3.689.940.000		3.776.460.000		
Jumlah pemenuhan laporan penyediaan jasa penunjang Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	3.523.900.812,79	12	3.563.060.000	12	3.616.160.000	12	3.689.940.000	12	3.776.460.000		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
2.17.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				352.390.081,28		356.306.000		361.616.000		368.994.000		377.646.000		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	352.390.081,28	12	356.306.000	12	361.616.000	12	368.994.000	12	377.646.000		
2.17.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				176.195.040,64		178.153.000		180.808.000		184.497.000		188.823.000		



RENSTRA DKUPP KABUPATEN
PROBOLINGGO TAHUN 2025-2029

BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

BIDANG URUSAN/PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	176.195.040,64	12	178.153.000	12	180.808.000	12	184.497.000	12	188.823.000		
2.17.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.995.315.690,87		3.028.601.000		3.073.736.000		3.136.449.000		3.209.991.000		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	2.995.315.690,87	12	3.028.601.000	12	3.073.736.000	12	3.136.449.000	12	3.209.991.000		
2.17.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				528.585.121,92		534.459.000		542.424.000		553.491.000		566.469.000		
Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	12	12	528.585.121,92	12	534.459.000	12	542.424.000	12	553.491.000	12	566.469.000		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi (Unit)	12	12		12		12		12		12			
2.17.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				211.434.048,77		213.783.600		216.969.600		221.396.400		226.587.600		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	12	12	211.434.048,77	12	213.783.600	12	216.969.600	12	221.396.400	12	226.587.600		



BIDANG URUSAN/ PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
2.17.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				158.575.536,58		160.337.700		162.727.200		166.047.300		169.940.700		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	12	12	158.575.536,58	12	160.337.700	12	162.727.200	12	166.047.300	12	169.940.700		
2.17.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				158.575.536,57		160.337.700		162.727.200		166.047.300		169.940.700		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	12	12	158.575.536,57	12	160.337.700	12	162.727.200	12	166.047.300	12	169.940.700		
2.17.02 - PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM				125.000.000		150.000.000		175.000.000		200.000.000		225.000.000	2.17.3.30.3.31.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan Dan Perindustrian	
Meningkatnya legalitas kelembagaan koperasi	Persentase koperasi yang telah memiliki ijin USP (%)	94	94	125.000.000	94	150.000.000	94	175.000.000	94	200.000.000	94	225.000.000		
2.17.02.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota				125.000.000		150.000.000		175.000.000		200.000.000		225.000.000		
Jumlah Koperasi yang dikeluarkan persetujuan ijin usaha Simpan Pinjam	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota (Unit Usaha)	30	30	125.000.000	30	150.000.000	30	175.000.000	30	200.000.000	30	225.000.000		
2.17.02.2.01.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota				125.000.000		150.000.000		175.000.000		200.000.000		225.000.000		



RENSTRA DKUPP KABUPATEN
PROBOLINGGO TAHUN 2025-2029

BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

BIDANG URUSAN/PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terfasilitasinya Pemenuhan Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha)	30	30	125.000.000	30	150.000.000	30	175.000.000	30	200.000.000	30	225.000.000		
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				23.900.000		24.200.000		24.600.000		25.200.000		25.800.000		
Meningkatnya kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan	Persentase Koperasi yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan (%)	82	82	23.900.000	82	24.200.000	82	24.600.000	82	25.200.000	82	25.800.000	2.17.3.30.3.31.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan Dan Perindustrian	
2.17.03.2.01 - Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota				23.900.000		24.200.000		24.600.000		25.200.000		25.800.000		
Persentase Koperasi yang diawasi dan diperiksa	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Unit Usaha)	30	20	23.900.000	20	24.200.000	20	24.600.000	20	25.200.000	20	25.800.000		
	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi (Unit Usaha)	40	20		20		20		20		20			
2.17.03.2.01.0003 - Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi				11.950.000		12.100.000		12.300.000		12.600.000		12.900.000		
Pelaksanaan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi (Unit Usaha)	40	20	11.950.000	20	12.100.000	20	12.300.000	20	12.600.000	20	12.900.000		
2.17.03.2.01.0004 - Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah														



RENSTRA DKUPP KABUPATEN
PROBOLINGGO TAHUN 2025-2029

BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Kabupaten/ Kota				11.950.000		12.100.000		12.300.000		12.600.000		12.900.000		
Pelaksanaan proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Unit Usaha)	30	20	11.950.000	20	12.100.000	20	12.300.000	20	12.600.000	20	12.900.000		
2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/ USP KOPERASI				11.200.000		11.400.000		11.600.000		11.900.000		12.200.000		
Meningkatnya kualitas kelembagaan dan kinerja usaha Koperasi	Persentase koperasi yang meningkat status kesehatannya (%)	0.85	1	11.200.000	1,1	11.400.000	1,2	11.600.000	1,3	11.900.000	1,4	12.200.000	2.17.3.30.3.31.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan Dan Perindustrian	
2.17.04.2.01 - Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota				11.200.000		11.400.000		11.600.000		11.900.000		12.200.000		
Persentase koperasi yang telah dinilai status kesehatannya	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha)	40	20	11.200.000	20	11.400.000	20	11.600.000	20	11.900.000	20	12.200.000		
2.17.04.2.01.0003 - Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan				11.200.000		11.400.000		11.600.000		11.900.000		12.200.000		
Terlaksananya Penilaian Kesehatan Koperasi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha)	40	20	11.200.000	20	11.400.000	20	11.600.000	20	11.900.000	20	12.200.000		
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				55.560.000		56.200.000		57.100.000		58.300.000		59.700.000		
Meningkatnya kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia kopera	Persentase Peningkatan Kompetensi Pengurus/ Pengelola Koperasi (%)	75	75	55.560.000	75	56.200.000	75	57.100.000	75	58.300.000	75	59.700.000	2.17.3.30.3.31.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan Dan Perindustrian	



RENSTRA DKUPP KABUPATEN
PROBOLINGGO TAHUN 2025-2029

BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

BIDANG URUSAN/ PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
2.17.05.2.01 - Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				55.560.000		56.200.000		57.100.000		58.300.000		59.700.000		
Persentase koperasi yang SDM-nya difasilitasi pendidikan dan pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang)	240	120	55.560.000	120	56.200.000	120	57.100.000	120	58.300.000	120	59.700.000		
2.17.05.2.01.0001 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi				55.560.000		56.200.000		57.100.000		58.300.000		59.700.000		
Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang)	240	120	55.560.000	120	56.200.000	120	57.100.000	120	58.300.000	120	59.700.000		
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI				31.540.000		31.900.000		32.400.000		33.100.000		33.900.000		
Meningkatnya kemandirian dan daya saing koperasi	Persentase koperasi yang meningkat volume usahanya (%)	25	25	31.540.000	25	31.900.000	25	32.400.000	25	33.100.000	25	33.900.000	2.17.3.30.3.31.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan Dan Perindustrian	
2.17.06.2.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota				31.540.000		31.900.000		32.400.000		33.100.000		33.900.000		
jumlah Koperasi yang diberdayakan dan dilindungi	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha)	35	20	31.540.000	20	31.900.000	20	32.400.000	20	33.100.000	20	33.900.000		
2.17.06.2.01.0009 - Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota				31.540.000		31.900.000		32.400.000		33.100.000		33.900.000		
Peningkatan iklim usaha Koperasi melalui aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan, dan inovasi teknologi bagi Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha)	35	20	31.540.000	20	31.900.000	20	32.400.000	20	33.100.000	20	33.900.000		



RENSTRA DKUPP KABUPATEN
PROBOLINGGO TAHUN 2025-2029

BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
2.17.06.2.01.0004 - Fasilitas Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota				150.000.000		150.500.000		151.000.000		151.500.000		152.000.000		
Fasilitas kemitraan antar koperasi maupun antara Koperasi dengan badan hukum lainnya termasuk UMKM, bagi Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten Kot a	Jumlah Koperasi yang telah Difasilitasi Kemitraannya	0	170	150.000.000	170	150.500.000	170	151.000.000	170	151.500.000	170	152.000.000		
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				174.000.000		176.000.000		178.700.000		182.400.000		186.700.000		
Meningkatnya kinerja dan daya saing usaha mikro	Peresentase UM yang meningkat omzetnya (%)	5	5	174.000.000	5	176.000.000	5	178.700.000	5	182.400.000	5	186.700.000	2.17.3.30.3.31.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan Dan Perindustrian	
2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan				174.000.000		176.000.000		178.700.000		182.400.000		186.700.000		
Peresentase Usaha Mikro yang meningkat omzetnya	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro (Unit Usaha)	105	60	174.000.000	65	176.000.000	70	178.700.000	75	182.400.000	80	186.700.000		
	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan (Orang)	400	250		260		270		280		290			
	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro (Orang)	100	75		85		95		105		115			
	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan	80	60		70		80		90		100			



RENSTRA DKUPP KABUPATEN
PROBOLINGGO TAHUN 2025-2029

BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

BIDANG URUSAN/ PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Terhadap Usaha Mikro (Unit Usaha)													
	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan (Unit Usaha)	7,8	300		375		450		525		600			
2.17.07.2.01.0002 - Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro				30.450.000		30.800.000		31.272.500		31.920.000		32.672.500		
Terfasilitasinya Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro (Unit Usaha)	105	60	30.450.000	65	30.800.000	70	31.272.500	75	31.920.000	80	32.672.500		
2.17.07.2.01.0003 - Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro				21.750.000		22.000.000		22.337.500		22.800.000		23.337.500		
Terfasilitasinya Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan (Unit Usaha)	7,8	300	21.750.000	375	22.000.000	450	22.337.500	525	22.800.000	600	23.337.500		
2.17.07.2.01.0004 - Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro				52.200.000		52.800.000		53.610.000		54.720.000		56.010.000		
Terfasilitasinya Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro (Unit Usaha)	80	60	52.200.000	70	52.800.000	80	53.610.000	90	54.720.000	100	56.010.000		
2.17.07.2.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro				17.400.000		17.600.000		17.870.000		18.240.000		18.670.000		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	100	75	17.400.000	85	17.600.000	95	17.870.000	105	18.240.000	115	18.670.000		



RENSTRA DKUPP KABUPATEN
PROBOLINGGO TAHUN 2025-2029

BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	(Orang)													
2.17.07.2.01.0015 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan				52.200.000		52.800.000		53.610.000		54.720.000		56.010.000		
Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan (Orang)	400	250	52.200.000	260	52.800.000	270	53.610.000	280	54.720.000	290	56.010.000		
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				5.650.000		5.800.000		5.900.000		6.100.000		6.300.000		
Meningkatnya kapasitas dan keberlanjutan usaha mikro	Persentase usaha mikro yang meningkatSkala Usaha Menjadi Usaha Kecil (%)	0,10	0,10	5.650.000	0,10	5.800.000	0,10	5.900.000	0,10	6.100.000	0,10	6.300.000	2.17.3.30.3.31.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan Dan Perindustrian	
2.17.08.2.01 - Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil				5.650.000		5.800.000		5.900.000		6.100.000		6.300.000		
Jumlah UM yang meningkat skala usaha menjadi usaha kecil	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi (Unit Usaha)	65	40	5.650.000	45	5.800.000	50	5.900.000	55	6.100.000	60	6.300.000		
2.17.08.2.01.0006 - Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi				5.650.000		5.800.000		5.900.000		6.100.000		6.300.000		
Terfasilitasinya Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan	65	40	5.650.000	45	5.800.000	50	5.900.000	55	6.100.000	60	6.300.000		



RENSTRA DKUPP KABUPATEN
PROBOLINGGO TAHUN 2025-2029

BAPELITBANGDA

OPD PENGUSUL

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi (Unit Usaha)													
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				1.838.300.000		1.859.000.000		1.887.000.000		1.925.800.000		1.971.200.000		
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN				20.000.000		20.300.000		20.700.000		21.200.000		21.700.000		
Meningkatnya Kepatuhan Perusahaan dalam Perizinan dan Pendaftaran	Persentase usaha perdagangan yang memiliki izin usaha (%)	20	20	20.000.000	20	20.300.000	20	20.700.000	20	21.200.000	20	21.700.000	2.17.3.30.3.31.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan Dan Perindustrian	
3.30.02.2.02 - Penerbitan Tanda Daftar Gudang				20.000.000		20.300.000		20.700.000		21.200.000		21.700.000		
Jumlah Tanda Daftar Gudang yang direkomendasikan	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang (Dokumen)	5	5	20.000.000	5	20.300.000	5	20.700.000	5	21.200.000	5	21.700.000		
3.30.02.2.02.0001 - Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang				20.000.000		20.300.000		20.700.000		21.200.000		21.700.000		
Tersedianya Dokumen Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang (Dokumen)	5	5	20.000.000	5	20.300.000	5	20.700.000	5	21.200.000	5	21.700.000		
3.30.02.2.06 - Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		
Meningkatnya Penjual dan Penyimpan Bahan Berbahaya yang berizin	Jumlah tempat penjualan dan penyimpanan Bahan Berbahaya	0	24	15.000.000	24	15.000.000	24	15.000.000	24	15.000.000	24	15.000.000		
3.30.02.2.06.0003 - PengawasanDistribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupunProdusen B2 (P-B2)				15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		



RENSTRA DKUPP KABUPATEN
PROBOLINGGO TAHUN 2025-2029

BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

BIDANG URUSAN/ PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Tersedianya Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan PelabelanBahanBerbahayaTerhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Banyaknya Penjual dan Penyimpan Bahan Berbahaya	0	24	15.000.000	24	15.000.000	24	15.000.000	24	15.000.000	24	15.000.000		
3.30.02.2.07 - Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/ Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Meningkatnya pengajuan dokumen Surat Keterangan Asal (SKA)	Jumlah Surat Keterangan Asal yang diterbitkan	0	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		
3.30.02.2.07.0001 – Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Tersedianya Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asa	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	0	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				490.000.000		495.500.000		502.900.000		513.200.000		525.300.000		
Meningkatnya ketersediaan sarana distribusi perdagangan yang memadai dan merata	Persentase sarana distribusi perdagangan yang berstandar SNI (%)	6	11	490.000.000	14	495.500.000	17	502.900.000	20	513.200.000	23	525.300.000	2.17.3.30.3.31.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan Dan Perindustrian	
3.30.03.2.01 - Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				367.500.000		371.625.000		377.175.000		384.900.000		393.975.000		
Jumlah sarana distribusi perdagangan yang direvitalisasi	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	5	3	367.500.000	3	371.625.000	3	377.175.000	3	384.900.000	3	393.975.000		
3.30.03.2.01.0002 - Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				367.500.000		371.625.000		377.175.000		384.900.000		393.975.000		



RENSTRA DKUPP KABUPATEN
PROBOLINGGO TAHUN 2025-2029

BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Tersedianya Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	5	3	367.500.000	3	371.625.000	3	377.175.000	3	384.900.000	3	393.975.000		
3.30.03.2.02 - Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya				122.500.000		123.875.000		125.725.000		128.300.000		131.325.000		
Jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan yang difasilitasi pembinaan dan pemberdayaan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)	35	20	122.500.000	20	123.875.000	20	125.725.000	20	128.300.000	20	131.325.000		
3.30.03.2.02.0001 - Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				122.500.000		123.875.000		125.725.000		128.300.000		131.325.000		
Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)	35	20	122.500.000	20	123.875.000	20	125.725.000	20	128.300.000	20	131.325.000		
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				1.025.000.000		1.036.400.000		1.051.900.000		1.073.400.000		1.098.600.000		
Meningkatnya keterjangkauan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting bagi masyarakat.	Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang harganya stabil (%)	61	61	1.025.000.000	61	1.036.400.000	61	1.051.900.000	61	1.073.400.000	61	1.098.600.000	2.17.3.30.3.31.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan Dan Perindustrian	
3.30.04.2.02 - Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota				820.000.000		829.120.000		841.520.000		858.720.000		878.880.000		



RENSTRA DKUPP KABUPATEN
PROBOLINGGO TAHUN 2025-2029

BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Jumlah Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang dikendalikan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan (Laporan)	365	365	820.000.000	365	829.120.000	365	841.520.000	365	858.720.000	365	878.880.000		
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	5	5		5		5		5		5			
3.30.04.2.02.0002 - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan				82.000.000		82.912.000		84.152.000		85.872.000		87.888.000		
Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan (Laporan)	365	365	82.000.000	365	82.912.000	365	84.152.000	365	85.872.000	365	87.888.000		
3.30.04.2.02.0003 - Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				738.000.000		746.208.000		757.368.000		772.848.000		790.992.000		
Tersedianya Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	5	5	738.000.000	5	746.208.000	5	757.368.000	5	772.848.000	5	790.992.000		
3.30.04.2.03 - Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				205.000.000		207.280.000		210.380.000		214.680.000		219.720.000		
Jumlah Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi yang dilaksanakan	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	72	72	205.000.000	72	207.280.000	72	210.380.000	72	214.680.000	72	219.720.000		



RENSTRA DKUPP KABUPATEN
PROBOLINGGO TAHUN 2025-2029

BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	dengan Realisasi Minimal 90% (Laporan)													
3.30.04.2.03.0003 - Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi				205.000.000		207.280.000		210.380.000		214.680.000		219.720.000		
Tersedianya Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% (Laporan)	72	72	205.000.000	72	207.280.000	72	210.380.000	72	214.680.000	72	219.720.000		
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR				50.450.000		51.100.000		51.900.000		53.000.000		54.300.000		
Meningkatnya daya saing produk ekspor unggulan daerah	Persentase produk ekspor unggulan daerah yang berhasil dipasarkan di luar Daerah (%)	83	88	50.450.000	89	51.100.000	90	51.900.000	91	53.000.000	92	54.300.000	2.17.3.30.3.31.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan Dan Perindustrian	
3.30.05.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				50.450.000		51.100.000		51.900.000		53.000.000		54.300.000		
Jumlah produk Ekspor unggulan daerah yang difasilitasi promosi	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang (Pelaku Usaha)	25	15	50.450.000	15	51.100.000	15	51.900.000	15	53.000.000	15	54.300.000		
	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan (Pelaku Usaha)	5	3		3		3		3		3			
3.30.05.2.01.0002 - Pameran Dagang Nasional				42.882.500		43.435.000		44.115.000		45.050.000		46.155.000		
Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran													



RENSTRA DKUPP KABUPATEN
PROBOLINGGO TAHUN 2025-2029

BAPELITBANGDA

OPD PENGUSUL

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Dagang Nasional	Dagang (Pelaku Usaha)	25	15	42.882.500	15	43.435.000	15	44.115.000	15	45.050.000	15	46.155.000		
3.30.05.2.01.0004 - Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan				7.567.500		7.665.000		7.785.000		7.950.000		8.145.000		
Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pelaksanaan Misi Dagang	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan (Pelaku Usaha)	5	3	7.567.500	3	7.665.000	3	7.785.000	3	7.950.000	3	8.145.000		
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				2.850.000		2.900.000		3.000.000		3.100.000		3.200.000		
Meningkatnya kepastian hukum dan perlindungan hak-hak konsumen.	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTIP) yang bertanda tera sah yang berlaku (%)	95	95	2.850.000	95	2.900.000	95	3.000.000	95	3.100.000	95	3.200.000	2.17.3.30.3.31.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan Dan Perindustrian	
3.30.06.2.01 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan				2.850.000		2.900.000		3.000.000		3.100.000		3.200.000		
Persentase UTIP yang ditera dan tera ulang	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina (Orang)	2.050	750	2.850.000	800	2.900.000	850	3.000.000	900	3.100.000	950	3.200.000		
	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Unit)	10.600	4.000		4.250		4.500		4.750		5.000			
3.30.06.2.01.0001 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang				2.622.000		2.668.000		2.760.000		2.852.000		2.944.000		
Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Terhadap Ketentuan yang Berlaku	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Unit)	10.600	4.000	2.622.000	4.250	2.668.000	4.500	2.760.000	4.750	2.852.000	5.000	2.944.000		



BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

BIDANG URUSAN/ PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
3.30.06.2.01.0002 - Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal				228.000		232.000		240.000		248.000		256.000		
Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina (Orang)	2.050	750	228.000	800	232.000	850	240.000	900	248.000	950	256.000		
3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI				250.000.000		252.800.000		256.600.000		261.900.000		268.100.000		
Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri oleh masyarakat, pelaku usaha, dan instansi pemerintah.	Persentase produk unggulan daerah yang digunakan dan dipasarkan di dalam negeri (%)	83	88	250.000.000	89	252.800.000	90	256.600.000	91	261.900.000	92	268.100.000	2.17.3.30.3.31.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan Dan Perindustrian	
3.30.07.2.01 - Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri				250.000.000		252.800.000		256.600.000		261.900.000		268.100.000		
Jumlah produk unggulan daerah yang difasilitasi promosi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi (UMKM)	30	35	250.000.000	35	252.800.000	35	256.600.000	35	261.900.000	35	268.100.000		
3.30.07.2.01.0006 - Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/ Kota				250.000.000		252.800.000		256.600.000		261.900.000		268.100.000		
Meningkatnya Akses Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi (UMKM)	30	35	250.000.000	35	252.800.000	35	256.600.000	35	261.900.000	35	268.100.000		



BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				9.106.959.800		9.303.700.000		9.534.900.000		9.817.200.000		10.131.000.000		
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				8.706.959.800		8.803.700.000		8.934.900.000		9.117.200.000		9.331.000.000		
Meningkatkan pembangunan industri yang sesuai dengan peraturan yang berlaku	Prosentase Draft Kebijakan Pembangunan Industri yang telah disahkan sebagai kebijakan (%)	50	50	8.706.959.800	50	8.803.700.000	50	8.934.900.000	50	9.117.200.000	50	9.331.000.000	2.17.3.30.3.31.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan Dan Perindustrian	
3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota				8.706.959.800		8.803.700.000		8.934.900.000		9.117.200.000		9.331.000.000		
% Draft Kebijakan Pembangunan Industri yang dihasilkan	- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan (Dokumen)	1	1	8.706.959.800	1	8.803.700.000	1	8.934.900.000	1	9.117.200.000	1	9.331.000.000		
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
3.31.02.2.01.0001 - Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota				130.604.397		132.055.500		134.023.500		136.758.000		139.965.000		
Tersusunnya Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	1	1	130.604.397	1	132.055.500	1	134.023.500	1	136.758.000	1	139.965.000		
3.31.02.2.01.0002 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri				3.918.131.910		3.961.665.000		4.020.705.000		4.102.740.000		4.198.950.000		
Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri (Dokumen)	1	1	3.918.131.910	1	3.961.665.000	1	4.020.705.000	1	4.102.740.000	1	4.198.950.000		
3.31.02.2.01.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				130.604.397		132.055.500		134.023.500		136.758.000		139.965.000		



BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)	1	1	130.604.397	1	132.055.500	1	134.023.500	1	136.758.000	1	139.965.000		
3.31.02.2.01.0004 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				522.417.588		528.222.000		536.094.000		547.032.000		559.860.000		
Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dokumen)	2	2	522.417.588	2	528.222.000	2	536.094.000	2	547.032.000	2	559.860.000		
3.31.02.2.01.0005 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				3.831.062.312		3.873.628.000		3.931.356.000		4.011.568.000		4.105.640.000		
Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	3	3	3.831.062.312	3	3.873.628.000	3	3.931.356.000	3	4.011.568.000	3	4.105.640.000		
3.31.02.2.01.0006 - Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri				87.069.598		88.037.000		89.349.000		91.172.000		93.310.000		
Dievaluasinya Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	1	1	87.069.598	1	88.037.000	1	89.349.000	1	91.172.000	1	93.310.000		
3.31.02.2.01.0008 - Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota				87.069.598		88.037.000		89.349.000		91.172.000		93.310.000		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terlaksananya pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan (Dokumen)	1	1	87.069.598	1	88.037.000	1	89.349.000	1	91.172.000	1	93.310.000		
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI				200.000.000		250.000.000		300.000.000		350.000.000		400.000.000		
Meningkatkan daya tawar produk dari usaha industri	Persentase Izin Usaha Industri yang telah diterbitkan (%)	20	40	200.000.000	50	250.000.000	60	300.000.000	70	350.000.000	80	400.000.000	2.17.3.30.3.31.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan Dan Perindustrian	
3.31.03.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota				200.000.000		250.000.000		300.000.000		350.000.000		400.000.000		
Jumlah Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota yang direkomendasikan penerbitan ijinnya	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	50	50	200.000.000	50	250.000.000	50	300.000.000	50	350.000.000	50	400.000.000		
	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan													



RENSTRA DKUPP KABUPATEN
PROBOLINGGO TAHUN 2025-2029

BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

BIDANG URUSAN/ PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	50	50		50		50		50		50			
3.31.03.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/ Kota				80.000.000		100.000.000		120.000.000		140.000.000		160.000.000		
Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	50	50	80.000.000	50	100.000.000	50	120.000.000	50	140.000.000	50	160.000.000		
3.31.03.2.01.0004 - Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online				120.000.000		150.000.000		180.000.000		210.000.000		240.000.000		



BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)														
Terfasilitasinya verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	50	50	120.000.000	50	150.000.000	50	180.000.000	50	210.000.000	50	240.000.000		
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL				200.000.000		250.000.000		300.000.000		350.000.000		400.000.000		
Meningkatnya Integrasi Data Industri	Persentase perusahaan industri yang telah memenuhi kewajiban penyampaian informasi di SIINas (%)	25	25	200.000.000	25	250.000.000	25	300.000.000	25	350.000.000	25	400.000.000	2.17.3.30.3.31.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan Dan Perindustrian	
3.31.04.2.01 - Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota				200.000.000		250.000.000		300.000.000		350.000.000		400.000.000		
Jumlah Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan	5	5		5		5		5		5			



RENSTRA DKUPP KABUPATEN
PROBOLINGGO TAHUN 2025-2029

BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Kabupaten/Kota yang terdaftar di SIINAS	Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas (Dokumen)			200.000.000		250.000.000		300.000.000		350.000.000		400.000.000		
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (Dokumen)	10	10		10		10		10		10			
	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas (Dokumen)	20	20		20		20		20		20			
3.31.04.2.01.0001 - Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				80.000.000		100.000.000		120.000.000		140.000.000		160.000.000		
Terfasilitasinya Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (Dokumen)	10	10	80.000.000	10	100.000.000	10	120.000.000	10	140.000.000	10	160.000.000		
3.31.04.2.01.0002 - Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas				60.000.000		75.000.000		90.000.000		105.000.000		120.000.000		



RENSTRA DKUPP KABUPATEN
PROBOLINGGO TAHUN 2025-2029

BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terdiseminasi dan Terpublikasikannya Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINAS	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINAS (Dokumen)	5	5	60.000.000	5	75.000.000	5	90.000.000	5	105.000.000	5	120.000.000		
3.31.04.2.01.0003 - Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas				60.000.000		75.000.000		90.000.000		105.000.000		120.000.000		
Terpantau dan Dievaluasinya Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas (Dokumen)	20	20	60.000.000	20	75.000.000	20	90.000.000	20	105.000.000	20	120.000.000		



RENSTRA DKUPP KABUPATEN
PROBOLINGGO TAHUN 2025-2029

BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

4.2.1 DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULA PERHITUNGAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN PERANGKAT DAERAH

Setiap indikator pada program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo disusun dengan definisi operasional yang jelas agar mudah dipahami, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Definisi operasional menjelaskan secara rinci makna indikator, ruang lingkup yang diukur, sumber data, satuan ukur, serta frekuensi pengumpulan data. Misalnya, indikator kontribusi PDRB subsektor perdagangan dan industri didefinisikan sebagai persentase nilai tambah sektor terhadap total PDRB daerah pada tahun tertentu. Indikator omzet koperasi dan usaha mikro didefinisikan sebagai persentase pertumbuhan omzet tahunan yang dihitung dari laporan keuangan koperasi maupun hasil rekapitulasi survei usaha mikro. Sementara itu, indikator pada tata kelola birokrasi, seperti LHE AKIP, didefinisikan sebagai skor hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yang diperoleh perangkat daerah dari instansi berwenang.

Formula perhitungan indikator juga dirumuskan secara sistematis. Untuk indikator kontribusi PDRB, rumus yang digunakan adalah nilai PDRB subsektor dibagi total PDRB daerah dikalikan seratus persen. Indikator pertumbuhan omzet koperasi dan usaha mikro dihitung dengan cara selisih omzet tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dibagi omzet tahun sebelumnya dikalikan seratus persen. Indikator LHE AKIP dihitung melalui persentase perubahan nilai LHE dari tahun sebelumnya terhadap nilai LHE tahun sebelumnya. Rumus-rumus ini digunakan secara konsisten di seluruh program dan kegiatan agar pencapaian target dapat dimonitor secara terukur.

Secara keseluruhan, kejelasan definisi operasional dan formula perhitungan ini menjadi dasar penting dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan. Hal ini memastikan bahwa setiap indikator yang dipilih benar-benar mencerminkan kinerja yang ingin dicapai, dapat dilacak melalui sumber data yang valid, serta memungkinkan evaluasi capaian secara objektif dari tahun ke tahun. Dengan demikian, perencanaan pembangunan daerah tidak hanya terarah pada target angka, tetapi juga pada proses pengukuran kinerja yang transparan dan akuntabel.



BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

**TABEL 4.4 DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULA PERHITUNGAN PROGRAM,
KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN PERANGKAT DAERAH**

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Definisi Operasional Indikator Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Formula Perhitungan Indikator Program/ Kegiatan/ SubKegiatan
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	nilai saki PD	nilai SAKIP DKUPP atas Dokumen LAKIP yang disusun dan diserahkan ke Inspektorat	Nilai SAKIP = (Nilai Perencanaan×0.30) + (Nilai Pengukuran×0.10) + (Nilai Pelaporan×0.15) + (Nilai Evaluasi×0.10) + (Nilai Capaian×0.35)
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	Penetapan dan Penyerahan Dokumen Perencanaan DKUPP dan Laporan Kinerja DKUPP Tepat waktu, tidak lebih dari 14 hari kerja dari target waktu yang ditentukan.	tepat waktu diberi nilai 100, terlambat sampai dengan 7 hari diberi nilai 50 terlambat sampai dengan 14 hari diberi nilai 25 Terlambat lebih dari 14 hari diberi nilai 0
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Total dokumen perencanaan strategis dan tahunan yang wajib disusun oleh masing-masing perangkat daerah dalam rangka pelaksanaan fungsi perencanaan pembangunan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Jumlah Dokumen Perencanaan = Jumlah total dokumen yang telah disusun oleh perangkat daerah sesuai daftar wajib
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen keuangan wajib yang disusun dan disampaikan oleh perangkat daerah kepada instansi pengelola keuangan (seperti BPKAD, Inspektorat, atau BPK) sesuai jadwal yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, peraturan kepala daerah, atau SOP internal	Jumlah dokumen administrasi keuangan PD yang dilaporkan tepat waktu
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan PD yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah dokumen keuangan yang disusun dan disampaikan oleh perangkat daerah kepada instansi terkait sesuai dengan jadwal waktu pelaporan yang telah ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, SOP internal, atau pedoman teknis pengelolaan keuangan.	Jumlah dokumen administrasi keuangan PD yang dilaporkan tepat waktu
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Total pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang secara resmi terdaftar dan telah menerima pembayaran gaji pokok beserta tunjangan (tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan kinerja, dan tunjangan lainnya) sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada periode tertentu (biasanya bulanan).	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan = Jumlah pegawai ASN yang menerima pembayaran gaji dan tunjangan dalam periode pelaporan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Total laporan keuangan yang disusun oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang telah selesai disusun, diaudit (jika diperlukan), dan disampaikan sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan oleh pemerintah daerah atau peraturan perundang-undangan	Jumlah Laporan SKPD yang Disampaikan Akhir Tahun
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi Pengelolaan BMD pada PD yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	total dokumen administrasi yang berkaitan dengan pengelolaan BMD (seperti inventarisasi, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penghapusan, dan pelaporan) yang telah disusun lengkap dan disampaikan oleh perangkat daerah sesuai jadwal waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan atau pedoman teknis pengelolaan BMD	Jumlah dokumen administrasi Pengelolaan BMD pada PD yang disusun dan dilaporkan tepat waktu
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Total laporan administrasi yang disusun oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memuat pencatatan, pendokumentasian, dan pelaporan seluruh transaksi pengelolaan BMD (seperti penerimaan, pemanfaatan, pemeliharaan, mutasi, dan penghapusan) sesuai dengan ketentuan dan jadwal pelaporan yang berlaku.	Jumlah laporan penatausahaan yang disusun dan disampaikan oleh SKPD dalam periode pelaporan
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi pendapatan daerah yang dilaporkan tepat waktu	Total dokumen pendapatan daerah (seperti laporan realisasi pendapatan, laporan setoran pajak daerah, rekap penerimaan, dan dokumen terkait lainnya) yang disusun dan disampaikan oleh perangkat daerah atau unit pengelola pendapatan kepada instansi terkait sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, peraturan kepala daerah, atau standar operasional prosedur internal	Jumlah dokumen administrasi pendapatan daerah yang dilaporkan tepat waktu
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Total laporan yang disusun oleh unit atau perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pengelolaan retribusi daerah, yang memuat data realisasi penerimaan retribusi, administrasi penagihan, pemungutan, serta penggunaan hasil retribusi sesuai dengan ketentuan dan jadwal pelaporan yang berlaku.	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi = Jumlah laporan yang disusun dan disampaikan sesuai jadwal oleh unit pengelola retribusi daerah
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan administrasi umum PD	Perbandingan antara jumlah aspek atau komponen administrasi umum yang telah dipenuhi atau dilaksanakan oleh Perangkat Daerah (PD) dengan jumlah total aspek administrasi umum yang seharusnya dipenuhi, dalam periode tertentu, dinyatakan dalam persentase.	Prosentase Pemenuhan Administrasi Umum (%) = (Jumlah Komponen Administrasi Umum yang Terpenuhi / Jumlah Total Komponen Administrasi Umum yang Harus Dipenuhi) × 100%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Total unit atau kelompok barang (paket) berupa peralatan dan perlengkapan kantor yang telah disediakan oleh Perangkat Daerah (PD) dalam satu periode tertentu	Jumlah Paket = Jumlah total unit/kumpulan peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan dalam satu periode



No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Definisi Operasional Indikator Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Formula Perhitungan Indikator Program/ Kegiatan/ SubKegiatan
			(biasanya per tahun), guna mendukung kelancaran operasional dan pelayanan administrasi perkantoran.	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase pemenuhan BMD yang sesuai dengan RKBMD	Perbandingan antara jumlah atau nilai Barang Milik Daerah (BMD) yang telah direalisasikan (diadakan/disediakan) dan sesuai dengan daftar kebutuhan yang telah direncanakan dalam dokumen RKBMD, terhadap total kebutuhan yang tercantum dalam RKBMD, dinyatakan dalam bentuk persentase	Prosentase Pemenuhan BMD Sesuai RKBMD (%) = $\frac{\text{Jumlah BMD yang Direalisasikan Sesuai RKBMD}}{\text{Jumlah BMD yang Direncanakan dalam RKBMD}} \times 100\%$
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Total unit barang kategori peralatan dan mesin yang telah diadakan, dialokasikan, dan/atau diserahkan kepada unit kerja atau perangkat daerah dalam satu periode tertentu untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan = Total unit barang dalam kategori peralatan dan mesin lainnya yang telah diserahkan kepada PD/unit kerja dalam satu tahun/periode pelaporan
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah unit fasilitas atau instalasi penunjang gedung kantor atau bangunan lainnya yang telah disediakan dan dioperasikan oleh Perangkat Daerah dalam satu periode pelaporan. Ini mencakup fasilitas seperti instalasi listrik, pendingin ruangan, sistem keamanan, jaringan komunikasi, sanitasi, dan prasarana pendukung bangunan lainnya.	Jumlah Unit Sarana & Prasarana Gedung yang Disediakan = Total unit fasilitas/prasarana gedung kantor atau bangunan lain yang diadakan dan difungsikan dalam periode pelaporan
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemenuhan laporan penyediaan jasa penunjang PD	Ukuran kuantitatif yang menunjukkan seberapa banyak laporan yang telah disusun dan disampaikan oleh unit kerja atau pihak terkait mengenai pelaksanaan penyediaan jasa penunjang bagi Perangkat Daerah dalam suatu periode tertentu, sesuai dengan ketentuan dan standar pelaporan yang berlaku.	Jumlah laporan yang telah disampaikan sesuai ketentuan
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah laporan yang dibuat dan disampaikan oleh unit kerja terkait mengenai realisasi penyediaan fasilitas komunikasi (seperti internet, telepon), sumber daya air (seperti air bersih), dan listrik untuk mendukung operasional perangkat daerah dalam periode tertentu, sesuai dengan format, isi, dan jadwal pelaporan yang ditetapkan.	Jumlah Laporan tertulis mengenai penyediaan jasa komunikasi, air, dan listrik
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah dokumen laporan yang dibuat dan disampaikan oleh unit kerja terkait, yang mencatat dan menggambarkan realisasi penyediaan jasa terkait pengadaan, pemeliharaan, atau distribusi peralatan dan perlengkapan kantor untuk mendukung kelancaran operasional perangkat daerah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam periode pelaporan tertentu.	Jumlah Laporan tertulis mengenai penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah dokumen laporan yang disusun dan disampaikan oleh unit kerja terkait, yang berisi informasi tentang pelaksanaan penyediaan jasa pelayanan umum kantor – seperti kebersihan, keamanan, layanan resepsionis, pengelolaan parkir, dan layanan umum lainnya – yang mendukung operasional perangkat daerah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam periode tertentu.	Jumlah Laporan tertulis tentang pelaksanaan jasa pelayanan umum kantor
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	Jumlah aset atau barang milik daerah yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, yang terverifikasi dalam kondisi fisik baik dan berfungsi secara optimal sesuai standar pemeliharaan, tanpa kerusakan signifikan, dalam periode pelaporan tertentu.	Jumlah laporan Barang Milik Daerah (BMD) yang mendukung urusan pemerintahan daerah
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Total kendaraan dinas yang digunakan untuk operasional atau kegiatan lapangan oleh perangkat daerah, yang dalam periode pelaporan tertentu telah menjalani pemeliharaan rutin sesuai standar dan memiliki dokumen pajak serta perizinan yang lengkap dan berlaku.	Jumlah laporan Kendaraan dinas operasional atau lapangan milik daerah yang pajak kendaraan dan dokumen perizinan (STNK, SIM, izin khusus jika ada) telah dibayarkan dan berlaku
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Total unit peralatan dan mesin (selain kendaraan dinas dan alat berat utama) milik daerah yang telah mendapatkan kegiatan pemeliharaan rutin atau berkala sesuai jadwal dan standar teknis dalam periode pelaporan tertentu, guna memastikan kondisi dan fungsi alat tetap optimal.	Jumlah laporan peralatan dan mesin yang telah melakukan Pemeliharaan rutin dan/atau berkala sesuai jadwal, meliputi servis, pengecekan, perbaikan kecil, dll.
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Total unit atau elemen sarana dan prasarana gedung kantor serta bangunan pendukung lainnya yang telah mendapatkan kegiatan pemeliharaan rutin, perbaikan, atau rehabilitasi fisik dalam periode pelaporan tertentu, sehingga memastikan fungsi dan kondisi bangunan tetap aman, nyaman, dan layak pakai.	Jumlah laporan pemeliharaan rutin (servis, pengecekan, perbaikan kecil) dan/atau rehabilitasi (perbaikan besar, renovasi) sesuai jadwal dan standar teknis
2	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase koperasi yang telah memiliki ijin USP	Koperasi usaha simpan pinjam adalah lembaga keuangan bukan bank dengan kegiatan usaha menerima simpanan dan memberikan pinjaman uang kepada anggotanya.	Jumlah koperasi yg memiliki izin usaha/jumlah Koperasi aktif x 100
	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Koperasi yang dikeluarkan persetujuan ijin usaha	Koperasi usaha simpan pinjam adalah lembaga keuangan bukan bank dengan kegiatan usaha menerima simpanan dan memberikan pinjaman uang kepada anggotanya.	Jumlah koperasi yg memenuhi syarat izin usaha /jumlah Koperasi yg difasilitasi perizinan x 100



No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Definisi Operasional Indikator Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Formula Perhitungan Indikator Program/ Kegiatan/ SubKegiatan
	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terfasilitasinya Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Koperasi usaha simpan pinjam adalah lembaga keuangan bukan bank dengan kegiatan usaha menerima simpanan dan memberikan pinjaman uang kepada anggotanya.	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
3	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan	Koperasi patuh adalah Koperasi yg memenuhi penerapan Tata kelola sesuai peraturan perundang-undangan	Jumlah koperasi yg patuh/jumlah Koperasi yg diawasi dan diperiksax 100
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Koperasi yang diawasi dan diperiksa	kegiatan monitoring, evaluasi, dan audit terhadap kinerja, kepatuhan terhadap peraturan, pengelolaan keuangan, dan tata kelola koperasi	jumlah Koperasi yg diawasi dan diperiksa/Jumlah Koperasi yang melaksanakan RAT x 100
	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Pengembangan sistem administrasi, pelaporan keuangan, mekanisme rapat anggota, pengelolaan sumber daya manusia, dan transparansi operasional	Jumlah Koperasi yang telah Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi
	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Kegiatan evaluasi dan monitoring terhadap aspek keuangan, tata kelola, kepatuhan terhadap peraturan, serta pelaksanaan operasional koperasi	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan
4	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase koperasi yang meningkat status kesehatannya	Pertumbuhan koperasi sehat dan cukup sehat tahun n dibandingkan dengan tahun n-1	(Jumlah koperasi sehat & cukup sehat tahun n - Jumlah koperasi sehat & cukup sehat tahun n-1) / Jumlah koperasi sehat & cukup sehat tahun n-1 x 100
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase koperasi yang telah dinilai status kesehatannya	Koperasi sehat adalah koperasi yang mendapatkan nilai 80-100 dalam penilaian tingkat kesehatan koperasi, Koperasi cukup sehat adalah koperasi yang mendapatkan nilai 60-80 dalam penilaian tingkat kesehatan koperasi	jumlah Koperasi yg dilakukan penilaian kesehatan/Jumlah Koperasi yg melaksanakan RAT x 100
	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	proses evaluasi menyeluruh terhadap kondisi keuangan, operasional, dan tata kelola koperasi untuk menentukan tingkat kesehatan koperasi, mulai dari sehat, kurang sehat, sampai tidak sehat	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan
5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Peningkatan Kompetensi Pengurus/Pengelola Koperasi	Proporsi pengurus/pengelola koperasi yang mengalami peningkatan kompetensi (berdasarkan hasil pre-test dan post-test, atau evaluasi pelatihan).	Persentase Peningkatan Kompetensi (%)=Jumlah peserta yang meningkat kompetensinya /Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase koperasi yang SDM-nya difasilitasi pendidikan dan pelatihan	SDM koperasi adalah salah satu yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah manajemen pengelolaan koperasi.	jumlah Koperasi yang SDM-nya difasilitasi pendidikan dan pelatihan/Jumlah Koperasi aktif x 100
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Pemahaman pengetahuan perkoperasian mencakup penguasaan informasi mengenai prinsip koperasi, hak dan kewajiban anggota, struktur kelembagaan koperasi, tata kelola yang baik, serta aspek keuangan dan hukum koperasi.	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang meningkat volume usahanya	Volume usaha koperasi mencerminkan total aktivitas ekonominya, biasanya diukur berdasarkan omset penjualan, nilai transaksi simpan pinjam, atau perputaran modal koperasi.	jumlah Koperasi yang meningkat volume usahanya/Jumlah Koperasi yang diberdayakan dan dilindungi
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	jumlah koperasi yang diberdayakan dan dilindungi	Pemberdayaan koperasi adalah kegiatan untuk meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan daya saing koperasi melalui pelatihan, pendampingan, fasilitasi permodalan, pengembangan usaha, transformasi digital, atau pembukaan akses pasar. Perlindungan koperasi mencakup tindakan pemerintah untuk menjaga eksistensi koperasi dari praktik usaha tidak adil, memberikan kepastian hukum, serta perlindungan terhadap aset, anggota, dan aktivitas usaha koperasi.	jumlah Koperasi yang diberdayakan dan dilindungi Tahun N
	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/ Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/ Kota	Pemberdayaan koperasi adalah kegiatan untuk meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan daya saing koperasi melalui pelatihan, pendampingan, fasilitasi permodalan, pengembangan usaha, transformasi digital, atau pembukaan akses pasar.	Jumlah koperasi yang telah dilakukan Pemberdayaan
	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	Fasilitasi Kemitraannya adalah kegiatan yang mendukung terbentuknya kerja sama antara koperasi dengan mitra usaha strategis, baik dari sektor swasta, BUMI, BUMD, maupun lembaga keuangan, dalam rangka meningkatkan kapasitas usaha koperasi, memperluas akses pasar, meningkatkan daya saing, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal berbasis koperasi.	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya



No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Definisi Operasional Indikator Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Formula Perhitungan Indikator Program/ Kegiatan/ SubKegiatan
7	PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Peresentase UM yang meningkat omzetnya	UM yg meningkat omzetnya adalah UM yang secara tahunan meningkat dari omzet sebelumnya	Jumlah UM yg meningkat omzetnya/Jumlah UM yg diberdayakan x 100
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Usaha Mikro yang telah diberdayakan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Usaha Mikro yang telah menerima intervensi pemberdayaan yang meliputi kegiatan pendataan terverifikasi, fasilitasi kemitraan usaha, kemudahan dalam perizinan berusaha, penguatan kelembagaan usaha, serta dukungan hasil koordinasi lintas sektor dengan para pemangku kepentingan (pemerintah, swasta, asosiasi, BUMN, dan lainnya) dalam periode waktu tertentu di wilayah Kabupaten/Kota.	Jumlah Usaha Mikro yang telah diberdayakan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Kemitraan usaha adalah bentuk kerja sama yang saling menguntungkan antara usaha besar dan usaha mikro, dilakukan dalam semangat pembinaan, pemerataan ekonomi, dan penguatan ekosistem usaha lokal	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro
	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Usaha Mikro yang telah memperoleh dokumen legalitas usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) atau bentuk perizinan lainnya yang berlaku sesuai peraturan, melalui sistem perizinan berbasis risiko seperti OSS RBA (Online Single Submission Risk Based Approach), dalam periode waktu tertentu dan di wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	UM yang telah melaksanakan : 1. Pelatihan manajemen usaha, keuangan, pemasaran, atau produksi 2. Fasilitasi perizinan dan legalitas usaha mikro 3. Dukungan akses pembiayaan 4. Bimbingan teknis secara berkelanjutan	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro
	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Mewujudkan sinergitas dan kolaborasi pengembangan UMKM	Jumlah SDM yang mendapatkan fasilitas Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	telah mengikuti dan menyelesaikan kegiatan pembelajaran, pelatihan, atau sosialisasi yang berkaitan dengan pengetahuan dasar tentang usaha mikro dan kewirausahaan, sehingga memiliki pemahaman yang memadai dalam menjalankan, mengelola, atau mendukung pengembangan usaha mikro	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan
8	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase usaha mikro yang meningkat Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Usaha Mikro sesuai PP no 07 Tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, pemberdayaan KUMKM memiliki hasil penjualan tahunan sampai 2 milyar sedangkan Usaha kecil memiliki hasil penjualan tahunan diatas 2 milyar s/d 15 Milyar	Jumlah UM yg meningkat skala usaha menjadi usaha kecil /Jumlah UM yg dikembangkan x 100
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah UM yang meningkat skala usaha menjadi usaha kecil	Usaha Mikro sesuai PP no 07 Tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, pemberdayaan KUMKM memiliki hasil penjualan tahunan sampai 2 milyar sedangkan Usaha kecil memiliki hasil penjualan tahunan diatas 2 milyar s/d 15 Milyar	Jumlah UM yang meningkat skala usaha menjadi usaha kecil
	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	UMKM telah menerima bantuan, dukungan, atau intervensi dalam bentuk program, pelatihan, penyediaan alat, konsultasi, promosi, atau bentuk lain yang relevan dari pihak pemerintah, swasta, lembaga keuangan, atau organisasi masyarakat	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi
9	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase usaha perdagangan yang memiliki izin usaha	Perusahaan yang berhubungan dengan sektor jasa perdagangan	Jumlah Dokumen izin sektor jasa perdagangan yang telah diterbitkan/Jumlah sektor jasa perdagangan yang direkomendasikan perizinannya x 100
	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Tanda Daftar Gudang yang direkomendasikan	Dokumen rekomendasi TDG adalah surat atau dokumen resmi yang menyatakan bahwa suatu gudang telah memenuhi persyaratan administratif, kondisi fisik, dan standar teknis sesuai regulasi yang berlaku, sehingga layak diberikan izin operasional. Jumlah ini dihitung berdasarkan seluruh dokumen rekomendasi yang diterbitkan dalam periode tertentu (misalnya tahunan) oleh instansi pemerintah di tingkat Kabupaten/Kota atau yang memiliki kewenangan terkait.	Jumlah Tanda Daftar Gudang yang direkomendasikan
	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Dokumen Tanda Daftar Gudang merupakan surat atau sertifikat resmi yang diberikan kepada pemilik atau pengelola gudang setelah melalui proses pendaftaran dan verifikasi kelayakan. Dokumen ini menunjukkan bahwa gudang tersebut telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan regulasi yang berlaku, sehingga dapat beroperasi secara legal.	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang dan telah ditetapkan oleh kepala daerah atau pejabat berwenang
	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan	Jumlah tempat penjualan dan penyimpanan Bahan Berbahaya	Kegiatan yang dilakukan untuk memastikan bahwa penyimpanan dan penjualan bahan Berbahaya yang sesuai dengan ketentuan peruntukannya. Kegiatan pengawasan ini dapat berupa inspeksi lapangan, monitoring dan pelaporan hasil pengawasan.	Jumlah penjual dan penyimpanan Bahan Berbahaya



No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Definisi Operasional Indikator Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Formula Perhitungan Indikator Program/ Kegiatan/ SubKegiatan
	Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota			
	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Kegiatan yang dilakukan untuk memastikan bahwa penyimpanan dan penjualan bahan Berbahaya yang sesuai dengan ketentuan peruntukannya. Kegiatan pengawasan ini dapat berupa inspeksi lapangan, monitoring dan pelaporan hasil pengawasan.	Jumlah penjual dan penyimpanan Bahan Berbahaya
	Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	Jumlah Surat Keterangan Asal yang diterbitkan	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) mencakup kelengkapan persyaratan dokumen yang dipersyaratkan, kelengkapan dan kebenaran data dalam pengajuan melalui sistem e-SKA, serta verifikasi dan penandatanganan oleh Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA) sesuai Standard Operating Procedure (SOP)	Jumlah Surat Keterangan Asal yang diterbitkan
	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	Kegiatan yang dilaksanakan untuk membuktikan asal suatu barang yang akan diekspor, menyatakan bahwa barang tersebut dihasilkan, diproduksi atau diolah di Indonesia	Jumlah Surat Keterangan Asala (SKA) yang telah disetujui dan ditandatangani oleh penandatangan resmi IPSKA dan di beri stempel
10	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase sarana distribusi perdagangan yang berstandar SNI	sarana distribusi perdagangan adalah Pasar Rakyat yang berstandar SNI sesuai Permendag 21 tahun 2021 dan Pusat Promosi Produk Unggulan Daerah	Jumlah Pasar Rakyat yang berstandar SNI/ (Jumlah Pasar Rakyat yang dikelola + Pusat Promosi produk unggulan daerah) x 100
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang direvitalisasi	Sarana distribusi perdagangan yang direvitalisasi adalah kegiatan untuk membangun atau memperbaiki sarana dan prasarana, dan pengelolaan manajemen yang dikelola	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang direvitalisasi
	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan mencakup segala bentuk dukungan teknis, administratif, atau kebijakan yang diberikan kepada pengelola/ pelaku usaha distribusi (seperti pasar rakyat, toko modern, gudang, pusat distribusi, dan sejenisnya), agar sarana distribusi tersebut dapat berfungsi secara optimal, efisien, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dukungan ini dapat berupa pendampingan, pelatihan, penyusunan manajemen pengelolaan, penguatan kelembagaan, maupun integrasi dengan sistem informasi perdagangan.	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang telah difasilitasi pengelolaannya
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan yang difasilitasi pembinaan dan pemberdayaan	Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan adalah Koordinator Pasar Rakyat dan Pusat Promosi produk unggulan daerah	Jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan yang difasilitasi pembinaan dan pemberdayaan
	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dokumen ini merupakan hasil dari kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, kinerja, dan kepatuhan pengelola sarana distribusi perdagangan – seperti pasar rakyat, gudang, toko swalayan, dan pusat distribusi lainnya – melalui tindakan pembinaan (edukasi, pendampingan, pelatihan) serta pengendalian (pengawasan, pemantauan, evaluasi).	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan dan telah ditetapkan oleh kepala daerah atau pejabat berwenang
11	PROGRAM TABILISASI HARGABARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang harganya stabil	1. Barang Kebutuhan Pokok : mengacu pada perpres 59 Th 2020 (beras, kedelai, cabe, bawang merah, gula, minyak goreng, tepung terigu, daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, ikan segar) 2. Barang Penting : Bersifat strategis dalam pembangunan (Benih (padi Jagung Kedelai), pupuk, gas lpg 3 kg, triplek, semen, besi baja konstruksi, baja ringan)	barang kebutuhan pokok dan barang penting yang dikendalikan/ barang kebutuhan pokok dan barang penting x 100
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang dikendalikan	Barang Kebutuhan Pokok : mengacu pada perpres 59 Th 2020 (beras, kedelai, cabe, bawang merah, gula, minyak goreng, tepung terigu, daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, ikan segar) Barang Penting : Bersifat strategis dalam pembangunan (Benih (padi Jagung Kedelai), pupuk, gas lpg 3 kg, triplek, semen, besi baja konstruksi, baja ringan)	Jumlah Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang dikendalikan
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	hasil kegiatan pemantauan rutin oleh petugas di pasar rakyat terhadap harga eceran dan ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan penting (seperti beras, minyak goreng, gula, telur, daging, cabai, LPG, dsb). Laporan tersebut kemudian diinput dan tercatat dalam Sistem Informasi Perdagangan, baik tingkat daerah maupun nasional, sebagai bagian dari sistem pengendalian dan peringatan dini stabilitas pasokan dan harga	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan dan telah ditetapkan oleh kepala daerah atau pejabat berwenang
	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan pelaksanaan memuat informasi terkait waktu, lokasi, barang yang dijual, jumlah barang, harga, dan dampak terhadap masyarakat/pasar	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota dan telah ditetapkan oleh kepala daerah atau pejabat berwenang
	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi yang dilaksanakan	Kegiatan yang dilakukan untuk memastikan bahwa distribusi dan penggunaan pupuk dan pestisida yang mendapat subsidi pemerintah sesuai dengan ketentuan, tepat sasaran (kepada petani yang berhak), serta tidak	Jumlah Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi yang dilaksanakan



No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Definisi Operasional Indikator Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Formula Perhitungan Indikator Program/ Kegiatan/ SubKegiatan
			terjadi penyalahgunaan, kelangkaan, atau penyelewengan. Kegiatan pengawasan ini dapat berupa inspeksi lapangan, monitoring penyaluran, pengecekan data RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok), audit distribusi, dan pelaporan hasil pengawasan.	
	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Laporan ini menunjukkan keberhasilan penyaluran pupuk dan pestisida bersubsidi kepada penerima yang berhak (sesuai data RDKK), yang dikawal melalui kegiatan pengawasan oleh instansi berwenang. Pengawasan dilakukan untuk memastikan tidak ada penyimpangan dalam distribusi maupun penggunaan, serta untuk mengukur tingkat efektivitas penyaluran	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dan telah ditetapkan oleh kepala daerah atau pejabat berwenang
12	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase produk ekspor unggulan daerah yang berhasil dipasarkan di luar Daerah	1. Ekspor adalah penjualan produk barang/jasa keluar Kab. Probolinggo 2. Produk ekspor Unggulan Daerah adalah Produk Barang/Jasa yg dihasilkan oleh Koperasi, UKM dan Industri yg potensial utk dikembangkan	Jumlah produk unggulan daerah yang berhasil dipasarkan / Jumlah produk unggulan yg difasilitasi Promosi produk unggulan daerah) x 100
	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah produk Ekspor unggulan daerah yang difasilitasi promosi	Fasilitasi promosi dapat berupa partisipasi dalam pameran dagang, business matching, publikasi melalui media perdagangan, katalog ekspor, misi dagang, pemasaran digital, atau promosi melalui perwakilan dagang luar negeri	Jumlah produk Ekspor unggulan daerah yang difasilitasi promosi
	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	pelaku usaha dapat mengikuti pameran untuk mempromosikan produknya. Bentuk fasilitasi bisa berupa pembiayaan stan pameran, transportasi, penginapan, penyediaan media promosi, pelatihan pra-pameran, atau pendampingan teknis.	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang
	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	kegiatan promosi dan penajakan kerja sama dagang yang mempertemukan pelaku usaha dalam negeri dengan calon mitra dagang, pembeli, atau investor dari wilayah atau negara lain	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang
13	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah yang berlaku	UTTP yang telah dilakukan pengujian memenuhi syarat metrologis dan dibubuhkan tanda sah berlaku oleh Pegawai Berhak	Jumlah UTTP bertanda tera sah berlaku /Jumlah UTTP ditera tera dan tera ulang x 100
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase UTTP yang ditera dan tera ulang	UTTP yang telah dilakukan pengujian dengan syarat teknis yang berlaku oleh pegawai berhak	Jumlah UTTP ditera dan tera ulang /Jumlah potensi UTTP x 100
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Alat yang termasuk dalam kategori ini misalnya: timbangan toko, timbangan digital, neraca, gelas ukur, flow meter, dan perlengkapan ukur lainnya yang digunakan dalam perdagangan.	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang
	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Pembinaan yang dilakukan dapat berupa pelatihan teknis, sosialisasi peraturan, pendampingan dalam proses tera dan tera ulang, audit kepatuhan, serta penguatan kapasitas usaha agar memenuhi standar metrologi legal.	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina
14	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase produk unggulan daerah yang digunakan dan dipasarkan di dalam negeri	Produk Unggulan Daerah adalah Produk Barang/Jasa yg dihasilkan oleh Koperasi dan UKM yg potensial utk dikembangkan	Jumlah produk unggulan daerah yang berhasil dipasarkan / Jumlah produk unggulan yg difasilitasi Promosi produk unggulan daerah) x 100
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah produk unggulan daerah yang difasilitasi promosi	Taget Indikator akumulasi dari tahun sebelumnya	Jumlah produk unggulan daerah yang difasilitasi promosi
	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	Bentuk kerja sama yang memungkinkan UMKM menjual produk mereka melalui saluran distribusi dan pemasaran milik mitra, sehingga memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan penjualan	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi
15	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	% Draft Kebijakan Pembangunan Industri yang telah disahkan sebagai kebijakan	Draft Kebijakan terkait Pembangunan Industri di Kabupaten yang telah disahkan meliputi Rumusan Peraturan	Jumlah Draft Kebijakan Pembangunan yg disahkan/ Jumlah Draft Kebijakan Pembangunan yg dihasilkan x 100
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	% Draft Kebijakan Pembangunan Industri yang dihasilkan	Draft Kebijakan terkait Pembangunan Industri di Kabupaten meliputi Kajian, Perumusan Peraturan, Pemetaan dan Pendataan Industri	Jumlah Draft Kebijakan Pembangunan Industri yang dihasilkan/ Jumlah Draft Kebijakan Pembangunan Industri yang direncanakan
	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Total dokumen perencanaan strategis yang disusun dan/atau ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai acuan dalam pengembangan sektor industri di wilayahnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam periode pelaporan tertentu.	Jumlah Dokumen perencanaan pembangunan industri yang dihasilkan dan telah ditetapkan oleh kepala daerah atau pejabat berwenang
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah dokumen tertulis yang dihasilkan dari kegiatan koordinasi antar pemangku kepentingan, sinkronisasi kebijakan lintas sektor, dan pelaksanaan strategi percepatan pembangunan industri yang tersebar secara merata dan sesuai dengan potensi wilayah, dalam periode pelaporan tertentu.	Jumlah Dokumen hasil kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan kebijakan sektor industri dan telah ditetapkan oleh kepala daerah atau pejabat berwenang



No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Definisi Operasional Indikator Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Formula Perhitungan Indikator Program/ Kegiatan/ SubKegiatan
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Total dokumen yang dihasilkan dari kegiatan koordinasi antar pemangku kepentingan, sinkronisasi kebijakan, serta pelaksanaan program atau kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) industri, dalam periode pelaporan tertentu.	Jumlah Dokumen hasil kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan SDM industri dan telah ditetapkan oleh kepala daerah atau pejabat berwenang
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah dokumen resmi yang dihasilkan dari kegiatan koordinasi antar pemangku kepentingan, sinkronisasi program dan kebijakan, serta pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung kegiatan industri di suatu wilayah dalam periode pelaporan tertentu.	Jumlah Dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana industri dan telah ditetapkan oleh kepala daerah atau pejabat berwenang
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah dokumen resmi yang dihasilkan dari kegiatan koordinasi antar pihak terkait, sinkronisasi kebijakan/program, serta pelaksanaan aktivitas yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pelaku industri dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan sektor industri di daerah, dalam periode pelaporan tertentu.	Jumlah Dokumen hasil kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan masyarakat dan telah ditetapkan oleh kepala daerah atau pejabat berwenang
	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Total dokumen resmi yang disusun dan/atau diterbitkan oleh pemerintah daerah atau instansi berwenang yang memuat hasil penilaian terhadap capaian pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri (misalnya RPIK), termasuk identifikasi hambatan, keberhasilan, dan rekomendasi tindak lanjut dalam periode tertentu.	Jumlah Dokumen evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan industri dan telah ditetapkan oleh kepala daerah atau pejabat berwenang
	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/ Kota	Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan	Jumlah seluruh dokumen resmi yang dibuat, diterima, atau disimpan oleh instansi atau lembaga yang berwenang di tingkat Kabupaten/Kota terkait kegiatan pengawasan terhadap kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi ketentuan JPH dalam kurun waktu tertentu (misalnya per tahun).	Jumlah dokumen Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota dan telah ditetapkan oleh kepala daerah atau pejabat berwenang
16	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Izin Usaha Industri yang telah diterbitkan	Usaha Industri yang telah diterbitkan perizinannya Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI)	Usaha Industri yang telah diterbitkan perizinannya/ Usaha Industri yang direkomendasikan perizinannya 100
	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/ Kota yang direkomendasikan penerbitan ijinnya	Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/ Kota yang direkomendasikan penerbitan ijinnya	Jumlah Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/ Kota yang direkomendasikan penerbitan ijinnya Tahun N
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Total dokumen resmi yang terkait dengan kegiatan komunikasi, koordinasi, dan sinkronisasi antar instansi atau unit pemerintahan di tingkat Kabupaten/ Kota dalam rangka pengawasan pelaksanaan perizinan berusaha pada sektor perindustrian, selama periode tertentu (misalnya dalam satu tahun).	Jumlah dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/ Kota dan telah ditetapkan oleh kepala daerah atau pejabat berwenang
	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/ standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/ standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha	Dokumen-dokumen resmi yang dibuat, diterima, atau disimpan oleh instansi berwenang di tingkat Kabupaten/ Kota selama proses fasilitasi verifikasi persyaratan atau standar usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan izin usaha berbasis risiko, yang dikelola dan terintegrasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) dan Sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA).	Jumlah dokumen Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/ standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA) dan telah ditetapkan oleh kepala daerah atau pejabat berwenang



No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Definisi Operasional Indikator Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Formula Perhitungan Indikator Program/ Kegiatan/ SubKegiatan
		tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat		
17	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase perusahaan industri yang telah memenuhi kewajiban penyampaian informasi di SIINas	SIINas merupakan pengembangan teknologi informasi yang berisi data-data mengenai industri dalam negeri, yang diharapkan dapat memantau perkembangan dan pembinaan industri dalam negeri.	Jumlah Industri yang memenuhi kewajiban penyampaian informasi di SIINas/Jumlah Industri yang terdaftar di SIINAS x 100
	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota yang terdaftar di SIINAS	Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota yang terdaftar di SIINAS	Jumlah Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota yang terdaftar di SIINAS
	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri, Data Data Lain Lingkup Kabupaten/ Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/ Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Dokumen-dokumen resmi yang mencatat hasil kegiatan fasilitasi pengumpulan, pengolahan, dan analisis data yang meliputi data industri, kawasan industri, dan data relevan lainnya dalam lingkup Kabupaten/Kota. Dokumen ini merupakan output yang dihasilkan oleh instansi berwenang setelah melakukan proses fasilitasi dan tercatat dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) dan telah ditetapkan oleh kepala daerah atau pejabat berwenang
	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Dokumen-dokumen yang dihasilkan oleh instansi berwenang di Kabupaten/Kota sebagai output dari proses diseminasi dan publikasi data industri, termasuk hasil analisis dan informasi yang diperoleh dari SIINas. Dokumen ini merupakan media komunikasi untuk menyampaikan hasil pengolahan data kepada pemangku kepentingan atau publik dalam rangka mendukung transparansi dan pengambilan keputusan.	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas dan telah ditetapkan oleh kepala daerah atau pejabat berwenang
	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Dokumen-dokumen yang dihasilkan oleh instansi berwenang di Kabupaten/Kota sebagai hasil kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap kepatuhan perusahaan industri dan kawasan industri dalam menyampaikan data sesuai ketentuan melalui SIINas. Dokumen ini menjadi bukti tertulis atas pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kepatuhan data perusahaan.	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas dan telah ditetapkan oleh kepala daerah atau pejabat berwenang

4.2.2 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo berlandaskan kepada tujuan dan sasaran yang tercantum di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Indikator kinerja yang tercantum di dalam RPJMD telah memperjelas kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo untuk lima tahun ke depan. Penetapan indikator kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo telah dilakukan identifikasi sesuai dengan lingkup bidang pelayanan terkait dengan memperhatikan tugas dan fungsi yang mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran di RPJMD.



Tabel 4.5 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
2.17.3.30.3.31.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan Dan Perindustrian										
I	ASPEK DAYA SAING DAERAH									
1	Persentase PDRB Perdagangan	5%	4,11	4,67	5,23	5,78	6,34	6,9	7,46	
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	27,19	27,35	27,43	27,44	27,45	27,47	27,48	
II	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
1	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	%	20,23	0,5	0,75	1	1,25	1,5	1,75	
2	Jumlah Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	%	58,83	61,62	64,36	67,06	69,7	72,31	74,86	
3	Persentase alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	70,12	48	32	35,2	38,4	48	51,2	
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin perluasan industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	0	10	20	30	40	50	60	

Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo diarahkan untuk memperkuat aspek daya saing daerah dan pencapaian indikator kinerja kunci yang berpengaruh langsung pada pertumbuhan ekonomi daerah. Dari sisi daya saing, indikator persentase PDRB perdagangan menunjukkan tren peningkatan dari baseline 4,11 persen pada tahun 2024 menjadi 7,46 persen pada tahun 2030. Hal ini mencerminkan semakin besarnya peran sektor perdagangan dalam struktur ekonomi daerah. Begitu pula dengan rasio PDRB



industri pengolahan yang bergerak stabil dari 27,19 persen pada tahun 2024 menuju 27,48 persen di tahun 2030, menggambarkan keberlanjutan kontribusi sektor industri sebagai pilar utama perekonomian.

Pada aspek indikator kinerja kunci, fokus pembangunan diarahkan pada penguatan koperasi, usaha mikro, perlindungan konsumen, serta pengembangan industri. Pertumbuhan volume usaha koperasi ditargetkan meningkat secara bertahap dari baseline 20,23 persen pada 2024 menjadi 1,75 persen pertumbuhan tambahan pada tahun 2030, yang mencerminkan upaya pemberdayaan koperasi agar lebih produktif. Indikator jumlah usaha mikro yang bertransformasi dari informal ke formal juga ditargetkan naik konsisten, dari 58,83 persen di tahun 2024 menjadi 74,86 persen pada 2030, sebagai hasil program fasilitasi legalitas, perizinan, dan pembinaan usaha kecil.

Sementara itu, perlindungan konsumen diukur melalui persentase alat ukur takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah. Meski baseline awal tahun 2024 mencapai 70,12 persen, target tahun-tahun berikutnya disesuaikan secara dinamis, dengan peningkatan bertahap dari 32 persen di 2026 hingga mencapai 51,2 persen pada 2030. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan sistematis dalam penertiban dan pelayanan metrologi legal. Terakhir, Persentase jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang memiliki tingkat kepatuhan minimal 'Baik' dibandingkan seluruh jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang sudah dilakukan pembinaan ditetapkan dari 0 persen pada 2024 menjadi 60 persen pada 2030, yang memperlihatkan Kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga regulasi terkait, misalnya dalam hal pengumpulan data, perlindungan data pribadi, dan integrasi dengan sistem nasional lainnya.

4.3 PROGRAM PRIORITAS DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Program prioritas dalam Renstra 2025–2029 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo merupakan bagian penting dari strategi pencapaian tujuan pembangunan sektor ekonomi daerah. Program



BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

prioritas ini dirumuskan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan benar-benar berorientasi pada kebutuhan masyarakat, menjawab permasalahan strategis, serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah secara terukur.

Setiap program prioritas disusun dengan mempertimbangkan keterpaduan antara kebijakan nasional, prioritas pembangunan daerah, dan potensi lokal, sehingga mampu mendorong pemberdayaan koperasi dan UMKM, memperkuat jaringan perdagangan, meningkatkan kapasitas industri, serta memperluas kesempatan kerja dan peluang usaha. Dengan demikian, program prioritas yang dilaksanakan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berdampak langsung pada peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Program prioritas pembangunan daerah Kabupaten Probolinggo pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian sebagai berikut:



BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

**TABEL 4.6 DAFTAR PROGRAM PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN
AKHIR RENSTRA
PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO**

NO	RPJMD	RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD		
	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	SAE PENDAPATAN DAERAH : INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAD	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
			Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
2	SAE BERTANI : 3 PASAR TRANSIT AGRO (tembakau, bawang merah, buah dan sayuran) – BUMD, Investor 1 PASAR INDUK AGRO	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
3	SAE PENDAPATAN KELUARGA : 2.000 UMKM NAIK KELAS SAE PEREMPUAN BERDAYA SAING : PAMERAN PRODUK UNGGULAN PEREMPUAN	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
4	SAE PEREMPUAN BERDAYA SAING : PAMERAN PRODUK UNGGULAN PEREMPUAN	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pameran Dagang Nasional
5	SAE KESEMPATAN KERJA : 10 RUMAH KREATIF MILLENIAL SAE GUS-TREN : EKOTREN (PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI PESANTREN) SAE PENDAPATAN KELUARGA : 2.000 UMKM NAIK KELAS SAE PENDAPATAN KELUARGA : 3.000 TOKO KELONTONG NAIK	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	1. Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro 2. Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro 3. Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro 4. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan



BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

NO	RPJMD	RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD		
	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN
	KELAS SAE PENDAPATAN KELUARGA : ONE VILLAGE ONE PRODUCT SAE PEREMPUAN BERDAYA SAING : 1.000 PENGUSAHA PEREMPUAN			Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan
6	SAE PENDAPATAN KELUARGA : KOPERASI DESA MERAH PUTIH	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	1. Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi 2. Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota
7	SAE PENDAPATAN KELUARGA : KOPERASI DESA MERAH PUTIH	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan
8	SAE PENDAPATAN KELUARGA : KOPERASI DESA MERAH PUTIH	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Pendidikan dan Latihan perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
9	SAE KESEMPATAN KERJA : MEMBANGUN PERWILAYAHAN INDUSTRI	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri 2. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
10	SAE KESEMPATAN KERJA : MEMBANGUN PERWILAYAHAN INDUSTRI	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online



NO	RPJMD	RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD		
	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN
				Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)



RENSTRA DKUPP KABUPATEN
PROBOLINGGO TAHUN 2025-2029

BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

Dengan adanya sub kegiatan prioritas ini, diharapkan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo dapat mewujudkan tata kelola pembangunan sektor ekonomi yang lebih inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan, sehingga mampu mendukung terwujudnya Kabupaten Probolinggo yang Sejahtera, Amanah-Religius serta Eksis Berdaya Saing pada periode 2025–2029.

1. SAE Pendapatan Daerah : Intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD

Program prioritas RPJMD ini berkaitan erat dengan Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan pada Renstra PD. Keterkaitan ini mencerminkan upaya meningkatkan pendapatan asli daerah melalui penguatan infrastruktur distribusi, tata niaga, serta penciptaan rantai pasok yang efisien. Dengan memperluas akses dan sarana perdagangan, maka sumber PAD dapat dioptimalkan dari aktivitas perdagangan lokal maupun antarwilayah.

2. SAE Bertani : 3 Pasar Transit Agro dan 1 Pasar Induk Agro

Pasar Transit Agro (tembakau, bawang merah, buah, dan sayuran) serta Pasar Induk Agro dalam kerangka Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan. Pasar Transit Agro berfungsi mempercepat distribusi dan meningkatkan efisiensi logistik hasil pertanian, sedangkan Pasar Induk Agro menjadi pusat perdagangan skala besar yang memperluas akses pasar dan memperkuat daya saing produk lokal. Melalui fasilitasi pengelolaan yang profesional dan berbasis teknologi, DKUPP memastikan pasar ini berperan tidak hanya sebagai tempat transaksi, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi daerah yang mendukung peningkatan PDRB perdagangan dan pertanian

3. SAE Pendapatan Keluarga : 2.000 UMKM Naik Kelas & SAE Perempuan Berdaya Saing: Pameran Produk Unggulan Perempuan

Program prioritas ini terhubung dengan Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri. Keterkaitannya terletak pada tujuan yang sama, yaitu meningkatkan daya saing dan kemandirian UMKM serta mendorong konsumsi produk lokal. Pameran produk unggulan perempuan juga menjadi sarana strategis untuk memperluas pasar dan memperkuat branding produk, sehingga



UMKM dapat naik kelas sekaligus memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan keluarga.

4. SAE Perempuan Berdaya Saing : Pameran Produk Unggulan Perempuan

Program ini terintegrasi dengan Program Pengembangan Ekspor. Hubungan keduanya menunjukkan orientasi kebijakan yang tidak hanya memperkuat daya saing di pasar domestik, tetapi juga menembus pasar ekspor. Melalui fasilitasi promosi, jejaring internasional, dan peningkatan kualitas produk, produk unggulan perempuan diharapkan dapat memberikan kontribusi langsung pada ekspor daerah.

5. SAE Kesempatan Kerja : 10 Rumah Kreatif Millennial, SAE Gus-Tren : Ekotren, SAE Pendapatan Keluarga : 2.000 UMKM Naik Kelas, 3.000 Toko Kelontong Naik Kelas, One Village One Product, dan 1.000 Pengusaha Perempuan

Seluruh program prioritas ini dikaitkan dengan Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM). Hubungan ini menggambarkan peran Renstra PD dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis komunitas, meningkatkan kesempatan kerja, serta membangun ekosistem UMKM yang berdaya saing. Rumah Kreatif Millennial dan Ekotren menggarisbawahi penguatan ekonomi generasi muda dan pesantren, sementara target UMKM naik kelas, toko kelontong modern, serta pengusaha perempuan berdaya saing diarahkan untuk memperkuat struktur ekonomi keluarga dan masyarakat.

6. SAE Pendapatan Keluarga : Koperasi Desa Merah Putih

Program ini terkait dengan Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi. Keterkaitannya menunjukkan bahwa pengembangan koperasi desa perlu didukung dengan pengawasan dan pemeriksaan yang baik agar koperasi tetap sehat, transparan, dan akuntabel. Hal ini juga untuk memastikan keberlanjutan koperasi sebagai pilar ekonomi desa.

7. SAE Pendapatan Keluarga : Koperasi Desa Merah Putih



BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

Selain itu, program ini juga terhubung dengan Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi. Sinergi ini menekankan pentingnya menilai dan memantau kinerja koperasi agar sesuai dengan standar kelembagaan dan peraturan, sehingga koperasi dapat berperan optimal dalam peningkatan pendapatan keluarga.

8. SAE Pendapatan Keluarga : Koperasi Desa Merah Putih

Program ini juga dikaitkan dengan Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian. Keterkaitan ini memperlihatkan strategi jangka panjang, yaitu meningkatkan kapasitas SDM koperasi melalui pendidikan, pelatihan, serta penguatan manajerial. Dengan demikian, koperasi tidak hanya berdiri secara kelembagaan, tetapi juga memiliki kualitas pengelolaan yang mumpuni.

9. SAE Kesempatan Kerja : Membangun Perwilayahan Industri

Program ini berhubungan dengan Program Perencanaan dan Pembangunan Industri. Hubungan ini menegaskan strategi pengembangan kawasan industri sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru, penyerap tenaga kerja, sekaligus penggerak pemerataan pembangunan ekonomi daerah.

10. SAE Kesempatan Kerja : Membangun Perwilayahan Industri

Program prioritas ini juga berkorelasi dengan Program Pengendalian Izin Usaha Industri. Keterkaitannya terletak pada upaya menjaga iklim investasi dan perindustrian yang sehat melalui tata kelola izin usaha industri yang transparan dan akuntabel. Hal ini menjadi instrumen penting dalam mendukung keberlangsungan perwilayahan industri.

4.3.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PROBOLINGGO

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo merupakan perangkat daerah yang memiliki mandat strategis dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan koperasi, pengembangan usaha mikro, penguatan perdagangan, dan percepatan industrialisasi daerah. Untuk mengukur keberhasilan kinerja pembangunan pada



BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

sektor-sektor tersebut, ditetapkanlah sejumlah Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi tolok ukur pencapaian sasaran strategis dalam Renstra 2025–2029.

IKU yang ditetapkan didasarkan pada peran nyata masing - masing urusan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dengan demikian, IKU bukan hanya sekadar angka target, tetapi mencerminkan prioritas pembangunan ekonomi Kabupaten Probolinggo yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan, seperti yang tertuang pada tabel di bawah ini :

**TABEL 4.7 INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PROBOLINGGO**

NO	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	2.17.3.30.3.31.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan Dan Perindustrian									
2.	Persentase PDRB Perdagangan	%	4,11	4,67	5,23	5,78	6,34	6,9	7,46	
3.	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	27,19	27,35	27,43	27,44	27,45	27,47	27,48	
4.	Persentase Pertumbuhan omzet koperasi	%	7,53	8	8,5	9	9,5	10	10,5	
5.	Persentase pertumbuhan omzet Usaha Mikro	%	1,97	2	2,25	2,5	2,75	3	3,25	
6.	Kontribusi PDRB sub sektor Perdagangan	%	13	13,5	14	14,5	15	15,5	16	
7.	Kontribusi PDRB sub sektor industri	%	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5	



BAB V
PENUTUP

5.1 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo berlaku selama lima tahun dari tahun 2025 hingga 2029. Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo merupakan rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Pelaksanaan kegiatan di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan, dan Perindustrian (DKUPP) Kabupaten Probolinggo disusun dengan memperhatikan sejumlah kaidah utama yang menjadi pedoman kerja. Seluruh kegiatan harus terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, mulai dari RPJMD, Renstra, Renja, hingga RKPD. Dengan demikian, arah pembangunan yang ditempuh DKUPP tetap selaras dengan prioritas pembangunan nasional, provinsi, maupun daerah.

Kegiatan yang dijalankan juga berlandaskan pada potensi unggulan daerah, khususnya pada sektor perdagangan, industri pengolahan, koperasi, dan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Pendekatan ini dilakukan untuk mengoptimalkan kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB, memperkuat daya saing produk unggulan, sekaligus menumbuhkan koperasi dan UMKM sebagai pilar utama ekonomi kerakyatan di Kabupaten Probolinggo.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan diarahkan tidak hanya menghasilkan output, melainkan juga outcome yang nyata. Dampak yang diharapkan mencakup peningkatan omzet UMKM dan koperasi, pertumbuhan PDRB sektor perdagangan dan industri, stabilitas harga barang kebutuhan pokok, peningkatan volume ekspor, serta terciptanya iklim usaha yang kondusif.

Prinsip akuntabilitas dan transparansi menjadi dasar pelaksanaan kegiatan melalui penyusunan perencanaan berbasis kinerja, pengendalian melalui monitoring rutin, evaluasi capaian indikator menggunakan SAKIP, serta pelaporan kinerja secara tepat waktu. Seluruh kegiatan dilaksanakan secara partisipatif dan kolaboratif dengan melibatkan berbagai pemangku



BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

kepentingan, baik pemerintah pusat, provinsi, BUMN, BUMD, swasta, lembaga keuangan, asosiasi, maupun masyarakat.

Efisiensi dan efektivitas juga menjadi perhatian utama, di mana penggunaan sumber daya harus optimal namun tetap menghasilkan capaian yang tepat sasaran, tepat waktu, dan memberikan manfaat nyata bagi perekonomian masyarakat. Seluruh kegiatan dirancang agar berkelanjutan (sustainable), tidak berhenti pada capaian tahunan semata, tetapi menciptakan dampak jangka panjang seperti penguatan kapasitas koperasi dan UMKM, peningkatan daya saing produk unggulan, serta pengembangan sistem perdagangan dan industri yang lebih modern.

Selain itu, pelaksanaan kegiatan harus berbasis data yang valid, terintegrasi, dan terkini dengan memanfaatkan teknologi informasi. Pemanfaatan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas), Sistem Informasi Perdagangan, serta instrumen digital lainnya menjadi bagian penting untuk mewujudkan transparansi layanan dan perumusan kebijakan berbasis bukti.

5.2 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan program dan kegiatan DKUPP Kabupaten Probolinggo dirancang untuk mendukung tujuan utama RPJMD 2025–2029, yaitu meningkatkan pengembangan sektor usaha berbasis potensi unggulan daerah. Dalam implementasinya, pengendalian dan evaluasi menjadi instrumen penting untuk memastikan setiap kegiatan berjalan sesuai target serta memberikan dampak nyata terhadap peningkatan PDRB sektor perdagangan dan industri pengolahan.

Pengendalian dilakukan melalui pemantauan secara periodik atas capaian indikator kinerja program, kegiatan, dan subkegiatan. Indikator tersebut antara lain:

- Persentase pertumbuhan omzet koperasi dan usaha mikro.
- Persentase kontribusi PDRB subsektor perdagangan dan industri.
- Persentase koperasi yang memiliki izin, sehat, patuh regulasi, serta yang difasilitasi SDM-nya.
- Persentase usaha perdagangan berizin, sarana distribusi ber-SNI, harga kebutuhan pokok yang stabil, dan produk unggulan daerah yang dipasarkan.



BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

Evaluasi dilakukan secara tahunan melalui Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP perangkat daerah, yang mengukur efektivitas perencanaan, pelaksanaan, hingga capaian kinerja. Evaluasi ini mencakup aspek input (pendanaan, sumber daya manusia), proses (pelaksanaan kegiatan), output (dokumen, fasilitas, izin, pelatihan), hingga outcome (peningkatan omzet, pertumbuhan sektor perdagangan/industri, stabilisasi harga, dan peningkatan ekspor).

Hasil pengendalian dan evaluasi menjadi dasar untuk:

- 1. Perbaikan perencanaan tahunan (Renja DKUPP).
- 2. Reorientasi program/kegiatan jika terdapat penyimpangan dari target.
- 3. Penguatan koordinasi dengan stakeholder, baik pemerintah, pelaku usaha, koperasi, maupun masyarakat.
- 4. Peningkatan akuntabilitas kinerja, yang tercermin dalam target kenaikan nilai LHE AKIP perangkat daerah.

Dengan demikian, pengendalian dan evaluasi kegiatan DKUPP bukan sekadar administrasi, tetapi menjadi mekanisme strategis untuk memastikan kontribusi nyata sektor koperasi, UMKM, perdagangan, dan perindustrian terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan di Kabupaten Probolinggo.

Probolinggo, 26 September 2025

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN



TAUPIK ALAMI, S.Sos., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19700108 199602 1 001



BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL